YANG KELEWAT DI BUKU SEJARAH

TIM PAMFLET GENERASI

Yang Kelewat di Buku Sejarah

Jakarta

Perkumpulan Pamflet Generasi

Penulis
Fadlia Hana, Firman Suryani, Muhamad Hisbullah Amrie, Nisrina Nadhifah Rahman, Raka Ibrahim, Rika Rosvianti

ISBN 978-602-71743-2-0

Penyunting
Farhanah, Maulida Raviola, Muhamad Hisbullah Amrie

Tata Letak Isi
Rico Prasetyo

Ilustrator
Indriani Widiastuti

Perancang Sampul
Indriani Widiastuti

Dituliskan dan diterbitkan oleh:
Perkumpulan Pamflet Generasi
Komplek Buncit Indah
Jalan Mimosa IV Blok E No 17, Pejaten Barat
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, Indonesia
www.pamflet.or.id
E-mail: pamfletindonesia@gmail.com

Daftar Isi

Pengantar 8
Mengapa Kebenaran Penting? 9
Hak atas Kebenaran 10
Enam Pola Kekerasan di Indonesia 11

Pola Kekerasan 1
Diam-Diam Dihanyutkan 15
Apa yang Terjadi? 18
Bagaimana Bentuk Pembasmian yang Dilakukan? 20
Aktivitas Ngobrol dengan Orang Tua 28

Pola Kekerasan 2
Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga 31
Sejarah Transmigrasi di Indonesia 35
Konsesi bagi Pertambangan 37
Kisah Freeport dan Orang Papua 40
Konsesi bagi Kehutanan 42
Badega: Tanah Petani yang Dirampas 46
Negara yang mengambil Alih Tanah Rakyat 49
Uji Kadar Kepedulianmu terhadap Lingkungan 51
Jangan Diam, Lawan! 52
Uji Ingatan Kamu 55

Pola Kekerasan 3
Beda Itu (Tidak) Biasa 57
"Beda Itu Tidak Biasa" 59
Geng-Gengan yang Berujung Petaka 59
Ekonomi sebagai Panglima 62
Bapak vs. Anak 65
Dilarang Gondrong! 69
Dari Kampus ke Mimbar 68
Bhinneka Tunggal Ika (?) 83
Tunjukkan Kebolehanmu! 77

Pola Kekerasan 4
Banyak yang Cinta Damai, tapi Perang Semakin Ramai 87
Peta Buta 92
Konflik Poso 96
Di Balik Konflik 99
Kok Perangnya Masih Ramai? 100
Cocok Nggak? 107

Pola Kekerasan 5

Dipaksa Berencana 109
KB: Hak Reproduksi Perempuan **111**
Menolak KB di Orde Baru **114**
Laki-laki dalam Program KB **115**
Jadi Kamu Sudah Paham atau Belum? **123**

Pola Kekerasan 6

Buntu 125
Apa itu Hukum? **127**
Aturan Main Orde Baru **129**
Lembaga Peradilan sebagai Alat Kekuasaan **131**
Mencari Jalan: Menyelesaikan Pelanggaran HAM **132**
Lembar Ekspresi **137**

Tim Penyusun 140

Referensi 144
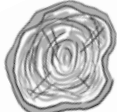
Pengantar
Ke.be.na.ran

"Rather than love, than money, than fame, give me truth."
Henry David Thoreau

Kebenaran adalah sebuah kata sederhana dengan makna yang kompleks. Dalam hidup kita sehari-hari, kita sering mendengar akar kata kebenaran, **'benar'**, sebagai sesuatu yang mutlak berlawanan dengan kata 'salah'. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan 'benar' sebagai sesuatu yang 'sesuai sebagaimana adanya (seharusnya); betul; tidak salah'. Namun, kata para filsuf, sesuatu yang kita artikan sebagai kebenaran juga dapat dilihat dari sisi fakta, logika, atau etika. Satu tambah satu sama dengan dua, misalnya, adalah sebuah kebenaran karena ia benar baik dari sisi logis maupun fakta.

Sepanjang hidup, kita belajar membedakan benar dan salah. Kita mempelajarinya dari orang-orang di sekeliling kita; seperti keluarga, teman-teman, sekolah, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, semakin kita beranjak dewasa, kita tahu bahwa membedakan benar dan salah tidak sesederhana membedakan kanan dan kiri. Apakah kebenaran dan kesalahan hanya ada satu? Apakah kebenaran adalah sesuatu yang selalu baik? Atau, apakah kebenaran adalah sesuatu yang selalu ada sebagaimana adanya?

Seorang filsuf dari Jerman bernama Martin Heidegger pernah berkata bahwa asal muasal dan inti dari makna kebenaran adalah **'pengungkapan'**, atau membuka apa yang sebelumnya tersembunyi, seperti dari asal katanya dalam bahasa Yunani Kuno, *'aletheia'*. Karena terkadang, tidak semua yang benar terlihat terang-benderang. Ada juga kebenaran-kebenaran yang tersembunyi, disembunyikan, bahkan dihilangkan, sehingga kita perlu melakukan berbagai cara, seperti bertemu dengan banyak orang dan pergi ke banyak tempat untuk "menemukan kebenaran".

Buku yang ada di tanganmu saat ini adalah salah satu caramu untuk bertemu dengan banyak orang, pergi ke banyak tempat, dan mendengarkan kisah-kisah yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya di sebuah tempat bernama Indonesia. Konon, di tempat yang sering disebut bertanah subur dengan rakyat yang hidup makmur ini, pernah terjadi banyak sekali peristiwa kekerasan. Perampasan tanah, pemaksaan, penganiayaan, penculikan, bahkan pembunuhan dan pembantaian terjadi berulang-ulang dengan korban yang tidak sedikit.

Ada suatu masa di mana kebenaran dari peristiwa-peristiwa ini hanya sedikit beredar, bahkan disembunyikan, sehingga kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak korban dan keluarga dari peristiwa-peristiwa ini yang masih hidup dalam ketakutan karena diancam dan diteror. Hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara hilang atau terampas. Kisah-kisah mereka belum banyak terungkap karena banyak yang sudah lama terjadi, maka pengungkapan kebenarannya dianggap tidak terlalu penting lagi. Padahal, masih banyak di antara korban dan keluarganya yang hilang diculik dan tak pernah kembali, rumahnya dibakar dan terpaksa hidup berpindah-pindah, atau sakit secara mental dan fisik tanpa mendapatkan perawatan yang layak.

Pengungkapan kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang tidak pernah dianggap penting oleh negara menyisakan banyak pelaku atau pemrakarsa yang terbebas dari hukuman dan tanggung jawab mereka. Inilah yang disebut **impunitas,** yaitu situasi di mana pelaku pelanggaran hak dapat menghindar dari pertanggungjawaban atas dugaan terlibat dalam kejahatan. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, negara kita memberikan ruang bagi kekerasan dengan terus-menerus membiarkan impunitas. Jika kita tidak pernah mengungkap kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang sudah lewat, maka secara tidak langsung kita membiarkan impunitas terus ada. Padahal, kita semua bisa saja menjadi korban dari kekerasan di waktu-waktu yang akan datang. Buktinya, hingga hari ini bahkan masih saja kita lihat atau dengar kekerasan demi kekerasan terjadi di banyak tempat. Kekerasan seakan menjadi hal yang biasa-biasa saja, bahkan dianggap wajar dilakukan, terutama terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda.

Mengapa Kebenaran Penting?

Jika kita melihat hubungan antara kebenaran dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di Indonesia, ada sejumlah alasan mengapa mengetahui kebenaran itu penting.

Tanpa mengetahui kebenaran, kekerasan akan selalu berulang. Kekerasan kerap dilakukan pada kelompok yang dianggap berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Karena berbeda, maka mereka berbahaya dan harus dilawan. Mereka berbahaya karena “kafir”, “sesat”, “pemberontak”, “kiri”, dan masih banyak cap negatif lainnya. Kalau kita terlanjur menganggap cap-cap negatif tersebut sebagai kebenaran, kita akan selalu melihat perbedaan sebagai ancaman, kemudian menganggap kekerasan boleh dilakukan kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

Kebenaran berguna untuk memahami dampak kekerasan di hidup kita saat ini. Usaha-usaha mencari kebenaran akan membuat kita menyadari dampak-dampak tidak langsung dari peristiwa-peristiwa kekerasan ini dalam hidup kita. Kita jadi banyak bertanya-tanya, apakah kekerasan yang dibiarkan membuat kita juga cenderung mudah melakukan kekerasan kepada orang lain? Apakah kebenaran yang tak pernah diungkap membuat kita menjadi cepat lupa dan apatis, sehingga kita juga sulit berempati terhadap orang-orang yang ditindas? Dengan mencari kebenaran, kita akan belajar untuk memahami banyak hal, termasuk maknanya terhadap hidup kita.

Mencari kebenaran berarti menguraikan akar dari kekerasan. Mengetahui apa yang benar akan membuatmu memahami suatu masalah secara jernih, termasuk apa sesungguhnya akar masalah yang membuat kekerasan dapat terjadi. Jika sebelumnya kita hanya melihat potongan dari kekerasan, kebenaran membawa kita ke akar permasalahan sehingga kita dapat memahami peristiwa tersebut secara menyeluruh. Dengan mengetahui akar masalah, kita dapat memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya, sehingga di waktu yang akan datang tidak perlu lagi ada kekerasan.

Pengakuan perlu untuk mencegah kekerasan di waktu yang akan datang. Kebenaran tidak hanya harus dicari dan diungkap, tetapi juga harus diakui. Pengakuan adalah langkah yang membuka pintu-pintu berikutnya menuju penyelesaian masalah. Jika kita tahu bagaimana menyelesaikannya, kita tidak akan mengulangi lagi kekerasan yang sama.

Hak atas Kebenaran

Hak atas kebenaran adalah hak yang dimiliki oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Hak ini otomatis menjadi milikmu, sama seperti hak-hak lainnya yang harus dipenuhi oleh negara. Hak atas kebenaran adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada proses pengadilan. Kita tidak perlu melalui sidang atau proses hukum untuk mendapatkan hak ini. Hak atas kebenaran adalah hak yang mutlak.

Hak atas kebenaran juga menjadi bagian dari hak korban bersama **hak atas keadilan, hak atas reparasi pemulihan,** dan **jaminan bahwa pelanggaran hak takkan berulang**. Hak atas kebenaran tidak hanya **dimiliki oleh korban dan keluarga** dari kasus-kasus pelanggaran hak yang mereka alami, namun juga **wajib dipenuhi oleh negara** untuk mencari mereka yang hilang dan mengungkapkan informasi kepada keluarganya.

Cara mewujudkan hak atas kebenaran di antaranya adalah membentuk komisi kebenaran, tim pencari fakta, mekanisme pengadilan, kajian arsip sejarah, dan akses publik terhadap dokumen negara. Salah satu tempat untuk mendapatkan hakmu atas kebenaran adalah di sekolah. Kurikulum pendidikan harus memberi ruang untuk belajar dan berdialog tentang sejarah kekerasan. Di halaman-halaman selanjutnya, kamu akan mengetahui beberapa contoh proses tersebut yang dilaksanakan pada beberapa peristiwa.

Yang terpenting, hak atas kebenaran adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk **mengingat, melawan lupa,** dan **melawan kebohongan.**

Enam Pola Kekerasan di Indonesia

Buku ini disusun dan disadur dari buku berjudul *Menemukan Kembali Indonesia* yang diterbitkan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) pada tahun 2014. Buku tersebut disusun sebagai laporan dan kumpulan kesaksian korban dan keluarga dari peristiwa-peristiwa kekerasan di Indonesia. Tim penyusun yang terdiri dari 47 organisasi masyarakat sipil dan individu mendokumentasikan 930 peristiwa kekerasan yang terjadi sejak 1965 hingga 2005.

Temuan mencatat sembilan provinsi dengan kasus kekerasan terbanyak, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, tim juga mencatat banyak korban kekerasan dari Timor Leste (wilayah bekas provinsi Indonesia). Dari kasus-kasus yang mereka data, tim dokumentasi menemukan lima jenis peristiwa kejahatan yang paling banyak dilaporkan adalah peristiwa terkait dengan tragedi 1965, operasi militer, konflik sumber daya alam, serangan terhadap kelompok pembela Hak Asasi Manusia, dan pemaksaan ideologi. Dari lima jenis peristiwa ini, tim dokumentasi juga mencatat bahwa bentuk-bentuk tindakan kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses hukum, kerja paksa, wajib lapor dan pembatasan untuk bergerak/bepergian, penghilangan paksa, perampasan tanah dan harta benda, perusakan harta benda, penyiksaan, penganiayaan fisik, hingga pembunuhan.

Dari keseluruhan laporan tersebut, terlihat pola-pola kekerasan yang terus berulang selama empat puluh tahun yang mereka soroti. Pola kekerasan ini tidak hanya terjadi pada waktu yang berbeda, tetapi juga di berbagai tempat di Indonesia. Selain itu, meski pola kekerasan ini dibedakan berdasarkan jenis kekerasannya, ada banyak peristiwa di mana pola kekerasan yang terjadi lebih

dari satu atau merupakan persinggungan dari beberapa pola yang ada. Di bab-bab berikutnya, kamu akan membaca dan memahami lebih banyak tentang **enam pola kekerasan** berikut.

“Diam-Diam Dihanyutkan”

Dalam bab ini, kamu akan mempelajari peristiwa **pembasmian** yang terjadi di Indonesia. Pembasmian adalah pembunuhan yang dilakukan dalam skala besar, baik secara langsung maupun dengan menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kematian. Pembasmian terjadi dalam skala besar pada awal rezim pemerintahan Orde Baru dan terulang pada periode pasca-Reformasi di Timor Timur, Aceh, dan Papua.

“Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga”

Lagu Koes Plus berjudul “Kolam Susu” sangat *hits* pada masanya dan mencerminkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Judul bab ini diambil dari lirik lagu tersebut, Indonesia adalah tanah surga. Tapi, apa benar begitu? Berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran berkaitan dengan upaya pengambilalihan sumber daya alam dilakukan oleh atau dengan dukungan negara. Kekerasan tersebut bisa berupa pembunuhan, penculikan, penahanan, penyiksaan, atau pengadilan yang tak adil. Perampasan sumber daya alam demi masuknya pemodal asing adalah salah satu karakter pemerintahan Orde Baru yang masih terjadi hingga saat ini.

“Beda Itu (Tidak) Biasa”

Jangankan dalam cakupan Indonesia, di sekolahmu saja pasti banyak perbedaan bukan? Baik perbedaan cara berpakaian, hobi, kepercayaan, suku, dan lainnya. Perbedaan tentu adalah hal yang biasa, namun sejarah berkata lain. Pemerintah kerap melakukan penyeragaman dan pengendalian total terhadap agama, kepercayaan, budaya, desa, tanah, sampai organisasi. Hal ini dilakukan untuk melibas keberagaman dan kondisi-kondisi lain yang menghalangi agenda pembangunan saat itu. Penyeragaman dan pengendalian digunakan untuk memperkuat kontrol terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat.

“Banyak yang Cinta Damai, tapi Perang Semakin Ramai”

Judul bab ini juga diambil dari salah satu lagu *hits* pada era 1990-an. Awalnya lagu ini merupakan lagu *qasidah* (semacam paduan suara ibu-ibu pengajian yang biasanya disertai dengan rebana), namun pada 2005 lagu ini dinyanyikan

ulang oleh grup band Gigi. Bab ini akan menambah pengetahuanmu mengenai kekerasan antarwarga di Indonesia. Kekerasan berbasis agama, etnis, dan kelompok dikelola sebagai perpanjangan tangan negara dan aparat keamanan. Strategi ini digunakan pada peristiwa-peristiwa pembasmian oleh rezim Orde Baru. Setelah reformasi, kekerasan antarwarga muncul dalam skala luas di Kalimantan, Maluku, Poso, dan wilayah-wilayah lain.

"Dipaksa Berencana"

Di Indonesia perempuan menjadi subjek yang diperhatikan oleh pemerintah karena belum adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang; pekerjaan, pendidikan, akses kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan, kekerasan terhadap perempuan justru semakin marak. Perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan perempuan, dan kekerasan lainnya banyak terjadi. Pada pembasmian, perampasan, pengendalian, dan kekerasan antarwarga, perempuan menjadi korban kekerasan yang secara khusus menyasar tubuhnya. Seperti di era Orde Baru ketika para perempuan dipaksa menggunakan kontrasepsi tanpa pengetahuan yang utuh melalui program Keluarga Berencana. Tidak hanya itu, perempuan menghadapi tembok yang sulit ditembus saat mencoba mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

"Buntu"

Sampai saat ini, belum ada proses pengadilan yang berhasil untuk pelaku. Semua terdakwa yang diadili untuk kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura (Papua) akhirnya dibebaskan. Negara juga tidak berupaya untuk memulihkan korban. Impunitas atau kebuntuan hukum menyebabkan kasus pelanggaran HAM semakin banyak dan penyelesaiannya terasa semakin buntu. Pelaku terus berada pada posisi berkuasa sementara korban terus dipinggirkan dan disalahkan. Impunitas membuka kesempatan terjadinya kekerasan baru karena tak ada sanksi untuk pelaku kekerasan.

Pola Kekerasan 1

Diam-Diam Dihanyutkan

n kemudian kaki, pinggang,
an leher saya diikatkan
engan tiang bendera. Ikatan
u baru dilepaskan di subuh
ari dan mereka membiarkan
aya tidur di pinggir rumah pos
polisi.

Saya baru diberi makan hari itu, dua hari setelah saya ditangkap. Saat itu, saya sudah tidak mampu lagi untuk makan sendiri sehingga saya harus disuapi oleh seseorang yang membawa makanan bagi kami.
Kami ditahan di pos polisi Panite lebih dari seminggu. Kami disuruh memintal tali dari heknak setiap hari hinga larut malam. Mereka beberapa kali memeriksa saya tapi saya tetap tidak terbukti terlibat PKI. Malam sebelum saya dibebaskan, kami disuruh untuk mengerjakan satu gulungan besar sampai keesokan siangnya. Setelah selesai, saya dan orang-orang lain yang terbukti tidak terlibat kemudian dikembalikan ke kampung."

Dari cerita di atas, kita dapat membayangkan bagaimana seseorang yang dituduh anggota PKI tanpa bukti apa pun dapat diperlakukan seenaknya dan dirampas haknya. Tanpa melewati peradilan yang jelas, seseorang dapat ditangkap dan dipaksa melakukan kerja paksa tanpa dapat membela diri mereka sendiri.

Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu saat mendengar kata 'pembasmian'? Apa saja sih yang bisa dibasmi? Kejahatan? Penyakit? Nyamuk?

Berdasarkan Kamus Oxford, 'pembasmian' *(extermination)* diartikan: "membunuh, terutama sekelompok orang atau binatang."

Ternyata kata 'pembasmian' tidak hanya berlaku terhadap binatang dan kejahatan, namun juga terhadap manusia. Tidak perlu jauh-jauh, Indonesia sendiri pernah merasakan pahitnya rasa pembasmian. Ini dirasakan terutama oleh keluarga-keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga mereka karena terlibat, difitnah, atau menjadi anggota organisasi tertentu yang dilarang pemerintah pada saat itu.

Pembasmian adalah pembunuhan yang dilakukan dalam skala besar, baik secara langsung maupun dengan menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kematian. Pembasmian terjadi dalam skala besar pada awal rezim pemerintahan Orde Baru dan terulang pada periode pasca-Reformasi di Timor Timur, Aceh, dan Papua.

KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) menggunakan istilah pembasmian untuk menggambarkan salah satu pola kekerasan yang menjadi ciri pokok rezim Orde Baru. Selama berkuasa, rezim Orde Baru terus-menerus menggelar operasi militer untuk membasmi kelompok yang dianggap berseberangan atau melakukan gerakan perlawanan. Pembasmian terjadi sejak bulan Juli 1965 di Papua (dulu Irian Barat) dalam konflik politik menuju Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan mengalami peningkatan skala dalam pembantaian massal 1965-1966.

Mungkin kamu tidak asing dengan peristiwa pembunuhan tujuh perwira tinggi militer Indonesia tanggal 30 September 1965 yang disebut-sebut didalangi oleh salah satu partai terkuat pada masa itu, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa tersebut pada akhirnya mengantarkan Indonesia ke masa kelam di mana terjadi pembasmian anggota, simpatisan maupun keluarga PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI. Dalam peristiwa tersebut

terjadi banyak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sipil. Beberapa pola yang digunakan oleh pemerintah adalah pembasmian yang tergambar dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Apa yang terjadi?

Sebelum peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Partai Komunis Indonesia tercatat sebagai Partai Komunis paling besar di dunia tanpa menghitung partai komunis yang ada di Uni Soviet maupun Tiongkok. Ketika dilakukan audit pada tahun 1965, tercatat bahwa anggota aktif dari partai ini melebihi angka 3,5 juta, belum termasuk tiga juta orang menjadi anggota pergerakan pemuda. Selain itu, PKI juga memiliki pengaruh yang kuat akan pergerakan buruh, menambahkan 3,5 juta orang lagi di bawah pengaruhnya. Angka tersebut belum berhenti karena masih ada sembilan juta anggota dari pergerakan petani, pergerakan perempuan, organisasi penulis, dan pergerakan sarjana yang membuat total anggota PKI mencapai angka 20 juta anggota termasuk simpatisannya.

Tahukah kamu?

Ada beberapa organisasi yang disebut sebagai organisasi yang berkaitan dengan PKI yang anggota-anggotanya juga menjadi korban pembasmian pada peristiwa ini. Antara lain:

- Barisan Tani Indonesia (BTI)
- Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)
- Pemuda Rakyat
- Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)
- Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI)
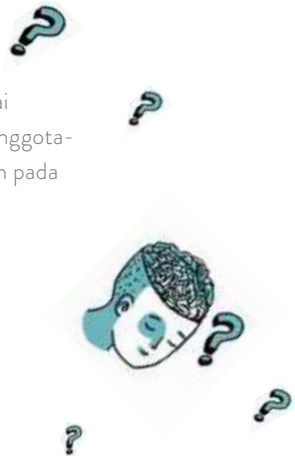
Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari terjadi pembunuhan terhadap enam perwira tinggi militer Indonesia dan jasadnya dibuang di Lubang Buaya. Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Raden Suprapto, Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu CZI Pierre Andreas Tendean (ajudan dari Jenderal TNI Abdul Harris Nasution) tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

> *"Pada dini hari 1 Oktober 1965, enam orang jenderal dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh di ibu kota Indonesia, Jakarta. Sebuah kelompok militer yang bernama Gerakan 30 September menyatakan*

diri bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan itu. Selama hari-hari yang kacau pada awal bulan Oktober 1965 itu, surat kabar resmi milik Angkatan Darat, Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, menurunkan berita-berita yang menuduh para pemimpin dan anggota PKI bertanggung jawab atas pembunuhan para jenderal tersebut. Surat kabar lainnya dilarang terbit. Koran milik Angkatan Darat itu memberitakan sebuah cerita yang menyebutkan bahwa 'tindakan-tindakan biadab' telah dilakukan oleh para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia, sebuah organisasi perempuan yang terkait dengan PKI), yakni menista jenazah para jenderal. Karena pemberitaan yang semacam ini, dalam beberapa hari saja cerita-cerita tentang 'kekejaman komunis' langsung menyebar di seluruh negeri, terutama di Jawa dan Bali. Sementara itu, di tengah-tengah keadaan yang kacau ini Mayor Jenderal Soeharto (Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat/Kostrad saat itu, yang nantinya akan menjadi Presiden Indonesia) tampil ke muka sebagai 'penyelamat' bangsa dari ancaman komunisme dan dengan cepat membasmi 'konspirasi jahat' tersebut." (Menemukan Kembali Indonesia, hal 48)
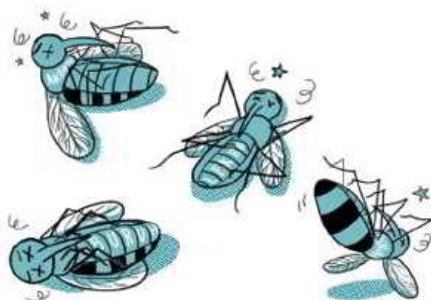
Sejak saat itu aksi-aksi pembersihan disertai kekerasan dan pembunuhan terhadap orang-orang komunis dimulai dan terus berlangsung sampai Maret 1966 di banyak wilayah Indonesia. Aksi-aksi ini mengakibatkan terjadinya pembantaian terhadap sekitar setengah juta orang Indonesia.

Aksi pembantaian massal ini pun tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara, tapi juga dibantu oleh warga sipil. Warga sipil tidak segan untuk membantai warga sipil lainnya yang dianggap mendukung PKI dan mengeksekusi mereka tanpa proses peradilan yang jelas. Jika kamu heran mengapa warga sipil bisa tega membunuh warga sipil lainnya, hal tersebut dikarenakan pengaruh provokasi yang sangat gencar di lingkungan masyarakat. Seruan-seruan seperti "PKI penghianat", "barbar", "tidak percaya tuhan", dan "halal untuk dibunuh" begitu kencang di masyarakat. Hal ini meningkatkan kemarahan serta rasa takut warga terhadap PKI sehingga pembasmian pun mendapatkan dukungan dari warga sipil. Istilah 'PKI' pun masih dinilai negatif di lingkungan kita sehari-hari sampai hari ini.

Peristiwa Gerakan 30 September sangat penting karena menjadi momentum pengukuhan kekuasaan Soeharto yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Kekerasan massal yang berlangsung menjadi tonggak merasuknya **impunitas** ke dalam perjalanan bangsa. Peristiwa Gerakan 30 September hanya terjadi di sebagian kota Jakarta diikuti dengan penculikan lima komandan militer di Jawa Tengah. Dalam waktu 1-2 hari saja gerakan ini telah pudar tanpa bekas. Namun, dampaknya meluas dengan keadaan darurat militer yang membuka keran kekerasan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Jutaan rakyat pedesaan di seluruh Indonesia tidak mengetahui tentang peristiwa itu tetapi harus menanggung beban yang luar biasa. Berbagai kesaksian korban menggambarkan bagaimana aparat keamanan menginterogasi rakyat biasa tentang sebuah kejadian yang tidak diketahui sama sekali.

Bagaimana bentuk pembasmian yang dilakukan?

Berbagai kesaksian korban peristiwa 30 September menceritakan pengalaman mereka terkait penyiksaan yang dialami atau dilihat di antara tahanan politik (tapol) lainnya. Pola pembasmian yang digunakan oleh aparat pemerintah terhadap tahanan politik bermacam-macam; mulai dari penangkapan, penghilangan paksa, perbudakan, penyiksaan, dan pembunuhan. Bentuk penyiksaan-penyiksaan tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu terkait PKI dan untuk membuat para tapol mengakui bahwa mereka bagian dari PKI (walaupun mereka bukan anggota PKI).

Tahukah kamu?

Penghilangan paksa juga dilakukan terhadap orang-orang yang sudah berada di tempat penahanan dengan sistem “bon”. Militer, polisi, dan kelompok sipil sewaktu-waktu dapat mengambil orang dari tempat penahanan dan dibawa ke tempat pembantaian untuk dibunuh.
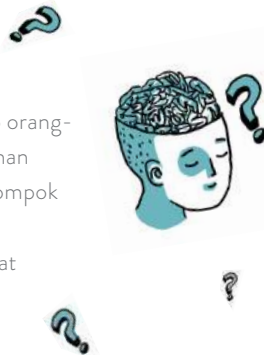
Di Jawa Tengah pembasmian mulai muncul dalam gelombang besar setelah Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD) bergerak ke Jawa Tengah pada 17 Oktober 1965. Pada awal Desember, pasukan RPKAD bersama kesatuan dari Divisi Brawijaya yang bermarkas di Jawa Timur mendarat di Bali. Militer dan **milisi** mengampanyekan anggota PKI sebagai pengkhianat, barbar, dan atheis. Secara terang-terangan mereka menghasut warga untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anggota PKI.

Istilah baru!

Milisi adalah kelompok masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk membantu pergerakan aparat negara dalam menangkap anggota dan partisipan PKI pada masa itu.

Pembunuhan tahanan politik yang terjadi ada yang dilakukan secara diam-diam, ada pula yang menjadi tontonan warga. Di beberapa tempat, penembakan korban dilakukan di alun-alun kantor pemerintahan dan disaksikan oleh masyarakat sekitar.

Hal tersebut adalah salah satu bentuk doktrin yang dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana dianggap "hina"-nya seseorang apabila ketahuan menjadi anggota PKI. Mayat-mayat korban pembantaian pun tidak kurang mengenaskannya, ada yang dikubur massal, dibuang ke laut atau dihanyutkan di sungai.

Tahukah kamu?

Di Jawa Tengah terdapat salah satu tempat pembunuhan massal yang bernama Jembatan Bacem. Jembatan itu terletak di perbatasan Desa Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta. Di bawah jembatan itu mengalir anak sungai Bengawan Solo. Jembatan aslinya kini tinggal fondasi, akan tetapi di sebelahnya telah dibangun kembali jembatan baru yang lebih kokoh. Dikatakan oleh bekas anggota Lekra, warga sekitar jembatan sering dipaksa untuk membantu aparat menghanyutkan mayat-mayat korban yang ditembak pada malam hari ke tengah sungai.

Penghilangan paksa dan pembunuhan dalam periode 1965-1967 sulit untuk dipisahkan. Banyak korban diambil secara sewenang-wenang dan dibawa ke tempat-tempat penahanan tidak resmi. Sebagian besar dari mereka kemudian dibunuh dan dikubur atau dibuang di tempat terpencil, seperti di sungai dan jurang pegunungan. Sampai sekarang banyak keluarga korban yang tidak mengetahui keberadaan keluarganya yang menghilang.

Terdapat dua ciri umum penghilangan paksa. Pertama, korban disasar, diciduk dari rumah atau tempat kerja, atau tempat persembunyian. Korban ditahan—baik di

satu tempat maupun berpindah-pindah—dan disiksa untuk kemudian diambil dari tahanan dan dihilangkan secara paksa. Kedua, korban disasar, diciduk, dan langsung dihilangkan paksa. Kedua pola ini sering dilakukan dalam periode 1965-1967. Penghilangan paksa terhadap pimpinan organisasi massa biasanya dilakukan setelah mereka dipenjarakan terlebih dahulu.

Tindakan penahanan ini terjadi tidak lama setelah peristiwa 30 September 1965 di Jakarta. Korban penahanan bahkan menimpa anggota militer, seperti yang terjadi terhadap anggota pasukan yang sedang berada di Palu, setelah sebelumnya melaksanakan tugas di Irian Barat. Korban umumnya ditahan di kamp-kamp atau pusat penahanan sementara. Sebagian besar mengalami pemindahan tempat tahanan. Beberapa korban bahkan mengalami penahanan berulang. Di Yogyakarta misalnya, kantor Corps Polisi Militer (CPM) dijadikan tempat penahanan sementara bagi yang baru ditangkap untuk menjalani pemeriksaan.

Pelaku penahanan melibatkan militer dan sipil yang seringkali bertugas sebagai informan saat melakukan penangkapan. Hampir semua tahanan mengalami penyiksaan. Para tahanan disiksa dengan cara dipukul, ditendang, dijambak, ditodong senjata, serta ditelanjangi. Tidak jarang penyiksaan dilakukan dengan menggunakan alat seperti popor senjata, borgol, sepatu lars, bara rokok, dan alat setrum. Banyak dari tahanan yang menderita luka fisik dan mental hingga kini.

Penelanjangan dan pemerkosaan juga kerap digunakan untuk menyiksa para tapol. Mereka, khususnya para tapol perempuan, sering ditelanjangi saat melakukan pemeriksaan. Ada yang mengatakan bahwa anggota Gerwani memiliki tato di paha mereka sehingga dijadikan alasan aparat untuk menelanjangi mereka, bahkan memperkosa. Perbuatan semacam ini digunakan untuk mempermalukan korban agar segera mengakui bahwa mereka adalah bagian dari PKI. Tidak hanya dianiaya

Tahukah kamu?

Ada alat yang dikenal dengan sebutan **'cincin setrum'** yang digunakan untuk menyiksa tahanan politik. Alat itu terbuat dari tembaga berbentuk cincin yang dihubungkan dengan aliran listrik. Untuk menyiksa tahanan, cincin dipasangkan ke jari tangan, kaki, payudara, atau alat kelamin. Biasa juga dipasangkan pada beberapa tahanan sekaligus, lalu disetrum bersama-sama.

secara fisik, tapol perempuan pada akhirnya juga disiksa secara psikologis. Tidak sedikit tapol perempuan yang akhirnya mengakui apa yang tidak mereka perbuat atau pada akhirnya meninggal karena tidak tahan dengan siksaan fisik dan psikologis yang mereka alami.

Baca kisahnya!

Jika kamu ingin mengetahui bagaimana bentuk penyiksaan yang dialami para korban 1965, mari kita baca dulu kisah di bawah ini:

> Petrus Yohanes Neonleni lahir pada tahun 1932. Ia adalah korban penyiksaan militer atas tuduhan sebagai anggota PKI. Saat itu ia menjabat sebagai temukung besar di Nunusunu yang membawahi enam temukung kecil, yaitu wilayah Nunusunu, Kita, Fauthani, Na'tane, Kiufatu, dan Toineke. Ia ditangkap oleh polisi dan sejak itu, ia terus-menerus mendapatkan berbagai bentuk penyiksaan. Karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dengan PKI, polisi akhirnya membebaskan Petrus. Pada Akhir

Maret 2014, Petrus akhirnya meninggal dunia karena usia yang sudah tua. "Selesai menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat di So'e, saya mengikuti pendidikan guru Jumat. Setelah itu, kembali ke kampung saya di Nunusunu dan menjadi kepala desa (temukung besar) pada tahun 1965. Saya mendapat kabar bahwa polisi mencari saya. Ketika saya bertemu dengan rombongan polisi berkuda di kali Noma, saya langsung dilempari batu, dipukul, dan ditendang. Saya dituduh sebagai kepala PKI di Nunusunu padahal saya sama sekali tidak terlibat dengan PKI. Mereka kemudian membawa saya ke Oe'o untuk menjemput seseorang yang juga dituduh terlibat PKI.

Setiba di Oe'o, saya dan orang yang dituduh itu dipukul dengan rotan, ditendang, dan diinjak-injak di rumahnya. Kami lalu dibawa ke Pob (sekarang menjadi kantor desa Nunusunu), Nunu'tili dan ke Oehani, tapi tidak diberi makanan sedikit pun.

Di sepanjang perjalanan, saya disuruh berlari sambil memikul kepala kuda yang ditunggangi oleh seorang polisi dan polisi itu sesekali memukuli kepala saya dengan rotan. Di Oehani, saya dipukul di bagian dada dan perut diinjak-injak dengan sepatu. Kemudian dimasukkan ke dalam drum dan digulingkan menuruni gunung. Sampai di bawah, saya disuruh keluar, memikul drum ke atas gunung, dan disuruh masuk ke dalam drum untuk digulingkan kembali, berulang-ulang hingga 12 kali sampai merasa gelap dan dunia seakan berputar-putar. Lalu dibawa ke los, dipukul, ditendang. Saya disuruh berdiri di atas bangku, tangan diikat di belakang dan talinya digantungkan ke tiang di atap.

Mereka menendang bangku tempat saya berdiri dan saya tergantung di sana. Kira-kira sejam kemudian diturunkan dan disuruh duduk bersila di lumpur di tengah hujan yang sangat lebat. Setelah hujan berhenti, kami melanjutkan perjalanan ke Noemuka dan saya disuruh berendam di dalam lumpur selama hampir sejam.

Keesokan paginya, melanjutkan perjalanan ke Panite dan di sepanjang perjalanan, saya kembali disuruh memikul kepala kuda dan polisi yang menunggangi kuda itu terus memukuli kepala saya hingga darah saya terus keluar sepanjang perjalanan.

Sesampainya di Panite di sore hari, saya dan orang lain yang dituduh terlibat dengan PKI dipukuli, ditendang dan dada serta perut kami diinjak-injak. Setelah itu, saya disuruh berdiri di tiang bendera

dan kemudian kaki, pinggang, dan leher saya diikatkan dengan tiang bendera. Ikatan itu baru dilepaskan di subuh hari dan mereka membiarkan saya tidur di pinggir rumah pos polisi.

Saya baru diberi makan hari itu, dua hari setelah saya ditangkap. Saat itu, saya sudah tidak mampu lagi untuk makan sendiri sehingga saya harus disuapi oleh seseorang yang membawa makanan bagi kami.
Kami ditahan di pos polisi Panite lebih dari seminggu. Kami disuruh memintal tali dari heknak setiap hari hinga larut malam. Mereka beberapa kali memeriksa saya tapi saya tetap tidak terbukti terlibat PKI. Malam sebelum saya dibebaskan, kami disuruh untuk mengerjakan satu gulungan besar sampai keesokan siangnya. Setelah selesai, saya dan orang-orang lain yang terbukti tidak terlibat kemudian dikembalikan ke kampung."

Dari cerita di atas, kita dapat membayangkan bagaimana seseorang yang dituduh anggota PKI tanpa bukti apa pun dapat diperlakukan seenaknya dan dirampas haknya. Tanpa melewati peradilan yang jelas, seseorang dapat ditangkap dan dipaksa melakukan kerja paksa tanpa dapat membela diri mereka sendiri.

Tahukah kamu?

Sejak 2012, Palu memperoleh penghargaan sebagai "Kota Sadar HAM". Hal tersebut diperoleh karena Rusdy Mastura selaku Walikota Palu meminta maaf kepada korban kasus pembunuhan masal 1965-1966, khususnya yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau berjanji untuk memberikan pemulihan pada korban.

Tahukah kamu?

Pada 20 Juli 2016, Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag, Belanda, mengeluarkan hasil keputusan final sidang yang menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas sepuluh tindak kejahatan Hak Asasi Manusia berat yang terjadi pada 1965-1966.

Simak lebih jauh!

Untuk kamu yang masih mau tahu lebih banyak terkait Peristiwa 65 atau peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kekerasan di masa Orde Baru, kamu bisa lihat di:

Film

Jagal/The Act of Killing (2012) dan *Senyap/The Look of Silence* (2014)

Kedua film tersebut merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer (sutradara Inggris-Amerika) menceritakan bagaimana pelaku pembunuhan massal pada tahun 1965-1966 melaksanakan aksinya. Para pelaku tersebut menganggap bahwa pembunuhan yang mereka lakukan merupakan perbuatan heroik karena membantu pemerintah (yang pada saat itu dipimpin oleh Soeharto) menumpas PKI. Dalam film ini dikisahkan juga cerita alternatif yang sangat berbeda dari naskah sejarah peristiwa 65 di buku pelajaran sejarah. Kebanyakan buku sejarah (yang mungkin juga kamu pelajari di sekolah) menceritakan bahwa anggota PKI berusaha menjatuhkan pemerintah, dalam film ini, kita mengetahui sisi lain dari sejarah yang ada.

Sumber: IMDB
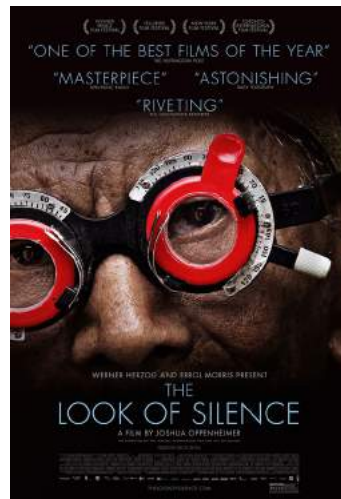
Sumber: IMDB

Jembatan Bacem (2013)

Film dokumenter berdurasi 30 menit ini bisa kamu saksikan di YouTube dengan kata kunci "Jembatan Bacem Film Dokumenter Tentang Peristiwa 1965". Jembatan Bacem berada di atas aliran Sungai Bengawan Solo yang dikenal sebagai tempat jagal para tahanan terduga anggota PKI atau organisasi yang berhubungan dengan partai tersebut. Film buatan Yayan Wiludiharto ini banyak menggunakan sketsa untuk mendeskripsikan kesaksian para penyintas peristiwa 1965. Dengan cerita dari korban pembantaian yang selamat, kamu jadi bisa mendapatkan sisi lain sejarah peristiwa yang terjadi pada masa itu.

Buku

Dalih Pembunuhan Massal - John Roosa

Apakah kamu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1965-1966? Buku ini menjadi salah satu rujukan yang pas untuk memenuhi rasa ingin tahumu. Dalih Pembunuhan Massal ditulis oleh salah satu profesor di University of British Columbia (UBC), Kanada dengan pandangan objektif dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. John Roosa juga menyuguhkan berbagai narasi sejarah yang dapat memunculkan diskusi mengenai siapa sebenarnya yang menjadi dalang pembantaian ratusan ribu rakyat Indonesia yang dituduh sebagai anggota PKI. Jika kamu mau membaca buku ini, kamu bisa mencarinya di Internet dengan kata kunci "Dalih Pembunuhan Massal". Nah, nanti kamu bisa unduh bukunya secara gratis dari situs Pamflet.or.id!

Sumber: Nobodycorp

Aktivitas

Yuk, coba ajak ngobrol orang tua, kakek, nenek, saudara atau sesepuh di lingkungan sekitarmu dan cari tahu apa yang terjadi di daerahmu pada tahun 1965-1967. Apakah ada cerita yang terkait Gerakan 30 September di tempatmu?

Silakan kalian tuliskan cerita kalian di halaman kosong ini

Pola
Kekerasan 2

Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga
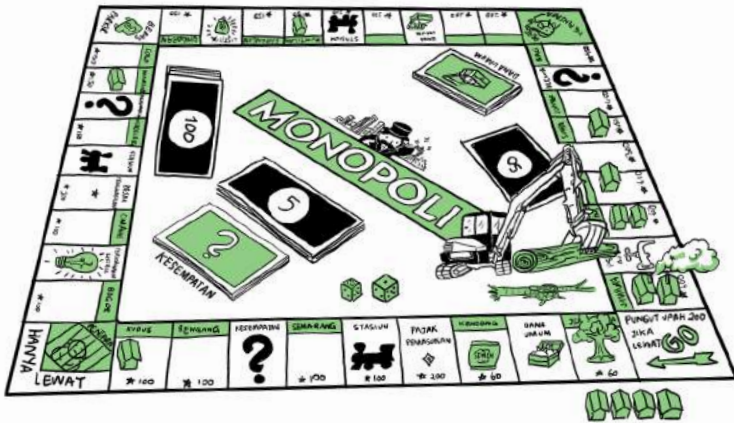
Tanah Indonesia katanya adalah tanah surga. Orang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya hanya dengan mengandalkan alam. Dikarenakan kebutuhan manusia akan pangan, sandang dan papan, sejak dulu sumber daya alam dimanfaatkan untuk pemenuhan ketiganya. Coba bayangkan kamu dan lima orang temanmu menjadi generasi pertama di sebuah pulau. Tentu yang akan kalian lakukan adalah menentukan siapa yang menduduki setiap sisi pulau dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya yang ada demi memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan masing-mwasing. Nah, pengaturan tersebut dapat diartikan sebagai **politik agraria.** Secara sederhana, pengertian politik agraria adalah *proses pengaturan hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yang meliputi tanah, air, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan tenaga serta unsur dalam ruang angkasa.*

Istilah baru!

Konsesi adalah izin untuk mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah. Biasanya konsesi diberikan pemerintah kepada perusahaan dalam bidang agraria (pertambangan, kehutanan, perikanan dan lainnya).

Politik agraria di Indonesia dijalankan oleh rezim politik yang berkuasa sejak zaman kolonial hingga abad ke-21 dengan karakteristik yang cenderung sama. Apa karakteristiknya? Pemerintah Indonesia yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari alam membuat sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa setiap kekayaan alam yang ada adalah milik negara. Karena ada undang-undang ini, maka kekuatan rakyat untuk menguasai lahan menjadi kecil sedangkan kekuasaan pemerintah sangatlah besar. Penguasaan lahan oleh pemerintah ini

kemudian dimanfaatkan untuk memberi izin pembangunan pertambangan, industri hutan, dan industri perkebunan oleh perusahaan-perusahaan besar. Pemberian izin ini, atau yang biasa disebut sebagai pemberian **konsesi**, dilakukan juga kepada badan-badan pengelola kawasan konservasi sejak pertengahan tahun 1980-an. Sejak masa kolonial Belanda, perkebunan menjadi sistem agraria yang berperan besar bagi Indonesia dalam ekonomi global. Baik tanah maupun pekerjaan rakyat Indonesia fokus pada perkebunan untuk mendukung perkembangan ekonomi. Mekanisme konsesi perkebunan besar kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru yang kemudian memperluasnya di sektor kehutanan, terutama di luar Jawa. Langkah yang ditempuh pemerintah pada masa itu untuk memperbesar produksi agraria adalah dengan penetapan kawasan hutan milik negara, kebijakan nasional tentang tata guna hutan, pemberian konsesi pembalakan kayu baik kepada perusahaan maupun pengelola kawasan konservasi, kemudian dilanjutkan dengan konsesi hutan tanaman industri. Selain pada bidang perkebunan dan kehutanan, konsesi juga diberikan oleh pemerintah dalam bidang pertambangan. Jika kamu hidup di masa Orde Baru dan hidup di wilayah hutan, maka kamu terancam digusur karena tanahmu akan dijadikan lahan produksi baik produksi perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan.

Konsesi perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri, dan restorasi ekosistem hutan diberikan oleh pemerintah di wilayah-wilayah yang memiliki sumber agraria dan kekayaan alam melimpah seperti pulau-pulau di luar Jawa, Madura, dan Bali; yaitu Sumatera, Kalimantan, serta pulau-pulau yang ada di Indonesia bagian timur. Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan hasil produksi hutan dan sumber agraria lainnya di luar Jawa, Madura, dan Bali sejak zaman kolonial hingga saat ini dapat dibagi menjadi beberapa periode transformasi kebijakan. Periode-periode tersebut adalah:

- **Periode pertama,** yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang berpusat pada pembangunan perkebunan di Sumatera Utara. Pada periode ini berlangsung pula penambangan kayu di Jawa dan Madura serta pembangunan hutan jati monokultur.

- **Periode kedua** (setelah tahun 1960-an) ditandai dengan kebangkitan pasar untuk kayu dan kemunculan teknologi untuk eksploitasi hutan besar-besaran. Hal ini kemudian memicu lahirnya kebijakan untuk mendukung pembalakan kayu berskala industri.

- **Periode ketiga** (tahun 1980-an) ditandai dengan upaya untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah tempat tinggal berskala besar **(transmigrasi).**

- **Periode keempat** (tahun 1990-an) ditandai dengan adanya pengubahan wilayah pembalakan kayu dan lahan pertanian di Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu. Dalam masa ini muncul juga wacana kebijakan perkembangan peningkatan pendapatan ekspor nonmigas dan diversifikasi kesempatan kerja yang mendukung produksi di sektor perkebunan kelapa sawit dan kayu.

- **Periode kelima** ditandai dengan naiknya harga minyak mentah dunia dan perkembangan isu perubahan iklim. Hal ini diawali dengan adanya kebijakan pemerintah melakukan produksi *biofuel* pada tahun 2006.

- **Periode keenam** dimulai tahun 2010 yang ditandai dengan berkembangnya wacana pengurangan emisi dari **deforestasi dan degradasi hutan,** pembayaran jasa lingkungan, dan penyerapan karbon oleh hutan. Pada periode ini, negara mengambil alih penguasaan atas tanah dari tangan rakyat dengan alasan penyelamatan lingkungan atau konservasi ***(green grabbing).***

Sejarah Transmigrasi di Indonesia

Tentu kamu pernah mendengar istilah transmigrasi dari pelajaran di Sekolah Dasar. Transmigrasi adalah *perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang.* Program transmigrasi menjadi strategi yang dilancarkan pemerintah pada periode ketiga politik agraria di Indonesia (tahun 1980-an) untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah pemukiman berskala besar. Pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa melalui program transmigrasi berhubungan erat dengan kebijakan ketahanan nasional melalui swasembada pangan dan penyediaan tenaga kerja untuk industri kehutanan. Pada 21 April 1969, Soeharto menekankan pentingnya transmigrasi dalam melaksanakan Repelita (Rencana Pembangunan

Lima Tahun). Soeharto menginstruksikan agar program transmigrasi dikaitkan dengan proyek-proyek pangan di luar Jawa dan proyek persawahan pasang surut. Soeharto juga menginstruksikan rehabilitasi di daerah-daerah objek transmigrasi agar daerah-daerah tersebut memiliki daya tarik bagi para transmigran spontan (transmigran yang ingin pindah atas kemauan sendiri). Instruksi ini diberikan kepada Menteri Transmigrasi dan Koperasi pada saat itu, M. Sarbini, yang berencana melakukan transmigrasi bagi korban letusan Gunung Merapi ke Lampung sebagai bentuk realisasi kerja sama antara Pemerintah Daerah Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Lampung.

Pada tahun 1984, pemerintah telah memindahkan 3,6 juta orang dari pulau Jawa, Bali, Madura, dan Lombok ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Antara tahun 1960-an dan 1980-an, transmigrasi fokus pada pengembangan **pertanian subsisten.** Pola ini diterapkan dengan cara membagikan lahan pertanian seluas dua hektare kepada setiap rumah tangga transmigran; sebagian sudah dibuka dan siap dimanfaatkan, sementara sebagian lagi masih berhutan. Selama 1990-an hingga program transmigrasi berakhir secara resmi pada tahun 1999, penekanan bergeser dari pertanian subsisten ke arah penyediaan tenaga buruh untuk hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.

Istilah baru!

Green grabbing adalah bentuk aksi pemerintah untuk mengambil alih tanah rakyat dengan alasan konservasi atau penyelamatan lingkungan. Bentuk green grabbing yang biasa dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam pengembangan *biofuel* dan inisiatif ekowisata. Dalam prosesnya, green grabbing menuntut masyarakat lokal yang tadinya tinggal dalam kawasan tersebut untuk pindah. Hal ini mengakibatkan mereka tidak memiliki tempat tinggal dan angka kemiskinan semakin meningkat. Contoh nyata *green grabbing* adalah di Guatemala di mana pemerintah setempat memberikan konsesi pada perusahaan ekowisata dan militer. Alasannya adalah untuk “menyelamatkan” alam peninggalan Suku Maya Guatemala dengan membangun daerah wisata bertema Suku Maya namun dengan mengusir penduduk lokal secara kasar. Contoh *green grabbing* di Indonesia akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Istilah baru!

Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah lahan hutan menjadi non-hutan. Kerusakan hutan ini bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja maupun alami. Perubahan iklim yang terjadi sekarang ini diperkirakan akibat dari deforestasi. Proses deforestasi sejalan dengan adanya kemerosotan mutu hutan di mana hutan tidak lagi dapat diandalkan menjadi habitat bagi berbagai satwa, wilayah serapan air, dan menjadi paru-paru dunia.

Istilah baru!

Pertanian subsisten atau **pertanian swasembada** adalah bentuk pertanian di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga. Ciri khas pertanian subsisten adalah memiliki berbagai variasi tanaman dan hewan ternak untuk dimakan, terkadang juga serat untuk pakaian dan bahan bangunan. Keputusan mengenai tanaman apa yang akan ditanam biasanya bergantung pada apa yang ingin keluarga tersebut makan pada tahun yang akan datang, juga mempertimbangkan harga pasar jika dirasakan terlalu mahal dan mereka memilih menanamnya sendiri.

Konsesi bagi Pertambangan

Meskipun Indonesia sudah menganut sistem pemerintahan demokrasi sejak zaman kemerdekaan, namun sayangnya berbeda presiden tentu beda juga pandangannya. Perbedaan pandangan ini ternyata berpengaruh pada segala aspek, termasuk keselamatan alam di Indonesia. Pada 24 September 1960, Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria atau yang biasa disebut sebagai UUPA 1960. Pada awalnya, undang-undang ini disebut sebagai usaha untuk meruntuhkan dominasi modal asing sebagai bagian utama politik agraria, sekaligus sebagai bentuk upaya pembangunan berbasis ideologi sosialisme di Indonesia.

Pada tahun 1967, orientasi politik agraria dan pembangunan diganti secara drastis oleh Soeharto, di mana ideologi **sosialisme** yang sebelumnya diusung diubah menjadi ideologi **kapitalisme** yang mendukung penanaman modal asing. ***Secara sederhana, Presiden Soekarno dengan UUPA-nya ingin melibatkan masyarakat adat untuk mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar tanah hidup masyarakat adat tersebut, namun hal tersebut diubah oleh Presiden Soeharto dengan menetapkan setiap sumber daya sebagai "milik negara" dan memberikan izin sumber daya negara tersebut untuk dapat diolah oleh perusahaan asing.*** Penggantian orientasi politik agraria ini merupakan keberlanjutan rezim yang berkuasa untuk membasmi komunis, keberhasilan kudeta atas Presiden Soekarno, dan kekuasaan yang besar atas rezim militer pada periode 1965-1966.

Ketika Soeharto menjadi Presiden, Amerika Serikat mulai berinvestasi di Indonesia dan menanamkan modalnya lewat pembangunan perusahaan pertambangan di tanah Papua. Sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mengizinkan kontrak pertambangan seluas 200.000 hektare di Papua kepada Freeport Sulphur. Wilayah pertambangan ini mencakup wilayah adat tempat hidup suku-suku asli Papua seperti Amungme dan Komoro. Akibatnya, suku asli Papua tersebut harus pindah tanpa ganti rugi dari pemerintah karena wilayah hidup suku asli ini diklaim sebagai tanah negara dan mereka dianggap ilegal hidup di tanah tersebut. Dengan momentum ini, kebijakan yang mengizinkan investasi modal asing di Indonesia telah diberlakukan di tanah Papua sejak tahun 1967, padahal saat itu Papua belum resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Simak lebih jauh!

Jika kamu penggemar film Hollywood dan peduli terhadap isu lingkungan, kamu bisa menonton film *Erin Brockovich* yang dirilis pada tahun 2000. Film ini menampilkan Julia Roberts yang memerankan Erin Brockovich, seorang ibu yang bekerja membantu sebuah firma hukum di Amerika yang melawan perusahaan listrik dan gas, Pacific Gas and Electric Company (PG&E). PG&E dinilai mencemari sumber air untuk masyarakat Hinkley, California dan menutupi fakta tersebut. Erin berusaha mengungkap fakta pencemaran lingkungan yang dilakukan PG&E dan menuntut perusahaan itu untuk memberikan ganti rugi yang sepadan.
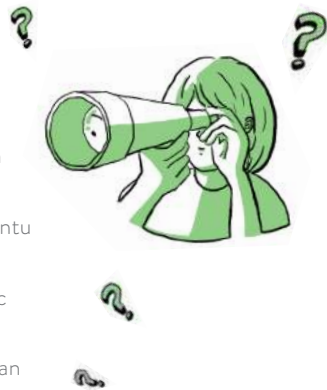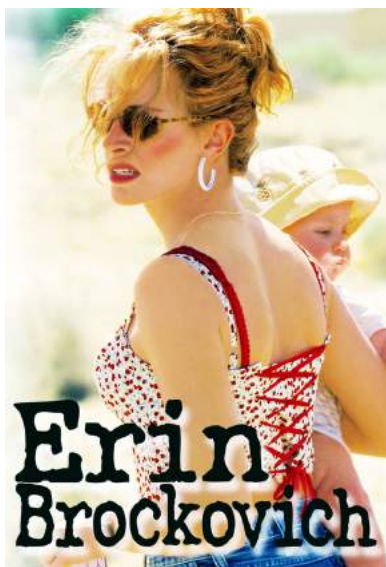
Sumber: IMDB

Istilah baru!

Sosialisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama baik dalam sistem sosial maupun dalam perekonomian. Contoh sederhananya, kamu dan teman-teman di kelas sedang melakukan praktik berdagang pisang goreng. Dalam satu kelas ada lima kelompok yang membuat produk tersebut. Jika menerapkan sistem sosialisme, maka bahan-bahan untuk membuat pisang goreng ditentukan secara bersama-sama, harga dan jumlah keuntungan ditentukan bersama. Dalam penjualannya, kamu dan teman-teman sekelasmu juga menentukan setiap kelompok akan berjualan di mana saja. Berbeda jika menerapkan sistem kapitalisme di mana setiap kelompok memiliki kebebasan untuk memilih bahan-bahan membuat pisang goreng, menetapkan harga secara mandiri, dan mengambil keuntungan sesuai keinginan. Setiap kelompok juga memiliki kebebasan untuk memasarkannya di mana pun mereka mau tanpa harus meminta izin atau kesepakatan dari teman sekelasmu.

Kisah Freeport dan Orang Papua

Dari cerita sebelumnya, kamu masih ingat kan kalau Undang-undang Agraria Presiden Soekarno dihapus oleh Soeharto? Presiden Soeharto sangat terbuka dengan investasi asing dan tahun 1967 merupakan awal mimpi buruk bagi rakyat Papua yang terus berlanjut hingga hari ini. Mimpi buruk ini diawali dengan pemberian konsesi kepada PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport Sulphur, oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pertambangan emas di tanah Papua. Konsesi yang diberikan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia memberikan izin eksploitasi tambang emas kepada perusahaan ini selama kurang lebih 39 tahun. Sayangnya, pemerintah Indonesia tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses pemberian konsesi ini.
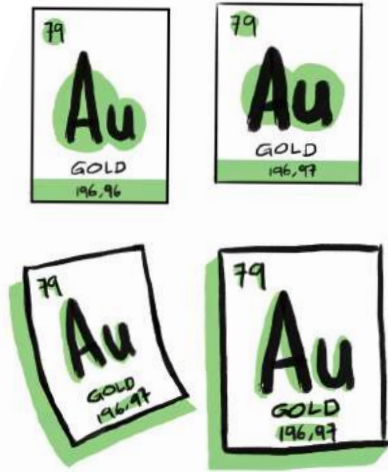
PT Freeport Indonesia menjadi perusahaan pertambangan tertua yang beroperasi di Indonesia, bahkan perusahaan tambang Amerika Serikat inilah yang mengarahkan kebijakan pertambangan di Indonesia. Kontrak PT Freeport Indonesia sudah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diberlakukan di Indonesia. Sayangnya, ada banyak catatan hitam berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tambang ini di mana kekerasan, intimidasi, penembakan, serta pembunuhan menjadi pengalaman keseharian yang dialami oleh rakyat Papua.

Pada tahun 1972, suku Amungme bereaksi keras atas tindakan PT Freeport Indonesia yang menjadikan kawasan keramat di Lembah Tsinga sebagai tempat kegiatan pertambangan. Pembongkaran kawasan keramat itu dibalas suku Amungme dengan pembongkaran *base camp* PT Freeport Indonesia di Tsinga. Pemerintah Indonesia kemudian bereaksi dengan mengirimkan pasukan TNI Angkatan Darat ke Tsinga untuk mengamankan aktivitas dan infrastruktur eksplorasi PT Freeport Indonesia dengan tanpa segan mengusir paksa penduduk lokal yang telah kehilangan hak atas tanah mereka. Diduga sekitar 50 orang terbunuh dalam insiden ini.

Salah satu aktivis bernama Mama Yosepha Alomang adalah perempuan adat dari suku Amungme yang dikenal begitu gigih melawan PT Freeport Indonesia sejak tahun 1974. Mama Yosepha bersama seluruh keluarganya bersembunyi di hutan untuk menghindari pengejaran tentara. Tentara mulai melakukan operasi militer di Papua setelah ratusan rakyat Amungme memotong pipa milik PT Freeport Indonesia karena perusahaan ini dianggap telah merampas tanah rakyat Amungme di Agimuga.

Pada tahun 1991, Mama Yosepha mengadakan aksi unjuk rasa selama tiga hari di bandar udara di Timika. Mama Yosepha memasang api di landasan udara sebagai tanda protes atas penolakan PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia yang mendukung operasi perusahaan tersebut. Mama Yosepha ditangkap tentara pada tahun 1994 karena dicurigai menolong tokoh OPM (Organisasi Papua Merdeka), Kelly Kwalik. Bersama dengan seorang perempuan Papua lain bernama Mama Yuliana, Mama Yosepha dimasukkan ke sebuah tempat penampungan kotoran manusia. Ia dipenjara di tempat itu selama seminggu. Sampai saat ini, konflik antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia terus bergejolak di wilayah lingkar tambang PT Freeport Indonesia dan korban terus berjatuhan.

Tahukah kamu?

PT Freeport Indonesia merupakan penanam modal asing pertama di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 1967 dan tercatat sebagai produsen emas terbesar di dunia.

Konsesi bagi Kehutanan

Apakah kamu pernah mengandaikan diri kamu lahir sebagai **Suku Anak Dalam?** Apakah kamu pernah berandai-andai bagaimana jika kamu lahir di kawasan hutan dan tidak di perkotaan? Coba kamu bayangkan menjadi seorang anak di kawasan hutan dan tiba-tiba kamu dan keluargamu diusir oleh tentara karena kamu dianggap menempati kawasan negara tanpa izin. Padahal, kamu lahir di sebuah kelompok yang sudah ada bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk. Aneh bukan?

Pengusiran masyarakat yang tinggal di hutan benar-benar dilakukan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Selain pertambangan, rezim Orde Baru juga berinisiatif untuk menguasai hutan di Indonesia dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari pemanfaatan hutan tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur kawasan hutan negara. Istilah kawasan hutan negara pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam undang-undang ini, penguasaan dan pengelolaan hutan oleh rakyat ditiadakan. Dalam memperkenalkan undang-undang ini, rezim yang berkuasa saat itu berhasil mempengaruhi mayoritas masyarakat Indonesia bahwa pengelolaan hutan oleh rakyat merupakan bagian dari paham komunisme. Hal ini melatarbelakangi pengamanan kawasan hutan oleh rimbawan (ahli kehutanan) dan pejabat pemerintah pada tahun 1970 hingga 1980-an yang melancarkan tuduhan bahwa masyarakat adat yang hidup secara komunal (berkelompok) di dalam hutan merupakan penganut dan pengembang paham komunis. Dengan demikian, masyarakat adat harus pindah dan keluar dari adat hidup komunal dalam hutan dan pindah ke petak rumah binaan pemerintah atau pengusaha hak pengusahaan hutan (HPI).

Pada pertengahan tahun 1980-an, pemerintah menetapkan hutan "milik negara" seluas lebih dari 125 juta hektare dari 147 juta hektare wilayah daratan di Indonesia. Hal ini berlandaskan pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang mengakibatkan berbagai wilayah yang sebenarnya adalah ruang hidup rakyat diklaim menjadi **kawasan hutan** oleh pemerintah.

Istilah baru!

Istilah **kawasan hutan** tidak berhubungan dengan kondisi tutupan hutan yang sebenarnya. Ketika pertama kali ditetapkan sebagai kawasan hutan, wilayah tersebut sudah tidak memiliki tutupan vegetasi sama sekali. Penetapan sebuah wilayah hidup rakyat menjadi kawasan hutan milik negara merupakan sebuah konsep yang ada sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Untuk mengatur hutan, pemerintah kolonial membuat aturan penguasaan eksklusif kawasan hutan dengan mengeluarkan undang-undang kehutanan kolonial dan jawatan kehutanan kolonial Belanda (Boschwezen). Undang-undang ini mengatur batasan antara kawasan hutan dan lahan perkebunan dengan pertanian rakyat. Semua tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan negara ditetapkan sebagai milik negara. Atas dasar tersebut, polisi hutan (jagawana) melakukan kriminalisasi atas akses rakyat berdasarkan adat.

Istilah baru!

Suku Anak Dalam atau yang biasa disebut sebagai **Suku Kubu** adalah kelompok masyarakat yang hidup di pedalaman Jambi dan Sumatera Selatan. Suku ini sudah mendiami wilayah hutan yang ada di dua provinsi tersebut sebelum negara Indonesia terbentuk (sebelum merdeka). Penyebutan kelompok masyarakat ini dilakukan oleh rezim Orde Baru yang menyamakan penyebutan berbagai suku seperti Orang Rimba, Suku Bathin IX, dan suku di pesisir timur Jambi sebagai Suku Anak Dalam sejak awal 1990. Orang Rimba di Jambi terbagi menjadi tiga kelompok: (1) mereka yang lahir dan tinggal di dalam hutan, (2) mereka yang lahir dan tinggal di kawasan perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri, dan (3) mereka yang sudah membaur dan tinggal di kawasan pedesaan bersama warga lainnya.

Simak lebih jauh!

Years of Living Dangerously adalah serial televisi yang ditayangkan oleh saluran Showtime pada tahun 2014 untuk mengangkat isu perubahan iklim. Episode keduanya membahas tentang deforestasi yang ada di Indonesia. Harrison Ford yang menjadi narator dalam episode tersebut sempat bertemu dengan menteri kehutanan pada masa itu, Zulkifli Hasan, dan mempertanyakan kebijakan Indonesia yang memberikan izin pada perusahaan kelapa sawit untuk membabat habis puluhan ribu hektare hutan. Setelah proses pembuatan film selesai, Harrison Ford dilarang masuk ke Indonesia dengan alasan pencemaran nama baik. *Years of Living Dangerously* juga menampilkan aktor kenamaan Hollywood lain seperti Matt Damon, Arnold Schwarzenegger, Michael C Hall, dan Jessica Alba, serta memenangkan penghargaan Primetime Emmy Award sebagai Outstanding Documentary.

Sumber: Youtube

Warisan konsep kolonial bahwa hutan adalah milik negara yang dikawal oleh rimbawan menyebabkan praktik kriminalisasi akses rakyat terhadap kawasan hutan terus menerus terjadi. Praktik kriminalisasi ini didukung dengan adanya tuduhan baru bahwa rakyat merupakan perambah hutan. Pengendalian serta pengelolaan wilayah tersebut harus berada di bawah kekuasaan negara. Pengendalian atas kawasan hutan oleh negara dilakukan secara nasional, termasuk membuat peta dengan batas-batas wilayah, alokasi hak untuk aktor-aktor negara, dan memonopoli spesies dalam hutan menjadi kayu jati dan cendana. Proses ini selalu diwarnai dengan kekerasan dan manipulasi.

Penguasa dan pengusaha yang menjadi elit dalam rezim Orde Baru memegang kontrol atas kawasan hutan negara dan meraup kekayaan dari hutan dengan menerapkan konsep pengelolaan hutan berskala industri. Melalui proses ini, rezim Orde Baru mengembangkan sistem lisensi resmi untuk memberikan izin penebangan kayu gelondongan (HPH) dan pengelolaan hutan tanaman industri (HPHTI) kepada perusahaan penebangan swasta dan milik pemerintah (BUMN) di seluruh pulau utama di luar Jawa. Dengan demikian, penggundulan hutan kini menjadi legal.

Pada tahun 1985, diketahui bahwa lebih dari 64 juta hektare dari kiswaran 125 juta hektare kawasan hutan negara menjadi kawasan konsesi HPH pembalakan kayu. Pada tahun yang sama, dikembangkan pula bentuk pengelolaan hutan tanaman industri untuk industri *plywood, pulp,* dan *paper*. Sejak tahun 1985, pemanfaatan hutan oleh negara terus berkembang termasuk mengembangkan konservasi dalam bentuk taman nasional. Konservasi ini menimbulkan konflik karena merampas wilayah pemukiman dan penghidupan masyarakat lokal. *Green grabbing* membuat masyarakat lokal tidak dapat memanfaatkan sumber daya hutan yang selama ini merupakan sumber penghidupan mereka.

Perekonomian Indonesia meningkat pada awal Orde Baru karena produksi pemanfaatan hutan ini, namun akibatnya sebagian besar hutan Indonesia rusak dan kekayaan hanya dinikmati oleh kalangan elit saja.

Tahukah kamu?

Warga Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah melakukan aksi jalan kaki sejauh 122 kilometer dari Pati ke Semarang untuk menolak izin pembangunan pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti (anak perusahaan PT Indocement).
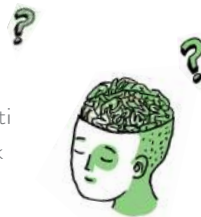
Simak lebih jauh!

Kisah warga Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah yang menolak pembangunan pabrik semen didokumentasikan oleh WatchDoc dalam film Samin vs Semen. Kamu bisa menontonnya di YouTube dengan kata kunci *Samin vs Semen.*

Badega: Tanah Petani yang Dirampas

Badega merupakan sebuah kampung di Desa Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Sejak tahun 1986, petani Badega kehilangan hak kepemilikan atas tanah yang telah lama mereka garap. Petani dan masyarakat Badega sudah mulai membangun pemukiman di daerah Badega sejak 1930-an. Mungkin kamu akan sedikit pusing membaca cerita ini karena kamu akan bertemu dengan beberapa istilah peraturan pemerintah. Oleh karena itu, jangan lupa untuk cek kotak "Istilah baru!" untuk tahu artinya.

Pada tahun 1984, para petani penggarap di Badega mengajukan permohonan untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah bekas perkebunan PT Sintrin seluas 400 hektare yang telah lama mereka garap kepada Bupati Garut. Para petani penggarap menggunakan dasar Keppres No. 32 tahun 1979 dan peraturan Mendagri No. 3 tahun 1979, serta UUPA No. 5 tahun 1960 yang menyebutkan bahwa para petani yang menggarap tanah-tanah terlantar mempunyai hak yang didahulukan untuk memperoleh hak milik. Namun ternyata tanah ini juga menarik perhatian satu perusahaan yang ingin membangun perusahaan teh di sana.

Pada saat yang sama, PT Surya Andaka Mustika (PT SAM), perusahaan teh asal Bandung, mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas areal tanah yang sama. Situasi ini membuat tanggapan atas permohonan petani tidak memiliki kekuatan yang besar. Tentu dengan kesempatan membangun bisnis yang besar, pada tahun 1985, Bupati Garut, Kolonel Taufik Hidayat, mengeluarkan surat yang isinya menolak permintaan para petani penggarap dan memberikan HGU atas tanah kepada PT SAM pada tahun 1986 melalui Surat Keputusan Mendagri No.SK.33/HGU/DA/86 yang ditandatangani oleh Dirjen Agraria. Berdasarkan surat keputusan ini, PT SAM meminta para petani penggarap untuk segera menyerahkan tanah garapan mereka dan memberikan janji bahwa mereka akan diterima sebagai buruh perkebunan PT SAM dengan upah Rp 600,00 per hari.

Baca kisahnya!

Sebuah Cerita Seorang Petani Badega

Bapak Suhdin merupakan anggota masyarakat Kampung Badega yang lahir pada tahun 1940. Ia merupakan salah satu petani dari 312 petani penggarap Gunung Badega yang melawan kesewenang-wenangan pemerintah yang menolak tuntutan hak garap tanah petani dan memberikan izin usaha pada PT Surya Andaka Mustika di tanah yang sama. Berikut ini adalah kesaksian beliau mengenai apa yang ia alami dalam perjuangan tersebut.

"Di Badega ada tanah yang ditelantarkan oleh pengusaha seluas 498 ha. Dari sekian banyak tanah, 84 tanah Badega digarap oleh masyarakat di antaranya oleh orang tua saya, dan sampai dewasa saya ikut menggarap tanah di sana. Tahun 1984 masyarakat mau mengajukan permohonan kepemilikan melalui Bupati Garut dan ditolak Bupati dengan alasan akan dijadikan perkebunan. Para petani penggarap menggunakan dasar Keppres No. 32/1979 dan Peraturan Mendagri No. 3/1979 serta UUPA No. 5/1960 yang menyebutkan bahwa rakyat yang menggarap tanah negara, seperti tanah bekas perkebunan, sejak 1960 dilindungi undang-undang dan tak bisa diganggu gugat. Sementara pada waktu yang hampir bersamaan PT SAM yang berkedudukan di Bandung mengajukan permohonan HGU atas areal tanah yang sama.

Pada tahun 1985 Bupati Garut, Kolonel Taufik Hidayat, mengeluarkan surat yang isinya, menolak permintaan para petani penggarap. Alasannya antara lain: (1) karena tanah-tanah bekas perkebunan harus tetap dipertahankan fungsinya sebagai perkebunan, (2) tanah perkebunan terlantar gunung Badega sedang dalam proses untuk diberikan HGU kepada PT SAM. Jalan keluar melalui mengirimi surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri tidak pernah dijawab, begitu pula pengajuan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati Garut tidak pernah mendapat respon yang semestinya. Karena permohonan masyarakat ditolak kami ke Agraria, kami tanya kenapa ditolak. Tanpa sepengetahuan petani penggarap, tahun 1986 HGU perkebunan terlantar dimiliki oleh PT SAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.33/HGU/ DA/86 yang ditandatangani Dirjen Agraria. Sejak itu PT SAM telah menganjurkan kepada para petani penggarap untuk segera menyerahkan tanah garapan mereka dan dijanjikan akan diterima menjadi buruh perkebunan PT SAM dengan upah Rp600,00/hari.

Muncul PT SAM mengobrak abrik tanah rakyat, dengan pergunakan polisi, hansip dan tentara. Saya diculik malam-malam sekitar jam 7 tanggal 30 september 1988. Yang datang polisi dengan menggunakan dua mobil Jeep, saya diambil, di antaranya ada dua orang kawan saya ikut dan dibawa ke kantor Kecamatan Kicaga. Saya dipukul sampai muka

babak belur, saya ditelanjangi, ini badan disundutin api rokok, setelah itu dipanggil ke Kapolres. Saya dijebloskan ke penjara.

Esok harinya saya disatukan dengan orang lain yang bertindak kriminal, pencuri, pembunuhan, pemalsuan. Ukuran kamar tahanan 1,5 x 2,5 meter diisi tahanan 27 orang. Yang paling mengerikan selama satu minggu kalau buang air besar ditampung dengan kantong plastik (kresek) kalau mau kencing pake botol Aqua. Paling ngerinya, saya mau salat, minta keluarga bawa ember untuk tampung air sholat, dan ember ditendang polisi. Jadi, saya tidak bisa salat. Enam puluh hari kemudian saya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (LP). Waktu saya masuk LP, ada mahasiswa yang mendampingi masyarakat karena saat itu masyarakat dikejar oleh hansip dan polisi.

Di pengadilan Garut, masyarakat kalah. Yang dipenjara 13 orang, saya divonis 16 bulan, tapi saya naik banding. Surat keputusan pengadilan tinggi menyebutkan bahwa dikarenakan masyarakat terlebih dahulu ada di tanah Badega dan sudah mengajukan permohonan kepemilikan, maka kepemilikan tanah dikembalikan ke masa sebelumnya, kecuali ada yang mengajukan tanah secara sukarela ke PT SAM. Saya dibebaskan oleh pengadilan tinggi. Tujuan UU Agraria 1960 adalah rakyat yang menggarap tanah rakyat bekas perkebunan tidak bisa digugat dan dilindungi UU Agraria, mau apa lagi? Status masih tanah negara, sekarang tinggal 30 hal yang dikuasai perusahaan dan bukan PT SAM tapi PT Cakra. Tahun 1986 PT SAM diberi HGU dan sekarang HGU sudah habis. Apabila PT SAM berhasil apakah bisa diambil alih karena keputusan Gubernur Jawa Barat No. 104 menyebut dilarang *mengover* alih merubah bentuk."

Istilah baru!

Komodifikasi adalah proses mengubah sesuatu yang tidak memiliki nilai jual menjadi memiliki nilai jual sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, komodifikasi alam adalah proses mengubah wilayah yang merupakan bagian dari alam menjadi bernilai jual sesuai dengan kebutuhan pasar dengan mengubahnya menjadi sebuah industri.

Negara yang Mengambil Alih Tanah Rakyat

Kasus-kasus yang dijabarkan sebelumnya memperlihatkan bahwa **komodifikasi alam** di Indonesia berlangsung melalui proses pengambilalihan tanah dan wilayah komunitas oleh pemerintah untuk ditetapkan menjadi tanah atau hutan negara. Tanah yang sudah ditetapkan milik negara ini selanjutnya diberikan pada perusahaan-perusahaan besar (pertambangan, kehutanan, dan perkebunan) atau lembaga pemerintah pemegang kawasan konservasi melalui pemberian izin resmi pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, perampasan tanah menjadi lebih masif terkait dengan kesewenangan pemerintah daerah karena adanya kebijakan desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan desentralisasi ini memberikan hak baru kepada pemerintah daerah, di antaranya hak untuk memberikan izin lokasi perkebunan dan izin usaha pertambangan perusahaan skala kecil.
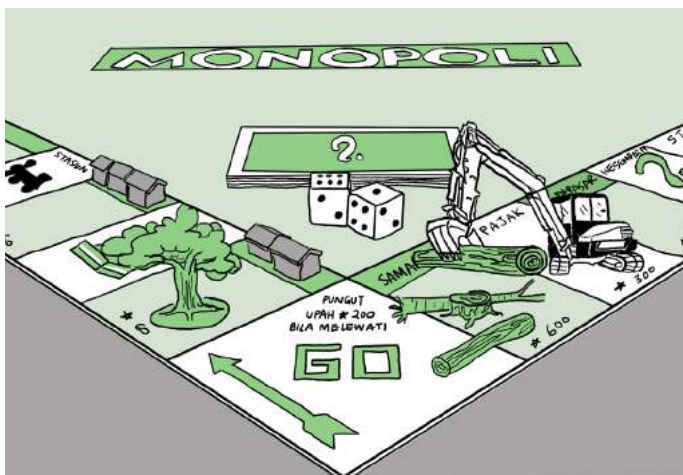
Cerita-cerita yang ada sebenarnya mudah digambarkan dengan permainan monopoli. Anggap saja kamu mendapat peran menjadi bank, dengan demikian kamu punya kontrol terhadap persebaran uang dan menyetujui jual beli tanah. Nah, bank dalam monopoli dapat disamakan dengan pemerintah. Teman-teman yang kamu ajak menjadi pemain bisa disamakan dengan para investor yang ingin membeli lahan dan membangun usaha di situ. Bedanya, investor ini berasal dari berbagai macam negara. Jika di permainan monopoli setiap pemain bisa membeli negara dan membangun rumah atau hotel, di kehidupan nyata para investor ini ingin membeli lahan negara dan membangun bisnis di atasnya. Tentu ada persaingan di antara teman-temanmu dalam membeli lahan di permainan monopoli dan setiap pemain yang "mengunjungi" lahan pemain lain akan kena pajak. Ini sama dengan konsumen di sebuah negara yang membayar sejumlah

uang untuk merasakan hasil produksi sebuah industri. Di permainan monopoli tentu sangat mudah membeli lahan dan membangun bisnis karena tidak ada masyarakat yang tinggal di setiap lahan tersebut. Penguasaan lahan dalam permainan monopoli tentu tidak diwarnai dengan peristiwa berdarah atau penggusuran, tapi faktanya, dalam pembangunan sebuah usaha pertambangan atau usaha pemakaian hutan lainnya, peristiwa berdarah itu terjadi. Jika sudah seperti ini, apakah kamu dapat membedakan pemerintah dengan seorang kapitalis "bank" monopoli?

Akibat komodifikasi alam yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat (khususnya di pedesaan) menjadi korban karena tanah dan wilayah hidupnya masuk dalam daerah hutan atau tanah negara. Mereka kehilangan hak atas tanah yang sudah lama mereka miliki dan kelola sehingga mereka terpaksa menjadi buruh harian lepas di perusahaan-perusahaan yang merampas tanah-tanah mereka. Tidak jarang sebuah keluarga harus kehilangan anggota keluarganya karena dipenjara atau meninggal dalam memperjuangkan tanah mereka. Rakyat kehilangan hak adat atas hutan dan berbagai sistem pengelolaan sumber daya yang sudah mereka pelihara secara tradisional selama ratusan tahun. Kebijakan pembentukan taman nasional di kawasan hutan dengan dalih konservasi alam telah merampas hak masyarakat adat atas tanah mereka dan merebut hak atas kekayaan alam yang sebelumnya bisa mereka akses dengan mudah. Kebijakan negara itu membuat keuntungan dalam pemanfaatan hutan sebagian besar mengalir masuk kepada suatu kelompok tertentu, sementara kerugian ditanggung oleh masyarakat setempat dan masyarakat adat. Hampir di semua kasus, kerugian yang ditanggung oleh rakyat tidak pernah diganti oleh pemerintah.

Tahukah kamu?

Reklamasi Teluk Benoa di Bali merupakan satu contoh kesewenangan pemerintah (di bawah kuasa Susilo Bambang Yudhoyono) mengambil alih kekayaan sumber daya alam untuk dijadikan wilayah pusat bisnis wisata. Reklamasi ini sudah banyak mendapat penolakan dari warga Bali sendiri, termasuk Gubernur Nusa Tenggara Barat, Komisi IV DPR RI, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Reklamasi 700 hektare ini diperkirakan akan menenggelamkan Simpang Dewa Ruci, Bandara Ngurah Rai, dan wilayah sekitarnya.

Apakah menurutmu hutan di Indonesia harus dikuasai dan diberdayakan oleh negara?

TIDAK

YA

Apakah menurutmu masyarakat adat boleh menggunakan hutan sebagai sumber penghidupan?

Apakah menurutmu negara boleh memberikan izin untuk membangun perkebunan sawit di atas hutan?

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Apakah menurutmu suku yang hidup di hutan merupakan warga ilegal?

Apakah menurutmu suku di dalam hutan seharusnya tinggal di pemukiman warga biasa?

Apakah menurutmu petani lokal lebih baik menerima tawaran bekerja di perusahaan dibanding memperjuangkan

TIDAK

YA

TIDAK

TIDAK

YA

YA

Apakah menurutmu Teluk Benoa di Bali harus direklamasi?

Apakah menurutmu PT. Freeport seharusnya ditutup saja?

Apakah menurutmu Harrison Ford harus dilarang masuk ke Indonesia selamanya?

TIDAK

YA

YA

TIDAK

TIDAK

YA

Kamu Pahlawan Lingkungan!

Kamu masih ragu-ragu menyelamatkan lingkungan. Yuk, baca bab ini lebih teliti sekali lagi!

Semoga kamu tidak menjadi Menteri Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup.

Jangan diam, lawan!

Jika dalam sebuah ujian kamu dapat menjawab dengan baik dan tiba-tiba kamu mendapat hasil yang tidak memuaskan padahal jawaban kamu benar, tentu kamu akan mendatangi gurumu bukan? Secara sederhana, kamu sedang mengalami ketidakadilan dan kamu sedang menuntut gurumu untuk bertindak adil kepadamu. *Nah*, ketidakadilan yang merugikan rakyat atas penguasaan lahan oleh negara direspon dengan adanya perlawanan melawan pemerintah dari waktu ke waktu. Pada masa-masa awal (1965-1979), perlawanan rakyat sulit dikenali karena langsung dibasmi oleh aparat keamanan. Setiap bentuk perlawanan rakyat terhadap kesewenangan pemerintah dianggap sebagai gerakan komunisme. Perlawanan rakyat mulai terlihat jelas dan tersebar di berbagai wilayah pada akhir tahun 1980-an (dimulai dari kasus petani Jenggawah, kasus Sugapa, dan juga petani Badega). Pada awalnya, mereka berjuang agar diakui sebagai warga negara yang memiliki hak atas tanah dan wilayah hidupnya, kemudian perjuangan ini berkembang untuk mendapatkan pengakuan pemerintah terhadap akses masyarakat pada sumber daya alam yang sudah mereka kelola sejak lama.

Jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998 memungkinkan rakyat secara serentak melakukan perlawanan dengan cara yang baru, yaitu dengan mengambil kembali tanah-tanah yang dirampas pada periode sebelumnya. Kasus-kasus perampasan tanah selalu menjadi jenis kasus pengaduan terbanyak yang ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan TAP MPR IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Para aktivis pun melancarkan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Namun sayangnya semua itu kandas pada masa pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih untuk tidak mengedepankan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM.

Tahukah kamu?

Berikut daftar Koruptor Sedunia berdasarkan penelitian Transparency International tahun 2004.

1. Soeharto: $15-35 miliar (Indonesia, 1967-1998).
2. Ferdinand Marcos: $5-10 miliar (Filipina, 1972-1986).
3. Mabotu Sese Seko: $5 miliar (Zaire, 1965-1997).
4. Sani Abacha: $2-5 miliar (Nigeria, 1993-1998).

5. Sloboddan Milosevic: $1 miliar (Yugoslavia, 1989-2000).
6. JC Duvalier: $300-800 juta (Haiti, 1971-1986).
7. Alberto Fujimori: $600 juta (Peru, 1990-2000).
8. Pavlo Lazarenko: $114-200 juta (Ukraina, 1996-1997).
9. Arnoldo Aleman: $100 juta (Nikaragua, 1997-2002).
10. Joseph Estrada: $78-80 juta (Filipina, 1998-2001).

Tahukah kamu?

Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan dengan membangun 17 pulau baru dengan total luas pulau sebesar 5100 ha.

Peta Reklamasi Teluk Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jauh hari telah menerbitkan izin untuk pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta kepada sejumlah perusahaan. Meski mendapat pertentangan, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan tetap melanjutkan proyek kontroversi seluas total lebih dari 4 ribu hektare.

PT Kapuk Naga Indah
PT Jakarta Propertindo
PT Muara Wisesa Samudera
PT Taman Harapan Indah
PT Jaladri Kartika Ekapakci
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
PT Manggala Krida Yudha
PT Pelindo II
Pemprov DKI Jakarta

79 Ha, 380 Ha, 279 Ha, 312 Ha, 284 Ha, 190 Ha, 161 Ha, 63 Ha, 405 Ha, 316 Ha, 481 Ha, 32 Ha, 587 Ha, 411 Ha, 344 Ha, 483 Ha, 369 Ha

Status: Izin Prinsip | Izin Pelaksanaan | Proses Reklamasi

Infografis: Laudy Gracivia | Naskah: Aghnia Adzkia & R. Dewi Kandi | Sumber: Pemprov DKI per Januari 2016

CNN Indonesia

Sumber: CNN Indonesia

Aktivitas

Uji kadar kepedulianmu terhadap lingkungan!

Mendatar

1. Perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Papua

4. Sumber daya alam yang meliputi tanah, air, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan tenaga serta unsur dalam ruang angkasa

6. Kampung di Garut, konflik dengan perusahaan teh

10. Pengambilan tanah rakyat dengan dalih penyelamatan lingkungan

11. Koruptor nomor 1 tahun 2004 berdasarkan penelitian Transparency Indonesia

13 Pertanian Swasembada

14. Izin yang diberikan Pemerintah Pada Perusahaan pertambangan, kehutanan, atau perkebunan

Menurun

2. Perpindahan penduduk dari suatu daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk jarang

3. Polisi hutan

5. Proses mengubah barang tak bernilai menjadi bernilai jual di pasar

7. Suku asal Mama Yosepha

8. Undang-undang Pokok Agraria

9. Penurunan mutu

12. Penghilangan hutan dengan cara penebangan kayu

14. Periode pertama politik agraria

Jawaban

Mendatar: 1. Freeport, 4. Agraria, 6. Badega, 10. Greengrabbing, 11.Soeharto, 13. Subsisten, 14. Konsesi
Menurun: 2. Transmigrasi, 3. Jagawana, 5. Komodifikasi, 7. Amungme, 8. Uupa, 9. Degradasi

UJI INGATAN KAMU!
SEMEN
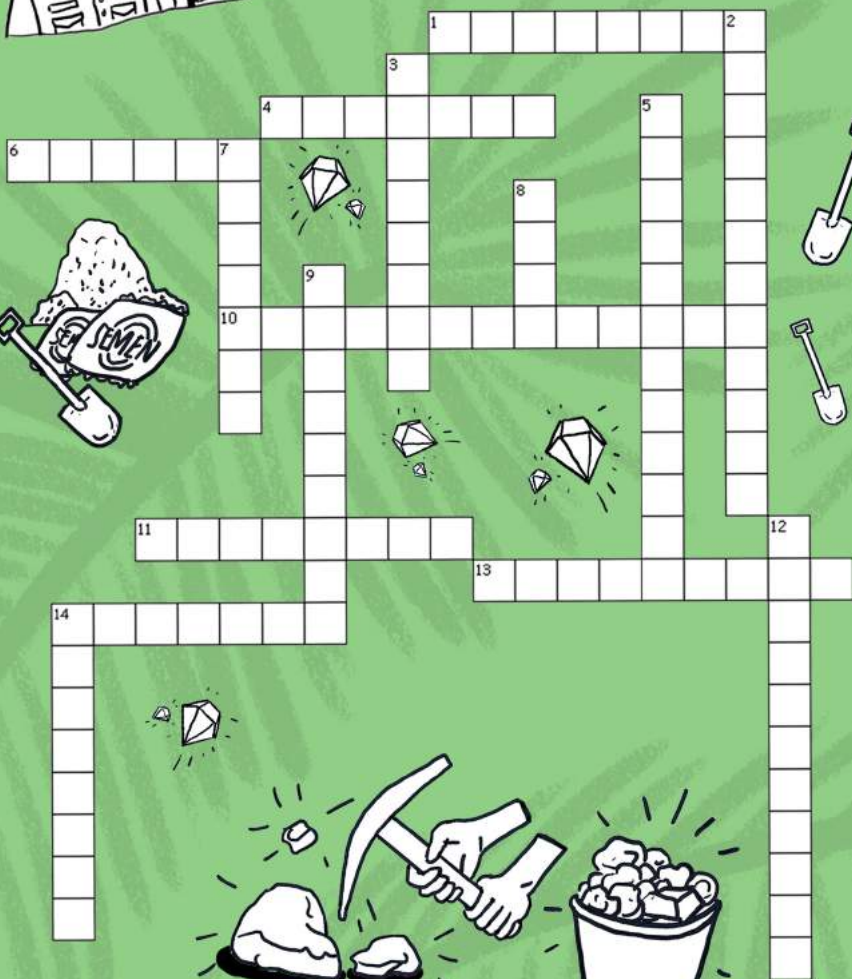
Pola

Kekerasan 3

Beda Itu (Tidak) Biasa

“Beda itu Tidak Biasa”

Apakah kamu pernah bertanya-tanya kenapa kamu tidak boleh berambut gondrong di sekolah? Atau kenapa orang tua dan mungkin pengajarmu juga mewanti-wantimu untuk fokus belajar saja saat kuliah dan tidak terlibat kegiatan yang “macam-macam”?

Anak muda memang harus menghadapi banyak aturan tertulis dan tak tertulis dalam kesehariannya–beberapa ada yang masuk akal, namun banyak juga yang tidak. Bagaimana kalau kita memulai dengan membahas salah satu aturan yang paling sering kita dengar, sejak SD hingga tamat SMA: larangan berambut gondrong di sekolah?

Percaya atau tidak, untuk mencari tahu kenapa anak muda tidak boleh berambut gondrong, kita harus kilas balik. Lebih tepatnya, ke era Presiden Soekarno.

Geng-Gengan yang Berujung Petaka

Bayangkan kamu sedang berada di pertengahan tahun 1960-an, Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, masih menjabat sebagai presiden. Jalanan Ibukota belum semacet sekarang, timnas sepakbola kita masih agak jagoan, belum ada stasiun televisi lain selain TVRI, dan Koes Plus masih merajai tangga lagu nasional.

Sepanjang dekade tersebut, dunia terpecah belah karena Perang Dingin. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersatu dalam pihak Sekutu untuk mengalahkan pemerintah Nazi Jerman dan pihak Poros. Setelah perang yang panjang dan melelahkan itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua negara paling kuat dan paling berkuasa di dunia. Masalahnya, mereka tidak suka satu sama lain. Amerika Serikat bersistem kapitalisme, sementara Uni Soviet memegang teguh paham komunisme. Walhasil, selama berdekade-dekade setelah Perang Dunia II, hubungan mereka tidak baik.

Tingkah laku mereka sepanjang Perang Dingin mirip seperti dua teman sekelas yang sama-sama tenar, tapi iri satu sama lain. Supaya diakui ketenarannya, mereka membuat geng, dan anggota geng inilah yang akhirnya justru ribut

dengan satu sama lain. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet sibuk mencari teman di dunia internasional, dan dampaknya mengerikan. Jika pemilihan umum di negara tertentu dimenangkan oleh partai yang cenderung pro-Uni Soviet, pemerintah Amerika Serikat bakal membiayai pemberontakan di negara tersebut supaya partai yang pro-Uni Soviet digulingkan oleh pihak-pihak yang pro-Amerika. Hal inilah yang terjadi di Cile, misalnya, di mana Presiden Salvador Allende yang kekirian digulingkan oleh Augusto Pinochet yang kejam, namun pro-Amerika. Insiden sama terjadi di Iran, Guatemala, hingga Republik Demokratik Kongo. Sebaliknya, kelompok politik kiri (pro-Uni Soviet) juga mengambil alih kekuasaan di Kuba, Vietnam, dan Cekoslovakia.

Di tengah situasi internasional yang panas dan penuh aksi *geng-gengan* ini, Indonesia memutuskan untuk netral. Bersama pemimpin dari negara Yugoslavia, Ghana, India, dan Mesir, Indonesia mencetuskan Gerakan Non-Blok (GNB) yang diresmikan pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Intinya, bersama negara-negara lain yang turut serta di GNB, Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak akan memihak Blok Amerika Serikat maupun Blok Uni Soviet, dan tidak mau dicampuri urusannya oleh keduanya.

Namun, Indonesia terlalu menarik untuk dibiarkan begitu saja. Negara kita baru merdeka, punya populasi yang banyak, dan mengandung banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Baik negara-negara sekutu Amerika Serikat maupun sekutu Uni Soviet bergantian datang ke Indonesia, membujuk Presiden Soekarno untuk ikut pihak mereka. Meskipun begitu, Soekarno masih berusaha untuk berada di tengah-tengah dan menjadi teman bagi semua pihak. Di dalam negeri sekali pun, dunia politik Indonesia ramai membicarakan pergolakan ini. Dengan ideologi Nasionalis, Agama, Komunis (NASAKOM) yang ia perkenalkan, Soekarno ingin ketiga pihak yang pengaruhnya paling kuat dalam politik Indonesia–kelompok nasionalis, kelompok agama terutama Islam, dan elemen Komunis/Kiri–bersatu mengembangkan Indonesia.

Masalahnya, upaya Soekarno menyenangkan semua pihak tidak berhasil. Di dalam negeri, ketiga pihak yang diakomodir dalam NASAKOM malah bertengkar satu sama lain. Sementara di luar negeri, Indonesia marah-marah setelah Malaysia diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena Soekarno menentang pendirian negara Malaysia. Walhasil, Soekarno mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB dan menolak dana bantuan asing dari Amerika Serikat–yang dibutuhkan untuk menopang ekonomi Indonesia yang rapuh. Kesal dengan Blok Amerika Serikat, Soekarno mulai dekat dengan negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara (sekutu utama Uni Soviet di daerah Asia).

Amerika Serikat jelas khawatir melihat Indonesia mulai dekat dengan pihak Soviet. Sementara di dalam negeri, pihak-pihak seperti kelompok militer, agama, dan nasionalis takut kekuasaannya terancam oleh pihak Komunis dan Kiri yang semakin berpengaruh di Indonesia. Mereka pun kelabakan melihat ekonomi Indonesia yang kian terpuruk sejak Soekarno menolak dana bantuan Amerika Serikat dan menarik keanggotaan Indonesia dari PBB.

Istilah baru!

Inflasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa. Biasanya, inflasi diukur dengan jumlah persen.

Misalnya, di tahun ini kamu perlu mengeluarkan uang sebanyak 10,000 rupiah untuk membeli seratus gram daging anoa. Namun, terjadi inflasi sebesar 10 persen untuk harga daging anoa di negaramu. Artinya, harga untuk membeli 100 gram daging anoa naik 10 persen - dari yang sebelumnya 10 ribu rupiah per 100 gram, jadi 11 ribu rupiah per 100 gram.

Kebanyakan negara maju menjaga agar tingkat inflasi tidak melebihi 2-3 persen. Namun, kadang-kadang terjadi apa yang disebut ***hyperinflation***, atau inflasi yang terjadi dengan sangat cepat. Ketika hyperinflation terjadi, sistem keuangan negara bisa kacau balau. Di negara Jerman pada tahun 1923, misalnya, terjadi tingkat inflasi sebanyak 2,500 persen dalam waktu sebulan. Pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno, *hyperinflation* seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab ekonomi Indonesia terpuruk.

Ekonomi Indonesia mulai hancur karena hutang, inflasi, dan ekspor menurun drastis. Pendapatan devisa dari sektor perkebunan, misalnya, jatuh dari angka 442 juta dollar Amerika Serikat pada tahun 1958 menjadi 330 juta dollar. Pendapatan per kapita Indonesia menurun jauh, terutama di tahun 1962-1963. Pada tahun 1965, inflasi berada di angka 650%. Bayangkan, harga barang sehari-hari di Indonesia meningkat lebih dari enam kali lipat!

Faktor-faktor inilah yang di antaranya mendorong terjadinya Peristiwa 30 September 1965 di mana Soekarno digulingkan dari kekuasaan. Pihak Komunis

dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang dari revolusi gagal tersebut, padahal ada indikasi kuat bahwa peristiwa tersebut sebenarnya diorganisir oleh pihak militer dengan dukungan Amerika Serikat. Semua pihak punya versi sejarahnya masing-masing.

Yang jelas, satu orang tampil sebagai pemenang, seorang jenderal Angkatan Darat bernama Soeharto yang sekaligus menjadi presiden kedua Indonesia. Pada 11 Maret 1966, Soekarno dilarikan ke Bogor setelah sidang kabinet di Jakarta dikepung oleh pasukan liar yang belakangan diketahui adalah pasukan dari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Di sana, Soekarno didatangi oleh tiga orang Jenderal dari Angkatan Darat. Tidak jelas apa yang terjadi dalam pertemuan mereka, namun Sukardjo Wilardjito - seorang Letnan Satu yang malam itu mengawal Soekarno - menyebut bahwa Soekarno ditodong pistol oleh para jenderal. Ketiga jenderal tersebut lantas pulang dari Bogor membawa surat "sakti" yang praktis menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, Surat Perintah Sebelas Maret, atau dikenal dengan sebutan **Supersemar.**

Soeharto dan pihak Angkatan Darat segera memburu pihak-pihak PKI yang dituduh mendalangi peristiwa 30 September 1965. Namun, sebenarnya tidak hanya PKI yang terkena getahnya. Siapa pun yang dianggap bakal mengancam kekuasaan Soeharto dan militer nantinya–mulai dari aktivis, serikat buruh, kelompok agama, pendukung setia Soekarno, bahkan rekan-rekan politik sekali pun–dibantai habis-habisan. Pada akhir era penuh tragedi ini, ratusan ribu bahkan jutaan orang yang dituduh PKI dibasmi (lebih jauh soal ini dijelaskan di bagian "Pembasmian"). Pada tahun 1968, Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden dan era Orde Baru dimulai.

Ekonomi sebagai Panglima

Tidak seperti Soekarno yang enggan memihak blok mana pun di Perang Dingin dan menolak investasi serta bantuan asing di Indonesia, Soeharto dengan senang hati berkawan dengan Blok Amerika Serikat. Orde Baru segera menjadi salah satu sekutu terpenting Blok Amerika Serikat di daerah Asia-Pasifik.

Dua hal yang disadari betul oleh Soeharto adalah ekonomi Indonesia terpuruk dan kehidupan politik di Indonesia kacau-balau. Maka, tim ekonomi Soeharto mencanangkan program ambisius Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan pinjaman dana dari luar negeri. Mereka juga menetapkan Undang-Undang no. 1 tentang Penanaman Modal Asing yang membuka Indonesia pada investasi dari luar negeri. Salah satu perusahaan asing yang memanfaatkan aturan baru ini adalah PT. Freeport yang sigap menguasai sektor pertambangan di Papua hingga hari ini.

Menurut Soeharto, rencana pertumbuhan ekonomi yang ambisius tidak akan terwujud jika harus berurusan dengan perlawanan dari rakyat atau kelompok yang berseberangan. Maka "stabilitas"–begitu istilah yang mereka gunakan–penting diciptakan sebagai syarat tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pada era Soekarno, berbagai partai politik yang berbeda pemikiran dengan pemerintah diberi kesempatan untuk bersuara dan berebut pengaruh. Soeharto tak ingin mengulangi kesalahan tersebut. Baginya, Indonesia harus satu suara. Untuk mencapai hal tersebut, ia mulai membungkam dan menghabisi pihak-pihak yang berbeda pikiran dengan Orde Baru.

Salah satu upaya utama Orde Baru dalam mencapai stabilitas ini adalah dengan memberlakukan Dwifungsi ABRI. Dengan Dwifungsi, pihak militer tidak hanya menjaga pertahanan dan keamanan negara. Militer pada masa itu juga terlibat dan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Perwira militer memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan–mulai dari menteri, walikota, duta besar, hingga ketua RT, dan pimpinan perusahaan milik negara.

Kekuasaan militer dalam kehidupan sehari-hari di antaranya terwujud dengan dibentuknya Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Tujuan mereka adalah "menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara." Pada dasarnya, mereka mengawasi masyarakat sampai ke tingkat paling pribadi sekali pun supaya semua pihak yang disinyalir bisa melawan pemerintah bisa ditumpas dengan segera.

Kopkamtib punya wewenang untuk bertindak nyaris seenaknya. Mereka bisa menetapkan siapa saja sebagai kriminal atau pelaku subversi (ancaman terhadap negara), menangkap orang tanpa surat peringatan, menahan seseorang dalam jangka waktu tak terbatas tanpa diadili, menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan, hingga memanipulasi prosedur pengadilan dan sidang. Tidak heran jika Hoegeng Imam Santoso–mantan Kapolri yang dipecat Soeharto karena nekat menyelidiki kasus korupsi–berkata, "Kopkamtib memiliki kekuasaan untuk memerintahkan apa yang seharusnya bukan tugas mereka. Mereka bisa menangkap rakyat secara serampangan."

Pemerintah juga mengerahkan dinas khusus bernama Operasi Khusus (Opsus) pimpinan Ali Murtopo untuk melakukan aksi-aksi intelijen hitam. Komando Intelijen Negara (KIN), yang berganti nama menjadi BAKIN di tahun 1967, juga mengemban tugas melawan tindakan subversi, perang psikologis, melawan propaganda, hingga menganalisis informasi intelijen.

Serikat buruh yang biasanya kritis kepada pemerintah mulai diancam dan dikendalikan. Informasi dan media massa diatur, buku dan kesenian dibatasi penyebarannya. Soeharto juga menyatakan bahwa pemerintahnya setia pada ideologi Pancasila dan melarang penyebaran ideologi apa pun yang dianggap bertentangan dengan negara. Siapa pun yang melawan negara dengan mudahnya dituduh Kiri, Komunis, atau PKI, lalu segera dihabisi.

Tahukah kamu?

Setelah Peristiwa 30 September 1965, 46 dari 163 surat kabar ditutup dengan paksa. Pemerintah pun segera mengenalkan Undang-Undang no. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang membatasi kebebasan pers. Dengan aturan ini, media mana pun yang dianggap “bertentangan dengan Pancasila” dilarang terbit.

Beberapa media besar seperti *TEMPO*, *Detik*, dan majalah *Jakarta-Jakarta* pernah merasakan ancaman aparat ini karena nekat memberitakan kejadian yang ingin ditutup-tutupi pemerintah. Lebih parah lagi, penguasa tidak segan-segan menangkap—bahkan membunuh—wartawan yang dianggap kelewatan. Pada 13 Agustus 1996, seorang wartawan bernama Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) dari Harian *Bernas* dianiaya hingga meninggal dunia. Dugaan kuat ia dibunuh karena menulis berita kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bantul.

Meski banyak peraturan dari era Orde Baru sudah dihapus, kebebasan pers di Indonesia masih mengkhawatirkan. Laporan dari *Reporters Without Borders* (RSF) menyatakan bahwa masih banyak insiden wartawan–termasuk wartawan asing–yang ditahan dan dihalang-halangi meliput di Papua Barat. Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia yang dirilis RSF di tahun 2016, Indonesia duduk di peringkat 130 dari 180 negara.

Dengan trisula maut Kopkamtib, Opsus, dan BAKIN, pemerintah mampu melancarkan program-program pembangunannya. Bagaimana hasilnya?
Sejak Dwifungsi diterapkan sebagai ideologi resmi ABRI, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang mengesankan. Angka inflasi, yang tadinya meroket sampai 650% di akhir pemerintah Soekarno, turun jadi sekitar 10%. Pendapatan per kapita

pun melonjak menjadi 560 Dollar Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 15 tahun. Indonesia naik kelas dari kelompok negara miskin ke negara berpenghasilan menengah. Pada tahun 1970-an, harga minyak bumi di dunia naik secara tajam. Sebagai negara penghasil minyak, Indonesia meraup untung besar-besaran dari kejadian ini.

Masyarakat Indonesia yang lelah dengan kemiskinan di akhir era Soekarno awalnya menyambut baik kemajuan yang dibawa Orde Baru. Namun, lama-lama mereka mulai merasa ada yang tidak benar. Pembangunan memang lancar, namun ekonomi Indonesia sangat bergantung pada investasi asing dan pinjaman dari luar negeri. Beberapa kalangan juga mulai mencurigai bahwa terjadi banyak sekali korupsi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 1975, kasus korupsi di Pertamina membuat guncang rakyat Indonesia. Tindakan tersebut menuai respon buruk dari banyak lapisan masyarakat, yang sebenarnya masih terpuruk secara ekonomi.

Meski ekonomi Indonesia saat itu maju pesat, kemajuan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang. Pihak-pihak yang punya kedekatan dengan pemerintah dan kaum menengah perkotaan meraup untung besar dari Pembangunan. Namun, rakyat miskin yang digusur paksa dari rumahnya, diusir tentara dengan menggunakan senjata karena menolak intervensi pemerintah, dan kelompok yang dianggap "berbahaya" bagi negara–seperti para aktivis, seniman, hingga intelektual agama–justru semakin sengsara. Singkatnya, Orde Baru tidak membagi kuenya secara merata.

Bapak vs. Anak

Kita sudah tahu siapa saja yang dianggap teman oleh Orde Baru: para pemodal dari luar negeri, rekan-rekan politik, dan pihak militer yang satu pikiran dengan mereka. Jelas juga siapa yang dianggap musuh: rakyat yang menuntut, aktivis yang kebanyakan bicara, seniman yang kritis, hingga kelompok agama yang terus mengancam. Tapi, bagaimana dengan anak muda? Apakah anak muda dianggap kawan atau lawan?

Seorang peneliti bernama Saya Sasaki Siraishi pernah menyebut bahwa Soeharto memandang Indonesia seperti sebuah keluarga besar. Dalam keluarga, terdapat sosok bapak, ibu, serta anak–dan Soeharto menganggap dirinya adalah "bapak" tertinggi di Indonesia. Sebagaimana keluarga pada umumnya, sang bapak bertugas sebagai pembina rumah tangga yang wajib melindungi, menyejahterakan, membangun, dan menjaga harmoni keluarganya. Yang terpenting, sang bapak memastikan bahwa anaknya "berbakti" dan tidak melenceng dari nilai-nilai dan

norma yang diajarkan Bapak. Anak dituntut untuk menurut pada orang tua, tidak banyak protes, hormat pada orang tua, dan hidup "lurus-lurus saja" supaya orang tua bangga. Terdengar familiar, kan?

Istilah baru!

Depolitisasi: adalah penghapusan atau penghilangan unsur dan/atau kegiatan politik. Contohnya, pada era pemerintahan Soekarno, anak muda dipanggil dengan sebutan 'pemuda' dan dikenal sangat aktif dalam politik. Soeharto, yang ingin anak muda tidak ikut campur dengan politik, menentang penggunaan istilah pemuda yang dianggap kental dengan nuansa politik. Untuk *mendepolitisasi* anak muda, maka ia menggunakan istilah lain yang dianggap lebih netral, yaitu 'remaja'.

Memasuki tahun 1970-an, sang anak mulai beranjak dewasa. Lahir satu generasi baru anak muda Indonesia yang tumbuh dewasa di negara yang lebih sejahtera dan terbuka pada dunia luar, namun mengerikan dan penuh penindasan di dalam. Pemerintah jelas tidak ingin generasi anak muda ini jadi ancaman baru bagi mereka. Seperti konsep keluarga yang dijelaskan di atas, Soeharto ingin anak muda Indonesia menurut-menurut saja dan tidak banyak protes seperti generasi anak muda sebelumnya. Mereka pun giat berkampanye bahwa anak muda adalah "harapan masa depan bangsa." Anak muda digadang-gadang sebagai calon pewaris bangsa sehingga mereka harus memegang teguh ideologi dan semangat Orde Baru. Maka, orang tua wajib membina anaknya dengan baik supaya anak muda jauh dari "sikap huru-hara, sikap memberontak, dan sikap kritis terhadap pemerintahan", seperti yang dikutip dari sejarawan Ausaf Ali Athiyyah.
Di luar harapan pemerintah, anak muda pada tahun 1970-an sangat jauh dari citra "pemuda harapan bangsa". Para mahasiswa tetap rajin mengkritik dan mempertanyakan kebijakan pemerintah dan sering mengorganisir aksi demo yang langsung dibubarkan aparat. Di perkotaan, muncul satu budaya baru yang bikin kaget Orde Baru, *hippies*.

Budaya *hippies* dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, di tengah keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam yang panjang dan memakan banyak korban. Bagi para *hippies,* generasi saat itu sudah melupakan alam tempat mereka berasal, dibutakan oleh ambisi untuk berperang, berkuasa, dan menaklukkan manusia lain. Maka, mereka menyebarkan pemikiran yang menolak peperangan, mendukung perdamaian dan spiritualitas, serta menjunjung tinggi

kebebasan setiap manusia. Gaya hidup mereka pun mulai didominasi dengan penggunaan narkotika yang tinggi serta keterbukaan seksual. Banyak band rock yang terkenal pada masa itu, seperti The Beatles dan Jefferson Airplane, mulai tertarik pada budaya *hippies* yang cinta damai. Band-band ini menyebarkan budaya tersebut ke penggemar-penggemarnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Para *hippies* identik dengan penampilan urakan, rambut gondrong, dan busana lebar dengan warna-warna mencolok. Anak muda di kota-kota Indonesia yang kekurangan kegiatan karena tak diizinkan berpolitik di kampus mulai berbondong-bondong mengadopsi budaya *hippies*. Band-band rock psikedelik yang legendaris seperti Shark Move, Rollies, Super Kid, AKA, hingga Black Brothers dan God Bless dibentuk dan mulai digandrungi oleh anak muda.

Namun, ada satu perbedaan yang penting antara *hippies* di Amerika Serikat dengan *hippies* di Indonesia, yaitu keaktifan di politik. *Hippies* di Amerika Serikat aktif secara politik. Mereka rajin mengadakan demonstrasi untuk memprotes kebijakan negaranya yang hobi berperang. Sementara, *hippies* di Indonesia hanya meniru "sebatas kulitnya". Seperti yang ditulis sejarawan Aria Wiratma Yudhistira, "Anak-anak muda Indonesia pada waktu itu hanya meniru penampilan luar dari gaya hidup yang berlangsung di Barat. Sedangkan nilai-nilai ideologis yang melekat pada simbol gaya hidup tersebut tidak ikut ditiru. Meskipun rambut gondrong sebagai simbol kebebasan, namun mereka berambut gondrong bukan semata-mata ingin menunjukkan kebebasannya, melainkan karena itu merupakan mode yang sedang *nge-trend* saat itu." Singkatnya, anak muda Indonesia saat itu cuma gaya-gayaan. Mereka merasa gaya *hippies* yang berambut gondrong itu keren dan karena mereka tak punya banyak pilihan aktivitas, mereka pun ikut-ikutan.

Meskipun *hippies* di Indonesia tidak aktif secara politik, mereka masih dianggap sebagai ancaman oleh Orde Baru. Bagaimana tidak, Soeharto berharap anak muda Indonesia berpenampilan rapi, disiplin layaknya anggota ABRI, memegang teguh norma-norma, dan menurut pada pemerintah. Harapan ini jelas gagal dipenuhi para *hippies* yang tampilannya berantakan dan hidup seenaknya sendiri. Apalagi, pada saat bersamaan, para aktivis mahasiswa masih gencar memprotes pemerintah meski mulai diam-diam karena takut diciduk aparat.

Budaya senang-senang para *hippies* sukses membuat pemerintah kebakaran jenggot. Bayangkan saja, pemerintah diisi oleh orang-orang tua yang merasakan betapa repotnya memperjuangkan Kemerdekaan dan suka-duka kehidupan yang sulit di bawah Soekarno. Sementara, anak muda saat itu tumbuh di era Orde Baru yang stabil dan tidak banyak musuh di dalam dan luar negeri seperti era Soekarno. Maka para orang tua menganggap anak muda saat itu manja, suka memberontak,

dan tidak mau diatur. Mereka menganggap moral anak muda rusak gara-gara pengaruh budaya Barat. Padahal, budaya Barat tersebut justru masuk Indonesia karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang membuka diri pada investasi asing.

Tahukah kamu?

Salah satu penyeragaman paling parah di Indonesia terjadi terhadap masyarakat Papua. Ketika tentara Indonesia pertama kali menduduki Papua Barat pada Mei tahun 1963, mereka segera mengorganisir pembakaran artefak-artefak budaya Papua di alun-alun utama kota Jayapura. Sebanyak 10 ribu penduduk Papua dipaksa menghadiri aksi yang disambangi Menteri Kebudayaan Ruslah Sardjono. Budaya tradisional Papua yang sudah ada sejak jauh sebelum negara Indonesia bahkan ditemukan, dicemooh sebagai "budaya kolonial" yang patut dibakar.

Sejak saat itu, segala bentuk aktivitas politik dan ekspresi budaya Papua dibungkam habis-habisan oleh tentara. Generasi muda lantas mulai melupakan tradisi Papua yang dihapus secara paksa oleh negara. Kondisi inilah yang mendorong Arnold Ap, bersama kelompok musiknya, Mambesak, rutin berkeliling Papua, merekam ulang lagu-lagu tradisional Papua, dan mendokumentasikan budaya-budaya Papua yang sudah hampir punah. Kaset-kaset Mambesak yang direkam seadanya laku keras. Arnold pun rutin mengisi siaran radio, di mana ia berkisah tentang budaya asli Papua dan membawakan *mop*, cerita lucu asli Papua. Selain itu, ia juga menjabat sebagai kurator di Museum Antropologi di Universitas Cendrawasih, Jayapura.

Meski Arnold tidak terang-terangan mengkritik pemerintah, tindakannya yang mencoba melestarikan budaya Papua ini membuat tentara gerah. Pemerintah ingin menghapus perlahan-lahan budaya tradisional Papua supaya rakyat Papua lebih meniru dan menurut pada pemerintah pusat di Jawa. Pada November tahun 1983, Arnold Ap diciduk oleh pasukan Kopassus dan ditahan selama berbulan-bulan dengan tuduhan melakukan tindakan subversif atau melawan negara. Ketika koran *Sinar Harapan* memberitakan bahwa keluarga Arnold dilarang menghubunginya, redaksi koran tersebut diancam oleh aparat. Pada 21 April 1984, Arnold dibunuh beserta empat tahanan lainnya oleh Kopassus.

Berdasarkan pemahaman asal-asalan ini, pemerintah mengambil kesimpulan bahwa anak muda perlu "diselamatkan" dari kerusakan moral yang disebabkan budaya *hippies*. Berbagai seminar, simposium, dan kampanye pemerintah bergantian menceramahi anak muda agar mereka menjauhi perilaku seksual, penggunaan narkotika, budaya *hippies*, dan kembali mengikuti norma-norma yang berlaku. Ceramah bertele-tele ini jelas tidak digubris oleh anak muda yang tidak tertarik menjadi "pemuda harapan bangsa" ala Orde Baru. Akhirnya, pada awal tahun 1970-an, upaya menyelamatkan "moral bangsa" ini berujung pada satu kebijakan yang sekilas terkesan kocak dan membingungkan, tapi berdampak serius: pelarangan rambut gondrong.

Dilarang gondrong!

Ada satu hal yang hampir pasti dimiliki seorang *hippies*: rambut gondrong. Rambut gondrong dianggap sebagai simbol anak muda *hippies* nakal yang tidak menurut pada orang tua, bahkan berbahaya bagi kedaulatan negara dan

ketertiban umum. Media-media cetak tahun 1970-an sibuk mengidentikkan rambut gondrong dengan tindakan kriminal. Mengutip Athiyyah, "permasalahan rambut gondrong ini kemudian menjadi (simbol) ketakutan orang tua akan masa depan anak mereka yang dinilai terpengaruh oleh kehidupan Barat yang bebas."

Akhirnya, rambut gondrong resmi dilarang oleh pemerintah. Akademisi, budayawan, hingga Gubernur sibuk berdebat mengenai apa definisi gondrong dan seberapa panjang kah sebuah rambut sampai bisa dikatakan gondrong. Adu pendapat mereka meramaikan halaman koran-koran besar seperti *Sinar Harapan*, *Kompas*, hingga *Pos Kota*. Setiap pelajar sekolah diwajibkan memotong rambutnya dengan gaya cepak ala ABRI. Orang-orang dengan rambut gondrong tidak akan dilayani di kantor-kantor pemerintah. Bahkan, artis dengan rambut gondrong dilarang tampil di televisi nasional! Hebatnya, kebijakan yang *nyeleneh* ini tidak berakhir di situ.

Pada awal tahun 1970-an, pemerintah meresmikan berdirinya Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong atau disingkat BAKOPERAGON. Jelas tertulis dari namanya, badan ini khusus dan resmi dibentuk pemerintah dengan satu tujuan yang bikin geleng-geleng kepala: memberantas rambut gondrong di masyarakat, terutama anak muda. Mereka bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti polisi dan tentara untuk merazia rambut gondrong. Aparat yang tergabung dalam operasi antigondrong ini siap dengan gunting dan langsung mencukur kepala siapa pun yang ketahuan berambut gondrong. Mereka siap sedia di jalanan, mampir ke sekolah-sekolah dan tempat umum, bahkan merangsek masuk kampus-kampus. Pemerintah bahkan menetapkan target bahwa Indonesia sudah "bebas rambut gondrong" pada tahun 1973.

Anak muda jelas merasa heran dan marah dengan kebijakan ini. Bagi mereka, orang-orang tua ini munafik. Menceramahi anak muda tentang moral dan norma, padahal mereka sendiri yang paling sering melanggar moral dan norma tersebut. Mereka bertanya: buat apa kalian mengurusi rambut orang, sementara perjudian, prostitusi, dan perilaku korupsi masih merajalela? Maka, walaupun pemerintah masih gencar melakukan razia rambut gondrong, kebijakan ini sangat tidak populer di kalangan anak muda. Suasana semakin tidak kondusif saat aparat mulai sering melakukan razia ke kampus-kampus, di mana mereka disambut dengan dingin oleh para mahasiswa. Bom waktu ini akhirnya meledak juga pada September 1970, saat razia rambut gondrong dilakukan di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

ITB dan Bandung kala itu adalah sarang anak muda berambut gondrong. Para taruna dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) sibuk

bergantian memangkas rambut para mahasiswa. Lama-lama tindakan aparat ini mulai membuat kesal mahasiswa ITB dan warga sekitar. Protes besar-besaran dilakukan sebagai upaya simpati dengan teman-temannya yang dipaksa potong rambut dan mengkritik kebijakan pemerintah ini. Untuk mendinginkan suasana, aparat mengadakan pertandingan persahabatan sepak bola antara taruna dengan mahasiswa. Usaha mereka gagal total. Pertandingan tersebut berakhir dengan kericuhan, protes semakin lantang, mahasiswa secara terbuka berperang dengan aparat,. Di tengah situasi kacau tersebut, seorang mahasiswa ITB gugur terkena peluru taruna.

Mahasiswa tersebut, Rene Louis Coenraad, tidak mengikuti aksi protes, tapi kebetulan lewat di waktu yang salah. Namun, gugurnya Coenraad membuat geger warga Bandung dan memperburuk hubungan antara mahasiswa dengan aparat. Pemerintah dan militer mendapat kecaman keras dari berbagai universitas. Tewasnya Coenraad, yang diperingati sebagai Peristiwa 6 Oktober 1970 membuktikan pada anak muda bahwa generasi orang tuanya dan pemerintah yang sibuk mengurus moral orang lain ternyata kejam dan bertindak seenaknya. Sejak itu mahasiswa yang tadinya bukan ancaman bagi pemerintah malah semakin serius mengkritik pemerintah dan mengorganisir gerakan. Alih-alih menekan perlawanan anak muda, pelarangan rambut gondrong malah membuat anak muda semakin berbahaya.

Mahasiswa tidak lagi sekadar protes soal pelarangan rambut gondrong. Mereka mulai menyoroti pembangunan di Indonesia yang pesat tapi tidak merata. Mereka mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan Soeharto dan rekan-rekannya. Mereka protes soal Dwifungsi ABRI dan kehadiran Kopkamtib yang bisa berbuat seenaknya sendiri tanpa harus bertanggung jawab pada hukum. Mereka geram dengan ketergantungan Indonesia pada investasi asing yang tidak menyejahterakan rakyat kebanyakan. Pada tahun 1970-an, anak muda berubah menjadi ancaman nyata yang selama ini ditakuti oleh Orde Baru: kelompok yang kritis, terorganisir, dan aktif secara politik.

Istilah baru!

Paramiliter: kekuatan berpasukan yang struktur, organisasi, budaya, pelatihan dan fungsinya mendekati militer sesungguhnya, namun bukan bagian dari tentara. Biasanya, mereka dilatih untuk menjadi bala bantuan bagi tentara dalam situasi tertentu.

Tahukah kamu?

Pemerintah tahu mereka tidak bisa sekadar mengandalkan tentara untuk "menjaga stabilitas negara". Maka aparat militer merekrut warga sipil, yang sebagian besar adalah preman, untuk dijadikan pasukan *paramiliter.* Kelompok-kelompok preman ini dipelihara dan diorganisir negara dan anak muda didorong untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang berhubungan dekat dengan tentara. Ketika pemerintah ingin meredam protes warga atau membasmi pihak tertentu, preman-preman ini sering dikerahkan. Angkatan Darat, misalnya, mengerahkan pasukan-pasukan paramiliter untuk membasmi kelompok Kiri pada tahun 1965-1966.

Namun sebenarnya pemerintah ragu dengan kesetiaan preman-preman binaan negara ini. Akhirnya pada tahun 1980-an, preman-preman ini diculik dan dibunuh satu per satu. Aparat militer seperti Koramil, Kodim dan Kodam memburu para preman di bawah komando Pangkopkamtib. Aparat sipil seperti Ketua RT, RW, dan Lurah terus menerus memberikan daftar nama target kepada aparat militer. Pembantaian preman-preman ini dijuluki Penembakan Misterius atau Petrus. Ratusan bahkan ribuan orang meninggal akibat aksi keji ini.

Pada tahun 1972, mahasiswa ramai-ramai memprotes rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Proyek raksasa yang dicetuskan oleh istri presiden, Tien Soeharto, ini membutuhkan lahan seluas 165 hektar dan biaya 10,5 milyar rupiah–angka yang sangat boros untuk ukuran era 1970-an. Kritik masyarakat terhadap pembangunan TMII semakin kuat saat lahan yang dibutuhkan untuk Taman Mini diambil dari tanah rakyat yang digusur.

Pada aksi demo anti-TMII di Jakarta, para demonstran diserang oleh sekelompok preman, dan Soeharto menyiarkan pidato yang mengancam siapa pun yang berani protes. Soeharto pun cepat tanggap dengan menahan empat pimpinan demonstran yang kemudian disekap selama sebulan. Ia menuduh bahwa protes tersebut diorganisir oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan pemerintah. Akhirnya, gelombang protes ini pun reda di bawah tekanan aparat.

Tahukah kamu?

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di era Orde Baru pada tahun 1971, pemerintah sudah memastikan kemenangan Soeharto. Bill Liddle, seorang Indonesianis, mencatat banyaknya pegawai negeri dan aparat desa yang dipaksa untuk menandatangani sumpah setia pada Golongan Karya (Golkar), partai Soeharto. Fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kulon Progo.

Lantas, apa yang harus dilakukan kalau kita dipaksa masuk bilik suara dan mencoblos partai Golkar?

Sejumlah aktivis seperti Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, Husin Umar, dan Asmara Nababan mengajak masyarakat untuk mencoblos bagian putih dari kertas suara, agar suaranya dihitung gugur. Gerakan ini, yang akhirnya disebut dengan golongan putih atau **golput**, dideklarasikan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya, Jakarta.

Rakyat jelas tidak berani menolak masuk bilik suara karena mereka akan "ditandai" aparat. Mereka juga takut menolak kekuasaan Soeharto secara terang-terangan, karena mereka bakal diciduk tentara atau diancam Kopkamtib. Maka, mereka menyatakan penolakan secara halus dengan mencoblos bagian putih kertas suara, bukannya mencoblos Partai Golkar.

Masalah tidak berhenti di Taman Mini. Pada tanggal 15 Januari 1974, terjadi demonstrasi besar-besaran lagi di Jakarta. Para demonstran, yang mahasiswa, merasa bahwa Indonesia terlalu bergantung pada investasi asing, terutama dari Jepang. Maka, mereka menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, yang rencananya berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14-17 Januari 1974. Massa berbondong-bondong ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk mencegat Tanaka, namun dihalau oleh aparat.

Hari itu, kerusuhan besar pecah di Ibukota. Terjadi pembakaran mobil-mobil Jepang, demonstrasi massal, dan penjarahan di pusat pertokoan Proyek Senen. Pimpinan Opsus, Ali Murtopo, menuduh kelompok agama mendalangi kerusuhan tersebut. Beberapa tokoh eks-Masyumi dan tokoh mahasiswa pun diadili, namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam kerusuhan tersebut. Malah ada indikasi kuat bahwa peristiwa tersebut dibuat oleh "orang dalam" pemerintahan karena terjadi persaingan di antara para institusi militer. Terjadinya protes besar-besaran terhadap pembangunan TMII dan meletusnya Peristiwa Malari membuktikan pada Soeharto bahwa negaranya sudah tidak solid. Anak muda yang kencang menyuarakan kritik pun dituduh sebagai salah satu biang kerok utama ketidakstabilan ini.

Puncaknya terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 1977. Sejak Soeharto pertama kali berkuasa, Pemilu memang selalu dimanipulasi dengan cerdik oleh aparat negara sehingga partai Golkar akan selalu menang, dan Soeharto selalu terpilih menjadi Presiden. Di tahun 1977, mahasiswa muak dengan keadaan ini. Mereka membuat aksi besar-besaran untuk menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden. Bahkan, mahasiswa dari Universitas Indonesia dan ITB mengeluarkan dokumen bernama Buku Putih Perjuangan Mahasiswa Indonesia. Protes kali ini jauh lebih halus dan berhati-hati. Belajar dari pengalaman sebelumnya, aksi mereka sama sekali tidak keluar dari lingkungan kampus. Namun, hal ini justru mendorong tentara untuk menyerbu masuk ke dalam kampus.

Maka, pada akhir tahun 1970-an, pemerintah dihadapkan pada situasi sulit. Meski situasi ekonomi terus membaik, Soeharto betul-betul merasa terancam oleh gerakan mahasiswa yang tidak kunjung kapok meski sudah berulang kali diredam aparat. Setelah aksi demo tahun 1977 mereda, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengubah segalanya: NKK/BKK.

Dari Kampus ke Mimbar

Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) diberlakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Daoed Joesoef

untuk menanggapi demo mahasiswa yang terus terjadi. Tapi, memangnya apa itu NKK/BKK?

Pada dasarnya, kebijakan NKK/BKK melarang kegiatan politik praktis **apa pun** di kampus. Dewan Mahasiswa dibubarkan paksa dan diganti dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Mahasiswa dilarang melakukan aksi demonstrasi dan sebagai gantinya dianjurkan untuk lebih fokus melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Melalui NKK/BKK, Soeharto melalui Daoed Joesoef seolah berkata pada anak muda, "Sudahlah, kamu *enggak* perlu protes-protes kayak begitu. Kamu fokus belajar saja."

Yang jadi masalah, mereka tidak *menganjurkan,* tapi *memaksa.* Kampus dijadikan wilayah yang steril dan tidak boleh dimasuki oleh tokoh-tokoh yang kritis. Memasuki tahun 1980-an, akademisi dan budayawan kritis seperti W.S Rendra, Pramoedya Ananta Toer, Emha Ainun Najib atau Cak Nun, Adnan Buyung Nasution, hingga Arief Budiman masuk "daftar hitam" dan dilarang jadi pembicara di kampus. Berbagai terbitan pers mahasiswa yang tadinya dikenal garang pun dibubarkan paksa. Sebagai gantinya, pimpinan universitas menerbitkan media yang dikontrol langsung oleh rektor dan harus mengajukan permohonan surat tanda terdaftar (STT) di Departemen Penerangan lokal.

Tahukah kamu?

W.S Rendra, penyair besar Indonesia yang dijuluki Si Burung Merak, adalah salah satu sastrawan yang paling vokal menyuarakan kritik terhadap Orde Baru. Pada 28 April 1978, auditorium di Taman Ismail Marzuki dipenuhi orang-orang yang ingin menonton pembacaan puisi Rendra. Saat itu, pemerintah diprotes karena dianggap mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya Indonesia demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Rendra sering menulis "puisi pamflet"–yang disebarluaskan ke publik secara massal.

Puisi pertama yang dibaca Rendra malam itu berjudul "Sajak Mata-Mata". Puisi itu menyindir pemerintah yang mudah tersinggung dan menurunkan tentara setiap kali ada yang mengkritiknya. Bait-bait awalnya berbunyi, *"Ada suara bising di bawah tanah/Ada suara gaduh di atas tanah/Ada ucapan-ucapan kacau di antara rumah-rumah/Ada tangis tak menentu di tengah sawah/Dan, lho, ini di belakang saya, ada tentara marah-marah!"*

Penonton tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan meriah. Rendra pun membaca puisi keduanya, *"Aku Tulis Pamflet Ini"*: *"Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring labah-labah/Orang-orang bicara dalam kasak-kusuk/dan ungkapan diri ditekan/menjadi peng - iya - an."* Seolah ada yang memberi komando, mendadak penonton ricuh dan pembacaan puisi Rendra terhenti. Terdengar teriakan dan suara peluit ditiup. Tiga bom ammonia diledakkan di dekat panggung. Rendra mencoba melanjutkan puisinya, sebelum berteriak ke penonton: "Saudara-saudara, saya tidak mundur! Saya bertanya, apakah saudara-saudara akan mundur?" Penonton menyambut meriah dan Rendra melanjutkan pembacaan puisinya.

Sayangnya, beberapa hari kemudian Rendra ditangkap oleh aparat karena dituduh melakukan kegiatan provokatif. Ia pun dipenjara selama lima bulan.

Pada tahun 1978, Soeharto menyatakan bahwa pemerintahnya bertekad untuk setia pada Pancasila dan tak segan-segan melibas siapa pun yang menawarkan ideologi berbeda. Mereka lantas mencetuskan penataran Pedoman Penghayatan dan Pelaksanaan Pancasila (P4), program menjemukan di mana yang mengharuskan mendengarkan ceramah tentang Pancasila yang disampaikan para Manggala–kebanyakan anggota militer. Setiap mahasiswa baru diwajibkan mengikuti penataran ini.

Lebih parah lagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pembentukan resimen mahasiswa (Menwa) di kampus-kampus Indonesia. Para Menwa ini adalah anak-anak kampus yang direkrut aparat dan punya hubungan erat dengan Komandi Daerah Militer (Kodim) setempat. Mereka menjadi intel yang memberi laporan secara rutin pada pihak Kodim mengenai situasi keamanan di kampus dan nama-nama mahasiswa yang dianggap bermasalah.

Singkatnya, kalau kamu kuliah di Indonesia pada tahun 1980-an, kemungkinan besar kamu akan menemukan atmosfer yang mencekam. Tidak seperti kebijakan dilarang gondrong yang malah blunder, kebijakan NKK/BKK sukses membuat para aktivis mahasiswa "mati suri". Untuk sementara, mereka tak berani menyuarakan kritik secara terang-terangan. Meskipun begitu, masih banyak mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah. Seperti banyak elemen masyarakat, mereka diam-diam menyimpan rasa marah yang sangat pada Orde Baru dan pemimpinnya, Soeharto. Ketika Indonesia krisis keuangan dan mengalami kekacauan politik pada

tahun 1997-1998, mahasiswa termasuk salah satu kelompok yang paling gencar mengkritik pemerintah, dan berujung pada digulingkannya Soeharto.

Tapi, itu nanti. Kita masih ada di tahun 1980-an ketika masyarakat menyimpan rasa benci pada pemerintah tapi kebingungan mencari ruang bicara. Mau protes di jalanan, jelas bakal dibubarkan. Mau gosip sama tetangga, bakal dilaporkan ke Kopkamtib. Mau bikin diskusi di kampus, nanti diintip Menwa dan digerebek tentara. Di saat-saat seperti itu, banyak pihak yang akhirnya mengandalkan mimbar-mimbar masjid.

Keberatan-keberatan mengenai pemerintah mulai sering didiskusikan dari mimbar masjid melalui khotbah-khotbah yang semakin lama semakin vokal. Masyarakat yang tak punya tempat untuk menyampaikan unek-unek tentang pemerintah pun semakin ramai mendatangi masjid. Tempat ibadah dianggap sebagai ruang yang aman untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran tanpa harus diusik pemerintah.

Melihat kecenderungan baru ini, pemerintah saat itu tak bisa diam. Jika sebelumnya pemerintah menganggap kelompok kiri, mahasiswa, dan *hippies* sebagai ancaman besar, pada awal tahun 1980-an Soeharto mulai menekan kelompok yang ia juluki **Islam Politik.** Sebutan-sebutan seperti "ekstrem kanan", "NII", "mendirikan Negara Islam", dan "anti-Pancasila" dituduhkan pada kelompok Islam yang semakin kritis terhadap pemerintah. Berbagai kelompok yang dianggap masuk ke dalam golongan Islam Politik pun ditangkapi dan dikirim ke penjara Nusakambangan.

Tahukah kamu?

Kelompok Islam Politik bukan satu-satunya kelompok yang ditekan habis-habisan oleh pemerintah. Jauh sebelumnya, warga etnis Tionghoa sudah menghadapi penyeragaman dan tekanan besar-besaran dari pemerintah. Awal dari tekanan ini ada hubungannya dengan posisi politik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dekat dengan Blok Soviet dan sekutu terdekat Soekarno.

Setelah berkuasa, Soeharto menuduh RRT sebagai salah satu dalang di balik Peristiwa 30 September 1965 yang berdarah-darah dan militer mulai memprovokasi warga untuk menebar kebencian terhadap etnis Tionghoa. Di Lhoksemauwe, Aceh, misalnya, warga Tionghoa diusir keluar rumah masing-masing dan dijemur selama lima jam lebih di bawah sinar matahari. Warga laki-laki dipaksa

membuka baju kemudian tubuhnya disiram cat dan ditulisi slogan-slogan anti-Tionghoa. Di Medan, Sumatera Utara, tembok-tembok kota penuh dengan coret-coretan “Orang-orang Tionghoa pulang!” dan “Sekali Tionghoa, tetap Tionghoa!”

Peristiwa ini merembet pada penyeragaman kepercayaan dan adat Tionghoa. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki nama Tionghoa dipaksa mengubah namanya agar terdengar lebih “pribumi” melalui Instruksi Kabinet Presidium No. 127/U/KEP/1966. Kebijakan aneh inilah yang membuat banyak warga Tionghoa akihrnya punya dua nama, nama Indonesia dan nama Tionghoa. Bayangkan jika seorang warga etnis Jawa bernama Slamet dipaksa mengganti namanya menjadi Budi karena nama Slamet terdengar terlalu Jawa.

Kepercayaan yang dianut banyak warga Tionghoa, Konghucu, juga dilarang melalui Inpres no. 14/1967 yang diresmikan pada 6 Desember 1967. Menteri Perdagangan dan Koperasi pun ikut merilis larangan impor, perdagangan, dan penyebaran semua jenis barang cetakan dalam bahasa dan aksara Tionghoa. Larangan penggunaan aksara Tionghoa jelas menghambat penyebaran buku-buku keagamaan Tionghoa yang semuanya menggunakan aksara tradisional mereka. Gara-gara larangan ini, warga Tionghoa kesulitan menjalankan perkawinan, memperoleh pekerjaan, dan pendidikan.

Pada 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto menggagas bahwa semua kekuatan politik dan kemasyarakatan di Indonesia wajib menganut asas Pancasila. Jika tidak, mereka akan dituduh mengkhianati negara dan dihabisi. Kebijakan ini yang disebut kebijakan Asas Tunggal Pancasila ini pertama diutarakan di depan DPR dan diresmikan dalam TAP II/MPR/1983 tentang GBHN. Menteri Agama mewanti-wanti berbagai organisasi keagamaan untuk “membina umatnya masing-masing agar menjadi pemeluk agama yang taat, sekaligus warga negara yang Pancasilais.” Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bukan partai politik

pun dipaksa untuk memasukkan Pancasila sebagai asas dalam kongresnya. Melalui Asas Tunggal, pemerintah "tidak ingin memberi peluang bagi kekuatan mana pun untuk menjadi kekuatan yang mampu menyaingi partai yang didukung pemerintah."

Imbasnya adalah cekcok antara aparat dengan kelompok-kelompok Islam semakin sering terjadi. Salah satu insiden terparah terjadi di Tanjung Priok, Jakarta, pada 12 September 1984. "Peristiwa Tanjung Priok berawal dari masuknya seorang Babinsa ke Mushala As-Sa'adah tanpa buka sepatu dan mencari brosur masyarakat." Korban bernama Husein Safe mengisahkan, "Kemudian Babinsa menyirami brosur tersebut dengan air comberan. Masyarakat marah dan mengejar Babinsa yang bernama Pak Herman yang kemudian melarikan diri." Sosok Babinsa bernama Herman ini menggerebek Musala As-Sa'adah karena ada kabar bahwa buletin mereka rutin mengkritik kebijakan pemerintah. Ketika ia lari terbirit-birit dari amarah warga, motornya yang ketinggalan dibakar. Empat orang warga yang diduga terlibat dalam pembakaran tersebut ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, lantas dipindahkan dan ditahan di Kodim Jakarta Utara. "(Mereka) dibawa ke Kodim selama tiga hari, dipukul," lanjut Husein.

Amir Biki, seorang tokoh masyarakat setempat, lantas mengadakan tabligh akbar di Jalan Sindang. Dalam ceramahnya, ia menuntut aparat keamanan membebaskan empat jemaah mushala yang ditahan di Kodim Jakarta Utara. "Almarhum Amir Biki memberi waktu sampai jam sebelas malam, ternyata tidak dipenuhi Kodim," jelas Husein. "Maka pada jam sebelas malam saya disuruh menggiring jemaah pengajian ke Kodim. Jemaah yang ikut 5.000 orang. Sampai di depan Kodim Jakarta Utara dihadang regu Lanhanud, kami disuruh berhenti. Amir Biki masih di belakang. Saya sedang mengatur teman saya tapi langsung ditembak tanpa peringatan, ditembak di kaki saya dalam jarak satu meter. Setelah itu tembakan kayak dalam perang, banyak yang luka, bergelimpangan yang mati. Ketika almarhum Amir Biki datang, ada yang tentara teriak, 'Amir Biki datang, habisin!', maka bunyi senjata semakin keras sekitar 10-15 menit. Kalau ada yang teriak 'Allahu Akbar', langsung ditembak. Maka saya diam, pura-pura mati. Saya diseret ke pinggir jalan kayak kambing."

Berita acara dari petugas RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa 55 orang luka-luka dan 23 orang meninggal dunia. Sembilan jenazah dapat dikenali identitasnya dan empat belas lainnya tak diketahui. Amir Biki termasuk salah satu orang yang gugur di malam naas tersebut. Proses hukum untuk menyelesaikan kasus Tanjung Priok terbilang lambat dan berantakan. Pengadilan baru dimulai pada September 2003, nyaris 20 tahun setelah kejadian, dan dua terdakwa yang diputuskan bersalah akhirnya dibebaskan.

Bhinneka Tunggal Ika (?)

Warisan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha mengatur dan menyeragamkan rakyatnya masih kita rasakan sampai sekarang. Bukan hanya *hippies* berambut gondrong, aktivis mahasiswa, dan kelompok pengajian saja yang merasakan penindasan dari pemerintah. Kelompok kepercayaan minoritas, etnis Tionghoa, wartawan yang berani mengangkat berita buruk tentang pemerintah, seniman yang kritis, dan masyarakat yang tanahnya digusur untuk proyek semuanya punya kisah masing-masing.

Jangan kira penyeragaman dan kebijakan-kebijakan konyol seperti yang diceritakan di atas berakhir dengan jatuhnya Soeharto setelah Reformasi tahun 1998. Jemaah Ahmadiyah diserang warga di Cikeusik dan Nusa Tenggara Barat, banyak dari mereka masih belum bisa pulang ke kampung halamannya lagi. Pemutaran film *Senyap* dilarang karena dianggap menyebarkan komunisme, meski film tersebut sama sekali tidak membahas komunisme. Penganut penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan atau Kejawen masih dipandang sebelah mata oleh petugas-petugas administrasi sipil. Berkali-kali, demonstrasi yang menuntut kehidupan lebih baik di Papua dihadang aparat dengan penuh kekerasan. Sejak era Kolonialis hingga sekarang, penyeragaman masih menjadi cara sakti pemerintah untuk meredam suara-suara yang tidak sepaham dengan mereka, serta membenarkan tindakan mereka yang seenaknya sendiri.

Simak lebih jauh!

Buku

Aria Wiratma Yudhistira – *Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-an* (Marjin Kiri, 2010)

Buku ini berawal dari skripsi legendaris yang sempat jadi buah bibir di Universitas Indonesia beberapa tahun lalu. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang bagaimana Orde Baru mengendalikan anak muda bahkan sampai urusan rambut sekalipun, buku ini wajib banget kamu baca.

Lagu

“Those Shocking Shaking Days” - V/A (Now-Again Records, 2011)

Album ini berisi lagu-lagu karya band-band yang muncul pada era kejayaan *hippies* di Indonesia, Dikompilasikan dan dirilis oleh Now-Again Records, sebuah label musik asal Amerika Serikat, 20 lagu dari 20 band legendaris seperti Koes Plus, Rollies, dan AKA di album ini bakal membuatmu sadar bahwa Indonesia pernah punya musik sekeren ini.

Jangan sampai melewatkan *Saman Doye*, lagu klasik dari Black Brothers yang mencampur musik rock Amerika dengan bahasa Papua, dan *Don’t Talk About Freedom*, dari sang maestro, Harry Roesli.

Film

Sugiharti Halim - Ariani Darmawan (Kineruku Productions, 2008)

Film pendek karya sutradara Ariani Darmawan ini berkisah tentang Sugiharti Halim, seorang perempuan muda keturunan Tionghoa yang keluarganya dipaksa berganti nama. Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang memaksa semua WNI keturunan Tionghoa ‘memilih’ ingin berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Indonesia. Jika memilih jadi WNI, mereka dipaksa mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama yang terdengar ‘lebih Indonesia.’

Ada momen mengharukan ketika seorang karakter – teman kencan Sugiharti – bercerita tentang Ayahnya, yang menolak mengganti namanya. “*Teman Papa yang Tampubolon nggak pernah tuh ganti nama jadi Warsito atau Sungkono.*” Ucap Ayahnya, sengit. “*Kenapa Papa harus ganti nama?*”

Kalau kamu mau tahu betapa diskriminasi terhadap warga Tionghoa di era Orde Baru berdampak sampai hal seremeh temeh nama dan merembet ke aspek-aspek kehidupan lainnya, film yang cuma berdurasi 10 menit ini sangat pas ditonton. Kamu bisa mengakses film ini di YouTube dengan kata kunci “Film Pendek - Sugiharti Halim (2008)”.

Aktivitas

Yuk isi TTS berikut ini supaya kamu bisa melawan lupa!

Mendatar

1. Amir ... ; tokoh masyarakat Tanjung Priok yang gugur pada September 1984.

2. Kebijakan kontroversial yang melarang kegiatan politik praktis di kampus.

5. Surat Perintah yang praktis menyesuaikan kekuasaan dari Soekarno pada Soeharto.

6. Kebijakan yang membuat ABRI masuk ke dalam setiap aspek kehidupan

7. Kebijakan dalam negeri Soekarno yang mengakomodir pihak Nasionalis, Agama, dan Komunis

8 Rene Louis ... ; Mahasiswa ITB yang tewas pada Peristiwa 6

Menurun

1. Badan yang bertugas memberantas rambut gondrng.

3. Budaya anak muda yang cinta damai dan dimulai di Amerika Serikat.

4. Ali ... ; pemimpin Opsus yang bertugas melakukan aksi-aksi intelijen hitam.

6. Perang ... ; konflik antara Blok Soviet dan Blok Amerika.

jawaban
mendatar: 1. biki, 2. nkkbk, 5. supersemar, 6. dwifungsi, 7. nasakom, 8. coenraad
menurun: 1. bakoperagon, 3. hippies, 4. murtopo, 6. dingin

TUNJUKKAN KEBOLEHANMU
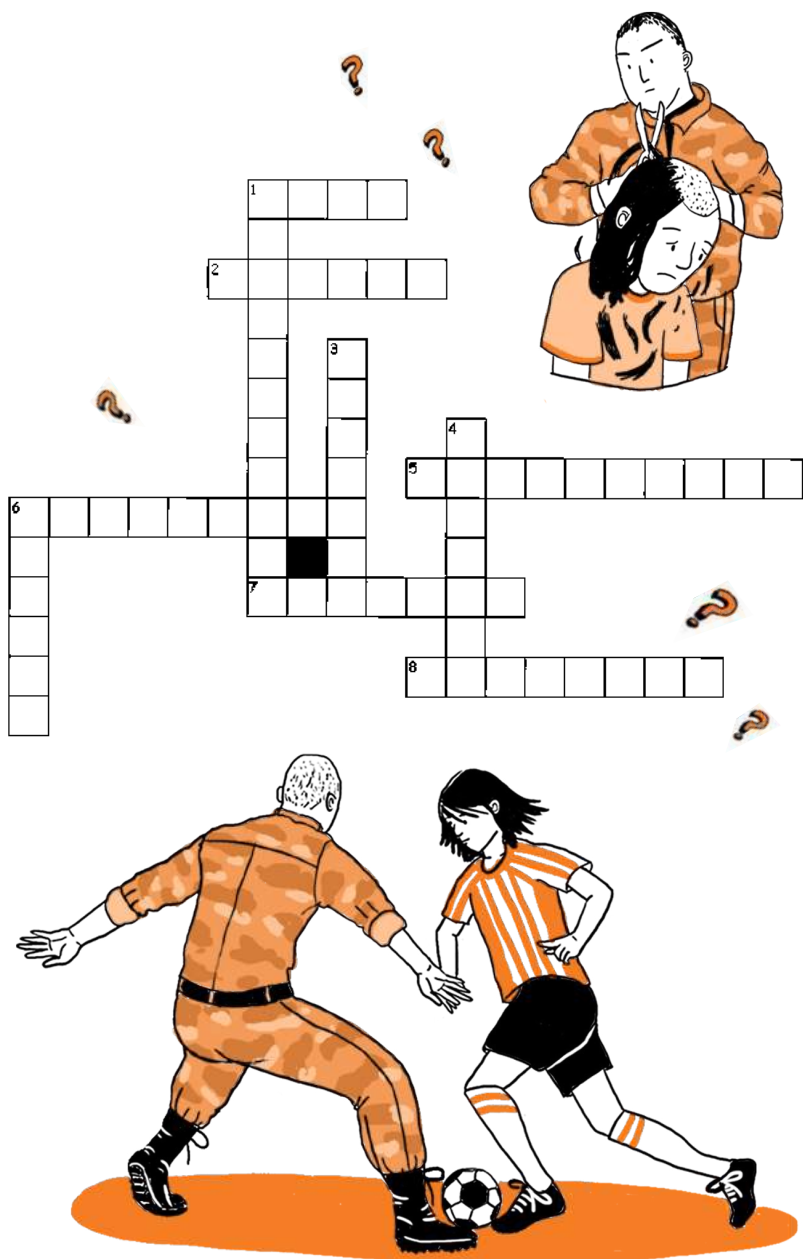
Kami telah menentukan dan menyembunyikan lima kata yang berhubungan dengan bab tentang Penyeragaman. Kamu dan kawanmu ditantang untuk menemukannya secepat mungkin, dan menyelamatkan Budi, orang-orangan kurang beruntung yang terancam digantung.

Misalnya kami memilih kata TELOLET, kami telah mengosongkan bagian yang harusnya diisi setiap huruf (contoh: _ _ _ _ _ _ _). Satu orang, bisa kamu atau temanmu, berperan sebagai orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang lainnya harus menebak huruf tertentu yang mungkin ada di kata tersebut. Kalau kamu menebak E, misalnya, karena E ada di kata TELOLET, maka isilah huruf E di ruang kosong tadi (contoh: _ E _ _ _ E _). Kalau setelah itu ada yang menebak huruf T, misalnya, tambahkan huruf T yang kosong (contoh: T E _ _ _ E T). Dan begitu seterusnya sampai kata itu ketebak. Kunci jawaban ada di bagian bawah halaman, tapi hanya orang yang memberi pertanyaan yang boleh melihatnya.
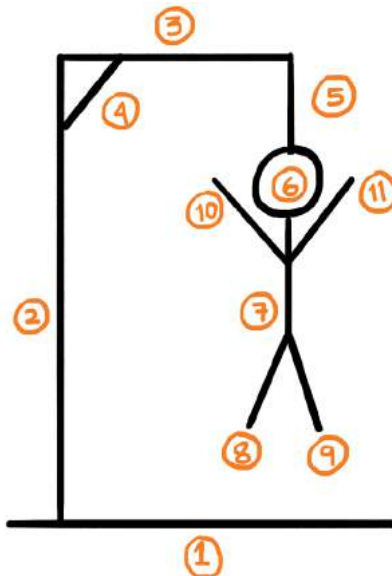
Hati-hati dalam menebak hurufnya! Soalnya, setiap kali salah menebak huruf, pemberi pertanyaan harus menggambar satu garis di gambar orang yang digantung. Seperti yang bisa kamu lihat di gambar, kalau kamu salah sekali, pemberi pertanyaan menggambar garis nomor 1 (tanah). Kalau kamu salah dua kali, dia akan menggambar garis nomor 2 (tiang gantungan). Dan begitu seterusnya sampai nomor 11.

Kalau kamu berhasil menemukan semua kata sebelum Budi digantung, selamat! Kalau tidak, minta maaf pada Budi. Kamu telah gagal menyelamatkannya.

Kalau kamu membaca dengan hati-hati (banget), semua kata yang kami sembunyikan harusnya gampang banget kamu temukan. Dan karena kami baik hati, beberapa huruf yang tersembunyi sudah kami buka untukmu.

CARI KATA-KATA TERSEMBUNYI INI

1. Majalah ini pernah ditutup secara paksa oleh pemerintah karena dianggap terlalu kritis. → _ E _ _ _
2. Julukan untuk pembunuhan-pembunuhan berbagai preman (yang sebenarnya dipelihara negara juga hehehe tapi jangan bilang-bilang yah) → _ _ T _ _ _
3. Istilah untuk menggambarkan protes besar-besaran untuk menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang di tahun 1970-an. → M _ _ _ _ I
4. Ideologi apa yang diperkenalkan Presiden Soekarno, dan dimaksudkan untuk mempersatukan tiga ideologi terbesar di Indonesia? → _ A _ A _ _ _
5. Gara-gara pemerintah panik, di tahun 1970-an anak muda dilarang... → _ O _ _ _ O _ _
6. Salah satu perusahaan asing pertama yang memanfaatkan Undang-Undang baru tentang Penanaman Modal Asing di awal masa pemerintahan Soeharto. → _ R _ _ _ _ R _
7. Band rock ini adalah salah satu band yang muncul di era hippies. → _ _ _ _ L _ _ _

Jawaban
1. Tempo 2. Petrus 3. Malari 4. Nasakom 5. Gondrong 6. Freeport 7. God Bless

Pola
Kekerasan 4

Banyak yang Cinta Damai, tapi Perang Semakin Ramai

Apakah kamu tahu pemberitaan tawuran antarwarga yang terjadi di Mesuji pada awal tahun 2016? **Konflik** karena sengketa lahan ini bermula dari ditemukannya mayat dengan bekas luka di sekujur tubuh yang memicu pembakaran puluhan rumah warga. Keadaan mencekam ini menghantui warga Mesuji dan sekitarnya hingga dua bulan lamanya. Bayangkan jika kamu harus merasa was-was jika di jalan kamu bertemu orang yang tidak dikenal dan membawa sesuatu yang mencurigakan selama dua bulan. Tentu hidup kamu tidak tenang bukan? Begitu juga dengan teman kita yang tinggal di Johar Baru. Meski sekarang, keadaan Johar Baru sudah sedikit demi sedikit pulih, namun di tahun-tahun sebelumnya sering sekali terjadi tawuran antarwarga di daerah ini yang disebabkan oleh hal-hal yang mungkin oleh beberapa orang dibilang sepele: suara petasan, kalah di permainan sepak bola, atau karena ada satu perempuan RW A yang digoda oleh RW B. Tawuran antar-RW ini sering sekali terjadi hingga ada satu lokasi di Johar Baru yang terkenal menjadi titik temu bentrok: Gang T.

Tawuran antarwarga di Indonesia tentu tidak hanya terjadi di dua daerah tersebut. Banyak sekali kejadian tawuran warga yang diberitakan dari ujung barat hingga ujung timur negara kita. Ternyata, tawuran antarwarga seakan menjadi tradisi "turun-temurun" sejak Orde Baru. Saat Orde Baru berkuasa di Indonesia, masyarakat kita seperti ditanami pemikiran bahwa kekerasan adalah jalan keluar untuk menanggapi perbedaan identitas, permasalahan wilayah, atau perbedaan pandangan. Menjelang akhir kekuasaan Orde baru, peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat tidak kunjung surut, contohnya kekerasan yang terjadi di Aceh, Papua, atau bahkan Jakarta sendiri. Di Jakarta, pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan dan banyak orang menjadi korban jiwa hanya karena satu identitas: keturunan Tionghoa. Kenapa bisa begitu ya? Di Bab "Diam-Diam Dihanyutkan", kamu tentu sudah tercerahkan bahwa Orde Baru berhasil mempengaruhi masyarakat luas untuk bersentimen negatif terhadap komunisme dan PKI. Orde Baru menuduh mereka yang aktif di PKI ataupun berafiliasi di PKI akan membahayakan stabilitas nasional dan wajib untuk diberantas. Hasilnya? Ratusan ribu orang menjadi korban kekejaman militer dan banyak warga yang terpengaruh

terhadap berita yang dibuat-buat ini. Nah, hal inilah yang juga terjadi di Jakarta (dan juga berbagai wilayah lain) saat kerusuhan Mei 1998. Warga tersulut dengan berita yang dibuat-buat bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh bisnis orang-orang Tionghoa, padahal ini disebabkan oleh korupsi penguasa-penguasa Orde Baru yang berkepanjangan. Kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat inilah yang menjadi dalih sebagian orang melakukan kekerasan kepada orang lain.

Dalam peta **Konflik Komunal,** kamu dapat melihat berbagai macam kekerasan yang terjadi di berbagai daerah, seperti Situbondo, Sambas, Maluku, dan Poso. Konflik ini terjadi di masa pemerintahan Soeharto dan saat peralihan Orde Baru di Indonesia menjadi periode reformasi. Berbagai kajian dilakukan untuk menyelidiki apa sebenarnya yang menyebabkan konflik ini terjadi, tentu sama seperti kamu yang ingin tahu apa yang menyebabkan temanmu berkelahi di kelas atau mengapa *geng* sekolahmu tawuran dengan *geng* sekolah lain. Mau tahu jawabannya? Kajian-kajian tersebut ternyata mengaitkan kemunculan kekerasan ini dengan peralihan dari Orde Baru yang serba menuruti perintah Soeharto ke reformasi demokrasi yang memberi ruang bagi negosiasi dan persaingan lokal atas sumber ekonomi dan politik. Agak berat ya istilahnya? Intinya, jika kamu sedang di kelas X, wali kelasmu memegang segala kendali dalam aturan kelas, mulai dari kelompok piket, teman sebangku, sampai kelompok belajar di setiap pelajaran. Ternyata di semester kedua, wali kelasmu diganti dan wali kelas yang baru membuka kesempatan bagi kamu dan teman-teman sekelasmu untuk mengatur ulang kelompok piket, teman sebangku, dan kelompok belajar. Nah, proses pergantian inilah yang dinilai memicu konflik, di mana ada saja orang yang memaksakan kehendak untuk duduk sebangku dan sekelompok dengan orang yang dinilai pintar atau orang yang rajin bersih-bersih.

Ada dua “hadiah” yang diwariskan oleh pemerintahan otoriter Soeharto, yaitu: (1) warisan kekerasan politik dan (2) “kebiasaan” pemerintah untuk melakukan **represi** demi ketahanan sosial.

Istilah baru!

Konflik adalah pertentangan yang timbul pada seseorang (masalah internal) maupun dengan orang lain (masalah eksternal) yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berupa perselisihan, ketegangan, atau kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik merupakan dinamika masyarakat sebagai konsekuensi dari interaksi sosial dan perubahan sosial.

Kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang. Tindakan ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang. Bentuk kekerasan tidak hanya sebatas memukul, menendang, melempar batu, atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang berdarah-darah, namun bisa juga perkataan yang membuat minder, tidak percaya diri, atau membuat orang kehilangan semangat untuk hidup. Kalau kamu sering mengejek teman kamu "jelek" dan temanmu jadi minder, maka itu termasuk tindakan kekerasan lho!

Represi adalah tindakan menekan, mengekang, menahan, atau menindas yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada kelompok lain.

PETA BUTA?

3. S _ _ P_ _ G
Konflik keagamaan antar warga penganut Syiah dan Sunni pada tahun 2011 dimana kelompok Sunni mengintimidasi dan membakar rumah dan mushola penganut Syiah karena dianggap aliran sesat. Tidak hanya ada korban jiwa, puluhan orang menderita luka-luka dan 49 rumah terbakar.

4. SA _ B _ S
Konflik komunal yang terjadi dan terbesar pada tahun 1999 karena akumulasi konflik antar warga etnis Melayu, Dayak terhadap pendatang dari Madura. Berakibat 1000+ tewas, luka-luka dan pengrusakan di mana-mana.

4

5

1

2

3

8

1. L _ _ P_ _ G S _ _ L _ _ AN
Konflik komunal antar warga warga Bali dan Lampung yang terjadi pada tahun 2012, yang berakibat 14 warga tewas dan belasan rumah dibakar.

2. _ EK _ SI
Sudah 13 tahun, sejak 2003 Jemaat HKBP hendak membangun tempat ibadah tetapi dilarang pendiriannya dan ibadah jemaat HKBP Filadelfia oleh warga sekitar dengan berafiliasi kelompok agama radikalisme.

5. S _ _ _ IT
Konflik komunal yang terjadi pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu antar warga Madura dan Dayak. Berakibat 600+ tewas, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal.

6. _ OS _
Konflik komunal antar warga penganut Islam dan Kristen pada tahun 1998. korban ribuan jiwa serta meninggalkan trauma psikologis.

7. M _ _ UK _
Konflik komunal antar warga penganut Islam dan Kristen pada tahun 1998, bermula dari konflik personal meluas menjadi konflik komunal. Korban diperkirakan 5000+ tewas

8. _ _ TUB _ _ DO
Kerusuhan pada tahun 1996 terjadi penyerangan gereja karena dianggap menyembunyikan Saleh dari tuntutan hukum, tetapi konflik ini meluas menjadi kerusuhan anti-Kristen dan anti-orang keturunan Tionghoa Sebanyak 34 gereja rusak, 5 tewas.

9. TO _ _ KA _ A
Konflik yang terjadi antara umat Islam dan Kristen pada tahun Juli 2015. Terjadi penyerangan Mesjid saat sholat Eid oleh sekelotmpok pemuda GIDI dengan dua kronologis versi polisi dan Presiden GIDI. Berakibat 1 mesjid dibakar, 11 orang terluka ditembak.

jawaban
1. Lampung Selatan, 2. Bekasi, 3. Sampang, 4. Sambas, 5. Sampit, 6. Poso, 7. Maluku, 8. Situbondo, 9. Tolikara

Kekerasan politik yang "dihadiahkan" oleh Soeharto adalah peristiwa 1965. Pembasmian, penahanan sewenang-wenang, dan perburuan orang yang dianggap komunis di berbagai tempat memunculkan ketegangan pada masyarakat di tempat tersebut. Meski kejadian mencekam itu sudah berlalu lebih dari 50 tahun lalu, namun di Kalimantan Barat sentimen tersebut masih berkembang dan menyebabkan konflik pada tahun 1990-an. Kalimantan Barat merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya adalah etnis Tionghoa. Diskriminasi pertama terjadi pada tahun 1967, yaitu pada saat tentara berhasil memprovokasi masyarakat Dayak untuk menyerang etnis Tionghoa (yang dituduh sebagai antek komunis) dan mengusirnya ke daerah pantai sehingga menyisakan tanah peninggalan etnis tersebut. Hal ini memicu pertikaian antara masyarakat Dayak dan Madura untuk memperebutkan tanah kosong yang ditinggal dan terus terjadi hingga ada kekerasan komunal pada tahun 1997 dan 1999.

Represi pemerintah demi "ketahanan sosial" hingga menimbulkan konflik berkepanjangan adalah ciri yang berulang di setiap konflik komunal. Hal ini diperparah dengan adanya paramiliter yang dibuat oleh institusi militer dengan merekrut warga sipil. Paramiliter tidak jarang mendapatkan dukungan fasilitas dari aparat setempat. Peran paramiliter dalam membantu represi marak terjadi pada saat pembasmian warga yang dituduh sebagai bagian PKI pada tahun 1965-1966, konflik di Aceh dan Papua, kerusuhan Mei 1998, serta referendum Timor Timur pada tahun 1999. Perlahan tapi pasti, tindakan tersebut telah membentuk pola pikir masyarakat bahwa kekerasan merupakan cara efektif untuk menghadapi perbedaan dan persoalan.

Tidak hanya menutup kesempatan untuk mengekspresikan keberagaman (salah satunya perbedaan agama dan kepercayaan), represi militer juga memiliki kekuatan yang besar untuk mengontrol "keamanan" masyarakat. Militer menempatkan pos-posnya di berbagai daerah sampai ke tingkat terendah melalui Babinsa atau Hansip. Tapi anehnya, peran "penjaga stabilitas" ini seakan tidak dilaksanakan oleh aparat keamanan ketika konflik Ambon dan Poso. Tidak ada sama sekali tindakan efektif dari aparat keamanan saat konflik. Ini menyiratkan adanya pembiaran yang dilakukan sehingga kekerasan berlarut-larut. Bahkan malah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketika aparat hadir, mereka justru terlibat dalam konflik dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk menyerang. Kalau sudah begini, siapa yang bisa dipercaya ya?

Tahukah kamu?

Salah satu paramiliter yang pro terhadap Orde Baru sejak 1965 dan masih ada sampai sekarang adalah Pemuda Pancasila.

Sumber: Malangnews

Tahukah kamu?

Jika kamu sudah membaca kisah pendirian PT Freeport di Bab "Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga", tentu kamu akan sedikit memahami mengapa banyak sekali konflik yang terjadi di Papua. Pada tahun 1969, diadakan proses voting untuk menentukan apakah Papua Barat ingin berpisah atau bergabung dengan Indonesia. Hasil yang menyatakan Papua Barat ingin bersatu dengan Indonesia ternyata tidak luput dari intrik militer. Ketentuan PBB untuk memberikan seluruh rakyat Papua Barat hak memilih diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya, hanya 1.025 rakyat Papua yang dipilih oleh militer Indonesia memilih dan keputusannya adalah: Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Empat tahun kemudian, nama Papua Barat diganti oleh Soeharto menjadi Irian Jaya hingga pada 1 Januari 2000, Gus Dur mengembalikan nama Papua sekaligus menyetujui simbol kultural bendera Bintang Kejora. Akan tetapi, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penggunaan atribut daerah berupa bendera Bintang Kejora, simbol Burung Mambruk, dan lagu "Hai Tanahku Papua" dilarang lewat PP No. 77 Tahun 2007.

Konflik Poso

Poso merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki banyak keindahan alam seperti Kepulauan Togean, Teluk Tomori, dan atraksi wisata tahunan bernama Festival Danau Poso. Daerah ini sudah terbebas dari konflik antaragama yang pernah menjadi mimpi buruk pada kurun waktu 2000-2001. Namun, pada Juli 2016 terdengar berita mengenai pelaku teror bernama Santoso di Poso yang ditembak mati. Santoso merupakan bagian dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang merupakan kelompok radikal turunan dari Laskar Jihad, yaitu kelompok massa yang melakukan serangan pada kelompok Kristen di Konflik Poso pada tahun 2001. Banyak orang yang menganggap Santoso sebagai pahlawan, padahal MIT dengan terang menyatakan mendukung *ISIS (Islamic State in Iraq and Syria)*. Sentimen terhadap keberagaman agama dan kepercayaan ternyata masih berkembang di beberapa kelompok masyarakat Poso meski hanya sedikit yang ditunjukkan dengan adanya kelompok radikal seperti MIT. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di Poso pada periode tersebut?

Konflik antarwarga yang terjadi di Poso merupakan konflik antara dua kelompok agama besar di sana: Islam dan Kristen. Konflik ini bermula dari peristiwa

pembacokan seorang pemuda di sebuah masjid di Poso pada 24 Desember 1998. Peristiwa itu menimbulkan ketegangan antarkelompok agama dengan adanya pembakaran tempat hiburan oleh kelompok Islam dan pembakaran rumah warga oleh kelompok Kristen. Tindakan penyerangan antarkelompok berhasil diredam aparat keamanan dan masyarakat sekitar pada 29 Desember 1998 meskipun sebagian warga masih mengungsi di berbagai daerah, seperti Parigi, Tentena, dan Ampana.

Konflik Poso "Jilid II" kembali merebak ketika diselenggarakannya pemilihan bupati Poso pada awal tahun 1999. Pada masa-masa pencalonan, terjadi pertikaian antarpemuda berbeda agama di Terminal Poso yang akhirnya memicu penyerangan oleh kedua pihak dan mengakibatkan pembakaran gereja serta rumah warga. Setelah Pilkada pada Oktober 1999, muncul selebaran yang bersifat provokatif menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah pejabat dari kelompok agama tertentu saat kerusuhan Desember 1998. Meskipun aparat keamanan berhasil menghentikan penyebarannya, namun hubungan sosial antarmasyarakat di Poso makin renggang.

Kerenggangan hubungan sosial masyarakat di Poso, khususnya antara kelompok Islam dan Kristen, terus terjadi dan pecah pada April 2000. Aksi saling serang antara kelompok Islam dan kelompok Kristen kembali terjadi dengan pembakaran rumah oleh kedua belah pihak dan menyebar ke berbagai daerah, seperti Kecamatan Poso Pesisir, Lage, Pamona Utara, Pamona Timur, dan Pamona Selatan. Perbedaan agama menjadi senjata antarkelompok untuk menebar kebencian. Dikarenakan konflik yang meluas ke berbagai daerah, kelompok Islam dan kelompok Kristen saling balas dan menyalahkan satu sama lain sebagai penyebab banyaknya konflik. Hal ini menyebabkan pengungsian besar-besaran sebanyak 5.000 warga Poso yang pergi, yaitu ke daerah Parigi dan Sausu. Situasi akhirnya dapat dikendalikan pada 20 April 2000 saat pertemuan antarkelompok untuk meredam kebencian dan menghasilkan perjanjian untuk tidak saling serang.

Konflik antarkelompok agama ternyata masih terus terjadi ditandai dengan Konflik Poso "Jilid III". Konflik dimulai pada Mei 2000 dengan beredarnya berita bahwa setiap kelompok yang bertikai akan menyerang satu sama lain. Meskipun beberapa berita tersebut tidak benar, namun pada 24 Mei 2000 terjadi penyerangan warga sipil oleh Pejuang Pemulihan Keamanan Poso (atau lebih dikenal dengan Pasukan Kelelawar) yang terdiri dari 12 orang (tiga di antaranya merupakan transmigram dari Flores) dan dipimpin oleh Fabianus Tibo (Tibo). Pada periode 25 Mei-2 Juni 2000, penyerangan banyak dilakukan oleh kelompok Kristen kepada kelompok Islam di Kota Poso hingga pada akhirnya pemimpin kelompok Kristen terbunuh. Insiden tersebut menyebabkan

kelompok Kristen mundur dan menghentikan serangan, namun kelompok Islam membalas serangan tersebut meski tidak sering. Untuk menghentikan pertikaian tersebut, pihak keamanan menggelar Operasi Pemulihan Keamanan dengan menerjunkan Brimob dari Jakarta dan TNI dari Batalyon Zipur Makassar ke Poso. Berbagai upaya perdamaian dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemuda yang dianggap bisa mewakili masing-masing kelompok yang bertikai. Salah satu pertemuan tokoh-tokoh adat dari seluruh kabupaten Poso mencetuskan kesepakatan "Rujuk Sintuwu Maroso" yang berisi perjanjian bersama untuk menghentikan konflik. Kesepakatan ini dibacakan di hadapan Gus Dur pada 22 Agustus 2000, namun ternyata tidak mampu menghentikan aksi kekerasan yang terus berlanjut hingga tahun 2001.

Kisah panjang konflik agama di Poso sedihnya terus berlanjut dan terus memakan korban. Pada Juli 2001, Laskar Jihad (sebuah kelompok Muslim militan yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib dan banyak melakukan serangan ke anggota polisi di Maluku) datang ke Poso dan menambah kekuatan kelompok Muslim dalam melakukan serangan terhadap kelompok Kristen. Mereka juga menggunakan senjata otomatis saat melakukan penyerangan. Dari mana mereka mendapatkan senjata ini? Ternyata, pada waktu sebelumnya di Maluku, mereka mencuri lebih dari 800 senjata dari gudang senjata polisi. Terdapat dugaan bahwa pasukan keamanan membiarkan aktivitas Laskar Jihad untuk mempermudah upaya mereka mengendalikan konflik. Laskar Jihad juga memberikan latihan bertempur kepada masyarakat agar mereka dapat menjaga wilayahnya sendiri.

Anggota Laskar Jihad dikenal memiliki kemampuan bertempur dan menggunakan senjata, tapi apakah tindakan aparat membiarkan mereka "menjaga ketertiban" merupakan hal yang benar? Nyatanya, tidak. Serangan demi serangan terus bermunculan hingga pada akhirnya, pada 20 Desember 2001, dua kelompok yang selama tiga tahun tersebut bertikai di Poso menandatangani kesepakatan untuk menghentikan segala bentuk pertikaian mereka dalam Deklarasi Malino untuk Poso.

Tahukah kamu?

Kedua kelompok agama yang bertikai di Poso memiliki sebutannya sendiri-sendiri. Kelompok Islam dikenal dengan Kelompok Putih, sedangkan Kelompok Kristen dikenal dengan Kelompok Merah.

Di Balik Konflik

Mungkin sekilas tampak bahwa sentimen atas dasar suku dan agama antara penduduk asli dan pendatang adalah sumber utama konflik di Poso. Namun, bukan itu saja yang menjadi faktor pendukung konflik di sana. Banyak kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan secara sosial dan ekonomi oleh kedatangan penduduk baru akibat program transmigrasi pemerintah. Belum lagi adanya pencaplokan lahan secara sepihak atas dasar konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH), perkebunan kelapa sawit, penetapan kawasan konservasi, dan usaha eksplorasi tambang (baca bab "Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga). Penduduk asli yang ada di daerah pedesaan jumlahnya lebih banyak dibanding para pendatang, namun sayangnya secara ekonomi mereka tertinggal dari para pendatang.

Ketegangan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi konflik antaretnis dan antaragama di Poso sengaja dipicu oleh berbagai faksi militer. Dengan adanya konflik massal ini, intervensi militer sangat mudah dilakukan ke daerah-daerah tersebut. Mengapa mereka ingin sekali mengintervensi daerah-daerah itu? Jawabannya adalah untuk melancarkan bisnis militer yang dibangun oleh "orang-orang penting" Orde Baru seperti Tommy Suharto (putra bungsu Soeharto) dan Ilham Mattalatta (putra tertua Jend. (Purn.) Andi Mattalatta).

Pertarungan kekuasaan di kursi politik juga menjadi salah satu faktor penyebab konflik. Kamu tentu tahu bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan. Maka, pemerintah tidak boleh berpihak hanya pada satu suku, agama, atau kepercayaan tertentu. Namun, sayangnya hal ini tidak terjadi di Poso saat periode konflik. Sentimen agama menjadi salah satu kekuatan masyarakat untuk mendukung salah satu calon. Bayangkan, betapa mengerikannya kalau kamu tinggal di satu kota dan terdapat kampanye para calon walikota seperti ini: "Kalau Kamu Islam, Pilih Calon yang Islam" atau "Kalau Kamu Kristen, Pilih Calon yang Kristen". Padahal tidak hanya dua agama tersebut yang ada di kotamu, ada Hindu, Buddha, Khonghucu, atau aliran kepercayaan lainnya. Apa yang terjadi kalau salah satu calon menang dan hanya peduli pada satu umat agama saja?

Keterlibatan militer dalam konflik di Poso terlihat dari banyaknya alat canggih yang dipakai kedua belah pihak saat menyerang. Ada senjata api berstandar militer M 16 dan Thomson, begitu juga penggunaan helikopter untuk menyerang dari udara. Tidak sebatas itu, ternyata juga ada indikasi bahwa terdapat anggota militer yang membiarkan salah satu kelompok melakukan penculikan, penyiksaan, atau penyerangan ke kelompok lain, serta dilaporkan juga adanya perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang mengungsi di Brimob.

Tahukah kamu?

Terdapat 29 anggota TNI/Polri yang menjalani pemeriksaan intensif oleh Polisi Militer sehubungan dengan keterlibatan mereka di Konflik Poso "Jilid III". Tujuh orang di antaranya terbukti terlibat dalam kerusuhan dan dua di antaranya merupakan perwira berpangkat kapten TNI.

Kok Perangnya Masih Ramai?

Kalau kamu suka sepak bola, tim sepak bola apa yang kamu dukung? Barcelona atau Real Madrid? Anggaplah kamu merupakan pendukung salah satu tim tersebut. Suatu hari, kedua tim ini sedang bertanding dan kamu berkesempatan menonton langsung dari Stadium Santiago Bernabeu di Spanyol. Di pertandingan itu, tim yang kamu jagokan kalah dan kamu pulang dengan rasa kecewa. Saat kamu berjalan pulang, kamu diajak nongkrong dulu bersama teman-teman sesama pendukung di suatu kafe. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke kafe dan berteriak "SUPORTER LAWAN MENGHINA TIM KITA! AYO SERBU!", dan serentak seisi kafe keluar dan langsung menyerbu suporter tim lawan, termasuk kamu. Ini berarti kamu dan teman-teman kamu sudah terprovokasi.

Tindakan provokasi inilah yang juga terjadi di Konflik Poso (dan juga konflik-konflik lainnya). Jika saat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta ada sekelompok orang tak dikenal yang teriak-teriak anti-Tionghoa dan menyebar fitnah terhadap keturunan Tionghoa, maka di Ambon dan Poso ada sekelompok orang yang berteriak-teriak menebar kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Bahkan ada bukti bahwa sekelompok orang yang melakukan provokasi dalam kerusuhan di Jakarta dan Ambon merupakan kelompok orang yang sama karena penampilan mereka sangat mirip.

Pengiriman pasukan keamanan secara besar-besaran ke daerah konflik dapat menurunkan tensi kekerasan di beberapa wilayah. Meskipun begitu, lokasi kekerasan yang tersebar di berbagai wilayah mempersulit identifikasi kelompok yang saling menyerang. Selain itu, ada pula bukti bahwa pasukan keamanan terlibat dalam konflik dengan memberikan dukungan pada kelompok tertentu, bahkan memulai penyerangan tersebut. Pada penyerangan ke Desa Soya di Ambon pada April 2002, salah seorang korban penyerangan mengaku melihat penyerang berpakaian loreng dan menutup muka mendobrak rumah-rumah dan mulai menembaki warga yang tinggal di rumah tersebut.

Pembentukan paramiliter oleh pasukan keamanan negara juga menjadi faktor konflik antarwarga yang ada di Indonesia (tidak hanya di Poso dan Ambon). Ketika penduduk sipil yang dilatih menjadi paramiliter ini dapat menggunakan senjata api, aksi kekerasan dianggap sebagai hal yang benar karena mereka sudah mendapatkan "pendidikan" dari militer. Tidak hanya pada satu kelompok saja, namun militer membantu dua kelompok yang berseteru untuk "memperkuat" kelompoknya dengan bantuan senjata.

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya seperti pengiriman pasukan keamanan dan mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk berdamai. Namun konflik belum tuntas juga. Meskipun sudah ada perjanjian damai antara dua kelompok yang bertikai (contohnya Deklarasi Malino pada Desember 2001), pemerintah gagal untuk mencari akar permasalahan. Hal ini tentu menambah kekhawatiran masyarakat bahwa para pelaku masih bebas dan bisa mengulangi tindakannya. Bisa kamu banyangkan jika ada penyerangan ke tempatmu dan polisi hanya datang untuk menyuruh para penyerang pergi tanpa menangkap pelakunya sama sekali, tentu kamu khawatir mereka dapat menyerangmu lagi.

Konflik antarwarga yang tidak diselesaikan oleh pemerintah sampai ke akar permasalahan menyebabkan adanya bibit konflik yang suatu ketika bisa muncul kembali ke permukaan. Situasi mencekam seperti di Poso juga pernah terjadi di Ambon dimulai pada 1999 dan berakhir pada tahun 2002. Tidak adanya penanganan ke akar permasalahan menyebabkan kekerasan kembali muncul di

Desa Waringin, Ambon pada September 2011 dengan sentimen agama. Selebaran yang beredar bahwa Ambon akan di-Islamisasi dan di-Kristenisasi mewarnai pemilihan Walikota Ambon yang menyebabkan pembakaran Desa Waringin. Polisi pun diam saja. Kapolres Pulau Ambon, PP Lease, pada tahun 2011 menyatakan “sulit menyelesaikan persoalan yang terjadi di Ambon karena akan dianggap berpihak kepada kelompok tertentu”. Lantas, siapa yang bisa menyelesaikannya? Ternyata, kekuatan ibu-ibu Desa Waringin berhasil memulihkan situasi di desa tersebut dengan adanya komitmen membangun dan merekatkan kembali hubungan antarwarga yang terkoyak akibat konflik. Kini, setiap gang di desa tersebut dinamai dengan pesan damai seperti Gang Damai, Gang Anti-Kekerasan, Gang Kebersamaan, dan Gang Kebangkitan. Hebat ya!
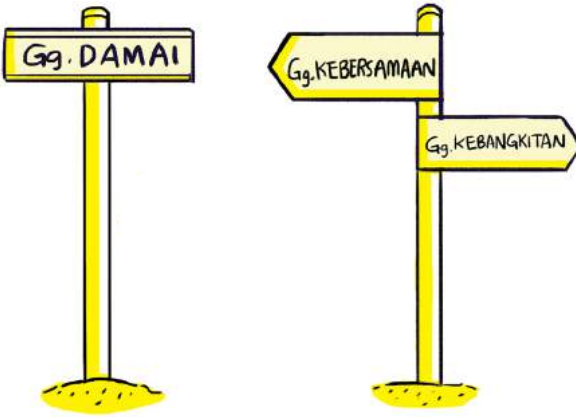
Istilah Baru!

Pela adalah sistem hubungan sosial melalui sebuah perjanjian untuk membentuk kerukunan antardesa atau antaragama yang ada di Maluku. Terdapat tiga pela yang dikenal di Maluku: Pela Karas, Pela Gandong, dan Pela Tampa Siri. **Pela Karas** adalah perjanjian yang dibuat setelah sebuah peperangan antardesa untuk mengembalikan kerukunan. **Pela Gandong** adalah ikatan keturunan untuk menjaga ikatan saudara di luar wilayah. **Pela Tampa Siri** adalah perjanjian yang dibuat untuk mengembalikan kerukunan setelah insiden kecil. Pela dipercaya sudah ada di Maluku sebelum bangsa Eropa datang sebagai peraturan mengikat untuk menjaga keharmonisan.

Tahukah kamu?

Menurut data Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, terdapat setidaknya 60 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan saat Konflik Poso terjadi pada rentang waktu 1998-2000. Tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang berseteru, namun kekerasan seksual ini juga dilakukan oleh militer yang mengiming-imingi janji keamanan. Salah satu korban kekerasan seksual adalah Iin Tungka. Iin Tungka adalah seorang perempuan yang lahir di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso pada 23 januari 1981. Ia merupakan satu dari ratusan perempuan yang dibujuk oleh anggota Brimob untuk melakukan hubungan seksual dan diberikan janji akan dinikahi. Anggota Brimob yang membujuk Iin adalah Dodi Setiawan, ia merupakan anggota yang ditugaskan dari luar daerah untuk menengahi konflik yang ada di Poso. Selama mengungsi, Iin disuruh untuk mencuci pakaian dan memasak untuk Dodi dan teman-temannya. Ketika Iin hamil dan keguguran, ia ditinggal oleh Dodi seiring masa tugasnya di Poso yang berakhir.

Deklarasi Malino

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.

9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.

Tahukah kamu?

Gong Perdamaian dibuat oleh pemerintah sebagai monumen untuk memperingati kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai daerah konflik, seperti Yogyakarta, Kupang, Singkawang, Jepara, Ambon, Poso, Palu, Bali, dan Ciamis.

Sumber: World Gong Peace, WGP Park

Tahukah kamu?

Kerusuhan yang dinilai sebagai "sentimen agama" juga pernah terjadi di Tolikara, Papua pada Juli 2015. Pada tanggal 11 Juli 2015 muncul surat edaran untuk melarang umat Islam menggelar salat Ied di Tolikara, namun pada 15 Juli 2015 pelarangan ini dicabut dan umat Islam dapat menggelar sholat Ied di Tolikara tanpa pengeras suara. Keesokan harinya bahkan perwakilan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan Bupati Tolikara menyerahkan satu ekor sapi pada umat Islam. Tetapi pada 17 Juli 2015, sekelompok Pemuda GIDI mendatangi umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Ied. Terdapat dua versi kronologis kejadian pada hari ini, versi polisi menyatakan bahwa pemuda GIDI datang dan melempari batu ke umat Islam, sedangkan

versi Presiden GIDI menyatakan bahwa pemuda GIDI hanya ingin mengingatkan umat Islam untuk tidak memakai pengeras suara saat salat Ied. Tapi satu hal yang pasti terjadi adalah aparat kepolisian menghujani pemuda GIDI dengan peluru yang menyebabkan satu pemuda berusia 15 tahun (Edi Wanimbo) meninggal dunia dan sebelas pemuda lainnya terluka karena tembakan. Banyak informasi simpang siur mengenai kasus ini untuk memojokkan kelompok agama satu sama lain, namun kamu bisa membaca catatan lengkap dan objektif terkait kasus ini di artikel yang ditulis oleh The Wahid Institute pada 30 Juli 2015. Kamu bisa cari di internet dengan kata kunci "Membaca Kasus Tolikara, The Wahid Institute".

Tahukah kamu?

Apa sih rasanya kalau kamu dilarang untuk beribadah? Tentu kamu akan merasa sedih bukan? Hal inilah yang menimpa teman-teman kita jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bogor. Mereka tidak dapat beribadah di gereja mereka sendiri karena mendapat penolakan dari warga sekitar gereja. Padahal, sudah banyak upaya hukum dan rekomendasi lembaga tinggi untuk mengesahkan pembangunan serta mengizinkan jemaat beribadah. Tapi sedihnya, hingga saat ini pemerintah daerah Bogor tidak melaksanakan rekomendasi ini yang menyebabkan para jemaat gereja (baik orang tua, dewasa, remaja, bahkan anak-anak) selalu mendapat intimidasi. Bukankah kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar?

Aktivitas

Pasangin yuk! Sudah baca kan bab kekerasan antar warga ini? Sekarang saatnya uji ingatan kamu!

Jawaban: 1-d, 2-b, 3-c, 4-g, 5-f, 6-a, 7-e

COCOK NGGAK?
1.
Tradisi Pela Gandong berasal dari mana?
2.
Pada April 2000, konflik daerah manakah yang terjadi karena perkelahian antar-pemuda berbeda agama di sebuah terminal?
3.
Konflik apa yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001?
4.
Di tempat mana sajakah yang terjadi konflik antara komunitas Muslim dan Kristen pada masa transisi?
5.
Deklarasi apa yang menjadi salah satu upaya perdamaian di Poso yang dilakukan oleh pemerintah dengan mendudukkan para pihak yang berkonflik dengan membahas perjanjian damai antar komunitas?
6.
Apa nama kelompok elit militer dan sipil yang mempunyai kemampuan dan memiliki senjata ikut terlibat dalam konflik dengan mahasiswa pada demonstrasi di tahun 1998-1999?
7.
Setelah demonstasi mereda, sebagian kelompok elit militer dan sipil yang mempunyai kemampuan militer tersebut bergabung dan membentuk?
a.
Pam Swakarsa
b.
Poso
c.
Konflik etnis Dayak dan Madura
d.
Maluku
e.
FPI/ Front Pembela Islam
f.
Deklarasi Malino
g.
Ambon dan Poso

Pola Kekerasan 5

Dipaksa Berencana

Apakah kamu pernah lihat patung atau logo "Dua Anak Lebih Baik" di tepi jalan-jalan kota? Patung ini terdiri dari masing-masing satu patung figur ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan yang saling bergandengan tangan. Dengan tatapan kosong layaknya semua patung di dunia ini, pemerintah mencoba memberikan gambaran satu keluarga bahagia yang ada di Indonesia, yaitu keluarga yang hanya terdiri dari empat anggota keluarga. Patung ini merupakan bagian dari program Keluarga Berencana (KB) yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi laju pertambahan penduduk yang pesat di Indonesia.

Indonesia menempati peringkat keempat negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Coba bayangkan, pada tahun 1976, jumlah penduduk di Indonesia masih 132,4 juta orang, dan fakta ini sampai membuat Rhoma Irama membuat lagu "135.000.000" di tahun tersebut. Meski data yang disampaikan dalam lagunya bukanlah data yang tepat, tapi intinya adalah, pertambahan penduduk di Indonesia sangatlah pesat sampai pada tahun 2016 jumlah penduduk di Indonesia adalah sebesar 260 juta orang! Penduduk di Indonesia seakan menduplikasi diri yang menyebabkan jumlah penduduk di negara ini menjadi 2 kali lipat lebih banyak dalam 40 tahun. Inilah satu alasan yang melatarbelakangi program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebenarnya apa sih program KB?

KB: Hak Reproduksi Perempuan?

Keluarga Berencana (KB) adalah program resmi pemerintah yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto untuk mengendalikan pertambahan penduduk dengan cara memasangkan alat kontrasepsi di tubuh perempuan. Pemerintahan Soeharto yakin bahwa Indonesia butuh solusi untuk mengatasi jumlah penduduknya yang terlalu banyak. Program KB dianggap sebagai cara yang efektif untuk itu. Tapi, ada masalah dalam pelaksanaan program KB, pemasangan alat kontrasepsi dilakukan tanpa persetujuan pemakai dan pemakaiannya dilakukan tanpa pemberian informasi terlebih dahulu. Coba kamu bayangkan, suatu hari saat pelajaran sekolah, kelas kamu kedatangan dokter yang berusaha meyakinkan kamu dan teman-temanmu bahwa memakai

kacamata dapat membantu kamu membaca. Karena kepala sekolah dan wali kelas kamu percaya dengan hal itu, akhirnya kamu dan teman-temanmu dipaksa memakai kacamata tanpa tahu itu kacamata minus, plus, atau silinder, atau bahkan justru kamu tidak perlu kacamata sama sekali karena mata kamu sehat-sehat saja.

Mungkin kisah tersebut hanyalah ilustrasi dari kejadian yang terjadi lebih buruk. Hal tersebutlah yang terjadi saat pemerintahan Soeharto, di mana tentara memaksa perempuan-perempuan di banyak daerah untuk memasang alat KB.

Istilah baru!

Kontrasepsi, menurut definisi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berasal dari kata 'kontra' yang berarti *mencegah atau melawan* dan 'konsepsi' yang berarti *pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi, kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma*. Kontrasepsi terdiri dari berbagai jenis, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, kontrasepsi yang disebarluaskan oleh pemerintahan Soeharto dalam Program KB hanyalah jenis susuk (implan) dan spiral atau *intrauterine device* (IUD).

Pada tahun 1968, pemerintah mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional—yang kemudian diubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1970. Pada 1980-an, pemerintah merekrut peserta Keluarga Berencana yang disebut akseptor KB, yaitu para perempuan yang tubuhnya dipasangkan alat kontrasepsi. Program yang disebut Safari KB ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi, seperti BKKBN, ABRI, Dinas Kesehatan, Dharma Wanita, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Cakupan wilayah Safari KB cukup luas dengan target ribuan orang pengguna KB dalam waktu singkat. Kegiatan Safari KB di antaranya berupa kampanye untuk mendorong para perempuan agar mengikuti program KB dan pelayanan kilat kepada mereka yang telah menjadi peserta KB.

Program KB punya tiga tujuan utama, yaitu: memperluas pemakaian kontrasepsi, meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, serta melembagakan KB dan konsep keluarga kecil. Pemerintahan saat itu ingin memastikan bahwa program ini terlaksana dalam lingkup nasional demi menekan pertambahan penduduk. Pelaksanaan program KB justru seakan melupakan tujuan akhirnya, yakni untuk menekan pertambahan penduduk. Alih-alih memonitor keberhasilan penggunaan KB oleh perempuan-perempuan yang sudah memakai alat KB, pemerintah justru menerapkan target pertambahan jumlah akseptor KB. Untuk mencapai pertambahan jumlah, pemerintah menetapkan target nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) agar akseptor KB terus bertambah setiap tahunnya. Demi mengejar target tersebut, ribuan pejabat sampai rela masuk ke desa-desa untuk mencari perempuan-perempuan yang bisa "dijadikan" akseptor KB baru. Sejak dilaksanakannya program KB yang menetapkan target tahunan dan masuk ke desa-desa, kok penduduk Indonesia tetap terus bertambah dengan pesat sampai dua kali lipat dari tahun 1976 ya?

Sistem target jumlah pengguna KB baru yang diceritakan sebelumnya justru berakibat fatal pada kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan di berbagai daerah dipasangkan alat kontrasepsi yang belum tentu cocok dengan kondisi tubuhnya. Pemasangan tanpa pemberian informasi mengenai efek samping alat KB membuat perempuan akseptor KB tidak tahu cara menangani hal yang terjadi pada tubuhnya setelah alat tersebut dipasangkan. Hal inilah yang menimpa seorang perempuan bernama Dorkas Nyake Wiwi di wilayah Sabu, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1994, Ibu Dorkas mengalami nyeri kepala yang hebat disertai badan kram dan demam yang berkepanjangan. Selain itu, Ibu Dorkas juga kehilangan nafsu makan dan mengalami pendarahan terus-menerus sampai pembalut pun tidak cukup menahan pendarahan tersebut. Semua hal itu dialami oleh Ibu Dorkas setelah ia dipaksa untuk memasang alat KB di tubuhnya. Mengerikan ya.

Meskipun ada bermacam jenis alat kontrasepsi, hanya ada dua jenis kontrasepsi yang dipakaikan kepada masyarakat melalui program KB, yaitu: spiral dan susuk. Keduanya adalah kontrasepsi yang dipasangkan hanya kepada perempuan, sehingga pihak utama yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan. Lho kok tidak adil?

Istilah baru!

Akseptor adalah istilah yang diberikan kepada orang yang dipakaikan alat kontrasepsi pada program KB dalam bentuk pemasangan kontrasepsi IUD/spiral maupun susuk/implan. Merupakan serapan dari Bahasa Inggris '*accept*' yang artinya *menerima*.

Akseptor/peserta keluarga berencana yang menderita sakit akibat tidak cocok memakai spiral, di Desa Montong Betok, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 1983. (Foto TEMPO/Muchlis D.J. Tolomundu)

Menolak KB di Orde Baru

Ternyata masalah dalam program KB bukan cuma karena tidak adanya pemberian informasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum pemasangan kontrasepsi dilakukan, tapi juga karena adanya paksaan terhadap perempuan yang menolak menjadi pengguna KB.

Pemaksaan pemasangan alat KB pada perempuan meski sudah menolak terjadi di Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 1992. Di sana program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Semua ibu yang punya anak lebih dari dua dipaksa mengikuti program KB dan bagi yang menolak akan dipaksa oleh tentara untuk dipasangkan susuk KB. Kondisi serupa juga dialami oleh perempuan di Biak, Papua. Saat itu, 50 orang perempuan dari Distrik Biak Kota mulai dari Waroi sampai di Mokmar, Desa Anggraidi dijemput paksa untuk mengikuti "operasi cincin". Petugas yang melakukan program itu mengatakan bahwa siapa pun yang punya anak lebih dari dua tidak akan dapat akses pendidikan dan bantuan dari pemerintah. Ancaman seperti itu tentu saja membuat para ibu khawatir dan dengan terpaksa ikut serta dalam program KB.

Selain karena adanya paksaan, program KB juga punya catatan kelam lainnya. Pelaksanaan program KB diperburuk dengan rendahnya kemampuan teknis para petugas di lapangan. Terbatasnya alat di rumah sakit lokal menyebabkan dokter atau petugas kesehatan tidak mampu melepaskan alat kontrasepsi jenis tertentu. Bahkan pernah petugas Puskesmas menolak mengeluarkan kontrasepsi susuk

dari tubuh salah satu pengguna kontrasepsi susuk dengan alasan bahwa petugas kesehatan yang pernah memasang alat tersebut sudah tidak bekerja di sana. *Trus* siapa *dong* yang bisa *lepasin?*

Laporan tentang dampak penggunaan kontrasepsi yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan masih terus terjadi hingga tahun 2005. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah perempuan yang melahirkan bayi dengan kontrasepsi spiral yang terdapat di kepala bayi. Hal ini membuat kerabat perempuan itu takut memakai kontrasepsi spiral dan memutuskan menggunakan KB suntik. Namun ternyata ia mengalami efek samping dan mengalami menstruasi tanpa henti. Beberapa perempuan lain juga mengalami hal yang sama, bahkan badan mereka terus bertambah gemuk hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Efek samping lain yang dirasakan adalah tekanan darah tinggi yang tidak diketahui sebelumnya karena tidak pernah ada pemberian informasi yang diberikan sebelum pemasangan kontrasepsi.

Program keluarga berencana di Indonesia sebelum *International Conference on Population and Development* (ICPD) 1994 berfokus pada pengendalian angka kelahiran. Sementara sesudahnya, program keluarga berencana lebih fokus pada aspek kesehatan reproduksi yang berisi informasi tentang hak-hak reproduksi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Dalam ICPD juga disebutkan bahwa layanan keluarga berencana harus meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dengan memperhatikan hak kesehatan perempuan. Dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi perempuan, pemerintah wajib memberikan informasi tentang kontrasepsi dan menyediakan pemeriksaan kesehatan bagi pengguna kontrasepsi sebelum menggunakannya.

Laki-laki dalam Program KB

Setelah program KB di masa Orde Baru yang hanya menargetkan perempuan dalam pemasangan alat kontrasepsi, pemerintah Indonesia lalu mulai menjadikan laki-laki sebagai sasaran program KB. Sayangnya partisipasi laki-laki masih sangat minim, padahal pemerintah menargetkan partisipasi mereka meningkat sebanyak 4,5% di rentang tahun 2004-2009. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) periode 2002-2003 juga menunjukkan rendahnya partisipasi laki-laki dalam pemakaian alat kontrasepsi. Contohnya, penggunaan kondom dan sterilisasi pada laki-laki yang hanya mencapai angka 1,3%. Itu artinya, dari 100.000 orang laki-laki, cuma dua orang yang terlibat dalam program KB.

Untuk memperbesar partisipasi laki-laki dalam program KB, pemerintah membuat beberapa program. Program ini juga memastikan bahwa program KB dilengkapi

dengan pemeriksaan kesehatan dan pemberian informasi mengenai efek samping sebelum pemasangan alat KB ke tubuh akseptor dilakukan.

Salah satu contoh program pelibatan laki-laki dalam program KB dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Mereka membentuk kelompok laki-laki pengguna kontrasepsi (pelaku vasektomi) sebagai penyuluh dan pemberi informasi bagi masyarakat sekitar *(peer educator* dan *peer counselor).* Tugas dari kelompok kerja ini adalah

memberikan penyuluhan, konseling, dan pemeriksaan dini serta memberikan rujukan pelayanan KB pada lembaga-lembaga kesehatan. Program ini masih akan melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi keterlibatan laki-laki dalam KB, menjalin kerja sama dengan bermacam pihak, serta menyebarkan informasi melalui media massa setempat.

Seorang pria menunjukan alat kontrasepsi spiral saat kampanye Keluarga Berencana (KB) di Jawa Barat, 17 Februari 1972. (Foto TEMPO/ Harun Musawa)

Baca kisahnya!

Pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi biasanya dikemas melalui program pengobatan massal di suatu daerah. Perempuan-perempuan di daerah tersebut dikumpulkan di satu tempat dengan iming-iming pengobatan gratis. Bukannya mendapatkan pengobatan, perempuan yang datang justru dipaksa dipakaikan alat KB di tubuhnya. Hal inilah yang dialami oleh Tineke Rumbaku, seorang perempuan pejuang hak asasi manusia dari Papua. Ia menjadi salah satu korban kejadian Tragedi Biak Berdarah pada 6 Juli 1998 dan hingga kini aktif memperjuangkan hak

warga Papua lainnya yang ikut menjadi korban seperti dirinya dalam kejadian itu. Berikut ini adalah pernyataan Ibu Tineke saat ia dipaksa memakai alat KB pada tahun 1996.

> "Sebelumnya menjelang 5 Oktober 1996, datang petugas dari BKKBN Biak. Waktu itu ada tiga orang ibu-ibu saya lupa nama mereka, sama kepala kantor BKKBN, Dokter Anshor, mereka datang ke Posyandu. Waktu itu di Posyandu kantor desa. Mereka bilang supaya kita datang ke kantor Angkatan Laut untuk pengobatan massal sekalian kader Posyandu akan terima honor. Tanggal 5 Oktober kita ke kantor Angkatan Laut, disuruh naik berpasang-pasangan (dua orang) untuk saling bersihkan bagian perut sampai di mulut rahim. Pengobatan massal di Biak biasanya setiap tahun dari Angkatan Laut menjelang 5 Oktober, dari Angkatan Laut (katanya) untuk membatasi kelahiran, untuk mencegah perpadatan penduduk. Angkatan Laut bikin program dari tahun 1980. Sebelum kitorang, mama-mama cerita ada yang dipasang spiral di Angkatan Laut, lalu ada petugas juga dari BKKBN."

Tahukah kamu?

Implan adalah kontrasepsi yang bersifat hormonal dan dimasukkan ke bawah kulit bagian lengan dalam. Kontrasepsi ini berupa kapsul *silasticsilikon (polidemetsilixane)* yang berisi hormon progesteron. Hormon ini akan dilepaskan sedikit demi sedikit hingga habis masa efektifnya. Pelepasan hormon tersebut membuat lendir serviks lebih kental, mengganggu pembentukan lapisan pada dinding rahim sehingga sel telur yang sudah dibuahi sulit menempel pada dinding rahim. Lendir serviks yang lebih kental akan menghambat pergerakan sperma sehingga kemungkinan bertemu sel telur lebih kecil dan menekan terjadinya ovulasi.

Tahukah kamu?

Intrauterine device (IUD) atau **spiral** merupakan sebutan untuk alat kontrasepsi yang diletakkan di tengah-tengah rahim. Spiral berbentuk seperti huruf T dan pada bagian ujung alat kontrasepsi

ini terdapat benang. Bentuk dari alat kontrasepsi T dengan spiralnya menjadikan alat kontrasepsi ini seperti benda asing dalam rahim. Spiral bekerja dengan menjadikan sel darah putih membanjiri rahim. Akibatnya, sel sperma yang masuk ke dalam rahim akan ditangkap oleh sel darah putih.

Tahukah kamu?

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), **kekerasan seksual** (terhadap perempuan) adalah setiap perbuatan yang didasari oleh perbedaan gender yang berakibat pada penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis. Salah satu bentuk kekerasan seksual dalam definisi Komnas Perempuan adalah pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi, yaitu "pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau pemaksaan penuh terhadap organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya."

Tahukah kamu?

Komnas Perempuan adalah lembaga yang lahir dari tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan yang dipicu dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada perempuan Tionghoa pada kerusuhan pada Mei tahun 1998.

Tahukah kamu?

Kekerasan seksual itu banyak bentuknya. Mungkin saja selama ini kita tidak sadar sudah melakukan salah satunya pada orang yang kita kenal. Komnas Perempuan telah mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan ke dalam 15 bentuk yang didapatkan dari hasil dokumentasi kasus yang pernah mereka terima. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu mencakup:

1. perkosaan,
2. intimidasi seksual termasuk ancaman dan percobaan perkosaan,
3. pelecehan seksual,
4. eksploitasi seksual,
5. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,

6. prostitusi paksa,
7. perbudakan paksa,
8. pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung,
9. pemaksaan kehamilan,
10. pemaksaan aborsi,
11. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi,
12. penyiksaan seksual,
13. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual,
14. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan
15. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Tahukah kamu?

Pada Konferensi Kependudukan Dunia yang dilangsungkan di Cairo, pada tahun 1994 di Cairo, 179 negara menyetujui bahwa kependudukan berhubungan erat dengan pembangunan dan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, adalah penting untuk kemajuan individu dan keseimbangan pembangunan. Konferensi ini sangat penting dalam menentukan kerangka internasional yang jelas tentang kesehatan dan hak reproduksi. Dalam kesempatan ini pemimpin-pemimpin dunia, badan-badan PBB dan wakil-wakil organisasi non-pemerintah menyepakati rencana aksi yang memasukkan aksi pemenuhan kesehatan dan hak reproduksi.

Tahukah kamu?

Karena pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas masih dianggap tabu, penyuluhan program KB sering dilakukan dengan menggunakan analogi (pengandaian). Salah satu contohnya adalah dalam sosialisasi penggunaan kondom, penyuluh biasanya mencontohkan dengan memasang kondom ke benda lain seperti jempol tangan. Alhasil, program KB tidak berjalan efektif karena masyarakat ada yang mengikutinya secara harfiah, yakni benar-benar menggunakan kondomnya di jempol tangan.

Tahukah kamu?

Pemasangan alat kontrasepsi (spiral dan susuk) dalam program KB di era Orde Baru harus disaksikan oleh aparat dan pejabat terkait untuk memastikan kebenarannya.

Sumber: *Menemukan Kembali Indonesia*

Tahukah kamu?

Masih banyak yang mengira bahwa vasektomi sama dengan kebiri. Sebenarnya vasektomi adalah proses pemisahan saluran sperma kiri dan kanan, saluran benih dikeluarkan sekitar satu sentimeter dan dipotong untuk **menghambat** saluran benih. Sementara kebiri adalah pengangkatan buah zakar atau testis sehingga **tidak dapat lagi memproduksi** sperma dan hormon testosteron. Vasektomi merupakan prosedur operasi kecil yang bahkan tidak mengharuskan pasien untuk dirawat setelah tindakan.

Tahukah kamu?

Beberapa daerah di Indonesia memberikan hadiah bagi laki-laki yang mau melakukan vasektomi sebagai bentuk kontrasepsi. Di Riau, para pelaku vasektomi ini mendapatkan hadiah sebesar satu juta rupiah, sementara di Yogyakarta mereka mendapatkan seekor kambing, dan di Bengkulu, hadiahnya berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah. Selain daerah itu, masih ada beberapa daerah lain yang menerapkan hal yang sama, seperti di Jakarta dan Mojokerto.

Simak lebih jauh!

Buklet *15 Bentuk Kekerasan Seksual*

Sebenarnya, apa saja sih bentuk kekerasan seksual? Jangan-jangan selama ini kita tidak sadar sudah melakukan kekerasan seksual pada orang lain. Yuk, lihat bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah dibuat oleh Komnas Perempuan berdasarkan rekapan kasus yang mereka tangani selama ini. Kamu bisa cari di situs web Komnas Perempuan menggunakan kata kunci "15 bentuk kekerasan seksual".

Buku *Kita Bersikap*

Ternyata, bukan cuma program KB yang memiliki dampak negatif bagi masyarakatnya, khususnya perempuan. Cari tahu apa saja program pemerintah yang memiliki efek negatif dan apa saja dampaknya bagi perempuan Indonesia dengan ketik di mesin pencari "PDF Buku Kita Bersikap" yang dibuat oleh Komnas Perempuan.

Video Program KB

Coba kamu tonton dua video program KB dari era yang berbeda dan perhatikan pesan yang disampaikan. Kira-kira, apa saja bedanya dan kritisi informasi apa yang seharusnya ada atau justru tidak perlu dalam video itu. Kamu bisa cari iklan KB versi Orde Baru dengan cari kata kunci "Iklan KB Deddy Mizwar" di YouTube, lalu kamu bandingkan dengan iklan KB versi lebih baru dengan cari kata kunci "Iklan KB Teuku Wisnu".

Permainan tentang alat kontrasepsi

Kontrasepsi adalah satu dari sekian banyak informasi seputar pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang perlu diketahui anak muda. Yuk, belajar lebih banyak tentang itu dengan cara yang seru lewat permainan menarik dengan *googling* "IWTC GAMES".

Aktivitas!

Uji pengetahuanmu dengan membedakan mana yang mitos dan mana yang fakta!

Jawaban 1F, 2F, 3M, 4M, 5F, 6M, 7M, 8M

Refleksi: MITOS vs FAKTA

JADI KAMU SUDAH PAHAM ATAU BELUM?

Berikanlah tanda ✓ di dalam kolom mitos atau fakta untuk setiap pernyataan yang di sampaikan. Lalu cek jawaban kamu, apakah sudah benar atau masih salah, lalu hitung total nilai benarnya di bagian bawah.

No	Pernyataan	Mitos	Fakta	Cek
1.	Pelaksanaan program KB telah dijalankan tanpa memperhatikan hak setiap warga Negara.			
2.	Kebiri tidak sama dengan vasektomi.			
3	Pengendalian penduduk hanya bisa dilakukan dengan memasangkan alat kontrasepsi pada perempuan.			
4.	Tidak penting untuk melakukan pemeriksaan dalam program KB karena semua jenis kontrasepsi tidak memiliki efek samping.			
5.	Pemaksaan penggunaan kontrasepsi adalah salah satu bentuk kekerasan seksual.			
6.	Alat kontrasepsi hanya tersedia untuk digunakan oleh perempuan.			
7.	Ada 5 jenis kontrasepsi yang digunakan dalam program KB Era Soeharto.			

Bila jawaban benar kamu lebih dari empat, SELAMAT! Kamu sudah paham tentang program KB! Ayo kasih tahu teman yang lain tentang informasi dan fakta sejarah seputar pelaksanaan program KB dan kaitannya dengan hak serta kesehatan reproduksi ini.

Bila jawaban benar kamu kurang dari empat, ayo segera buka link referensi yang ada di bagian akhir tulisan di atas, supaya kamu bisa lebih paham seputar program KB dan kaitannya dengan hak serta kesehatan reproduksi.

Pola Kekerasan 6
Buntu

Apa itu Hukum?

Hukum adalah salah satu kata yang paling sering kita dengar sepanjang hidup kita, barangkali sejak kita kecil dulu. Di sekolah, kita dapat 'hukuman' kalau kita lupa mengerjakan pekerjaan rumah atau terlambat datang ke sekolah. Mungkin di antara kita ada juga yang kena 'hukuman' kalau melanggar peraturan yang ditetapkan orang tua. Di dalam beberapa pelajaran eksakta seperti matematika dan fisika, kita belajar tentang hukum-hukum tertentu untuk mengukur sesuatu. Kita juga tidak asing dengan kata hukum karena "Indonesia adalah negara hukum". Ada banyak contoh hukum, tapi apa sih sebetulnya pengertian **hukum?**

Secara umum, hukum memiliki pengertian sebagai seperangkat aturan yang dijalankan melalui berbagai institusi sosial. Institusi besar seperti negara atau masyarakat adat sampai yang lebih kecil seperti sekolah atau keluarga, yang bertujuan untuk mengatur perilaku. Hukum memiliki beberapa unsur yang bisa menjadi dasar pengertian, antara lain dijelaskan berikut.

- Hukum dibuat untuk **mengatur tingkah laku** manusia dalam masyarakat. Peraturan ini berisi perintah dan larangan atas suatu tindakan. Perilaku manusia perlu diatur agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.
- Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang, tapi oleh **lembaga yang berwenang** menetapkan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.
- Penegakan aturan hukum bersifat **memaksa.** Peraturan hukum dibuat bukan

untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya, diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya.

- Hukum memiliki **sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.**

Di negara kita, segala sesuatu yang terdapat dalam hukum bersandar pada Konstitusi Republik Indonesia. "Indonesia adalah negara hukum" berarti negara kita adalah negara yang wajib patuh pada aturan main hukum *(rule of law)*. Salah satu aturan main hukum adalah **menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara.** Jika pemerintah dan aparat lainnya gagal melakukan kewajiban ini, maka negara tersebut bisa dijatuhi sanksi sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam hukum.

Sederhananya, negara hukum adalah negara yang menerapkan aturan main hukum *(rule of law)* yang menyelenggarakan kekuasaan dan bertindak dengan berlandaskan hukum. Hukum diciptakan untuk menjaga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, hukum tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, berdasarkan kepentingan pribadi atau segelintir orang, serta **tidak boleh digunakan sebagai "alat"** untuk melanggar hukum itu sendiri.

Contoh

Menerobos lampu merah di jalan raya saat berkendara adalah pelanggaran hukum. Karena itu, setiap orang yang menerobos lampu merah wajib dikenakan sanksi. Namun, kerap kita temukan penerobos lampu merah yang memberikan uang suap kepada polisi yang bertugas dan polisi yang menerima uang tersebut agar "urusan cepat kelar". Hal ini tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun. Dalil hukum tidak boleh digunakan untuk melanggar hukum itu sendiri, tak terkecuali jika hal tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Ingat kan bahwa hukum harus dijalankan sesuai dengan aturan main hukum yang berlaku *(rule of law).*

Berdasarkan kesepakatan internasional, definisi aturan main hukum *(rule of law)* mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara universal adalah sebagai berikut. Pemerintah beserta seluruh jajarannya, pejabat, aparat penegak hukum, aparat keamanan, pihak swasta, dan setiap individu **bertanggung jawab** di bawah hukum. Hukum harus jelas, dipublikasikan, disosialisasikan, bersifat stabil alias tidak berubah-rubah seenaknya, dan adil. Hukum juga harus **diterapkan secara merata** dan **melindungi** hak-hak dasar manusia.

Hukum yang berlaku harus dikelola, **ditegakkan**, dapat diakses, adil dan efisien. **Keadilan (sebagai muatan penting dalam hukum) harus disampaikan tepat waktu secara kompeten, sesuai dengan etika, independen, dan netral.**

Aturan Main Orde Baru

Ternyata tidak selamanya hukum digunakan untuk tujuan yang baik atau berpihak pada kepentingan rakyat. Di bawah kepemimpinan Orde Baru, Indonesia menerapkan model pemerintahan yang otoriter di mana kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin. Dalam sistem tersebut, tata aturan hukum *(rule of law)* tak berjalan dengan semestinya.

Bagi Orde Baru, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah hal utama. Oleh karenanya, produk hukum yang dianggap dapat mendukung tujuan tersebut dipandang penting oleh pemerintah. Sebaliknya, peraturan atau produk hukum yang tidak mendukung seperti aturan-aturan yang menjamin hak asasi manusia diabaikan, diubah, atau bahkan dihapus. Banyak juga lembaga peradilan yang berada di bawah pengaruh dan kontrol eksekutif (Presiden dan jajaran kabinet dalam pemerintahan) sehingga dapat menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan.

Coba bayangkan seandainya kamu adalah seorang presiden di era Orde Baru. Semua kekuasaan politik sepenuhnya ada di tanganmu, sehingga kamu bisa melakukan apa saja dan bebas dari pertanggungjawaban hukum. Sekarang, bayangkan kamu menggunakan uang negara untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bersama keluargamu. Padahal uang yang kamu pakai tersebut adalah uang negara untuk membangun fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Lalu, sepulangnya kamu dari luar negeri, sekelompok masyarakat beserta lembaga peradilan menggelar sidang atas kasusmu.

Karena kamu punya kekuatan penuh untuk mempengaruhi dan mengontrol lembaga peradilan, maka dengan mudahnya kamu terbebas dari segala tuntutan pertanggungjawaban hukum. Kemudian, uang negara yang harusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan di wilayah terpencil tersebut tidak kunjung diganti sehingga fasilitas kesehatan di wilayah terpencil itu tidak jadi dibangun dan menyebabkan banyak anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan semakin jatuh sakit dan kondisinya memburuk.

Begitulah kiranya contoh sederhana praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dipertahankan oleh Orde Baru. Semasa Orde Baru, aturan hukum dibangun untuk menyempurnakan model "penjinakan" masyarakat, bukan untuk kepentingan masyarakat. Aturan hukum semasa Orde Baru dibangun dengan tujuan:
sebagai sarana **legitimasi** (pengesahan/pembenaran) kekuasaan pemerintah,
sebagai sarana untuk **memfasilitasi** pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk memfasilitasi proses **rekayasa sosial** (pembentukan situasi dan kondisi sosial yang sesuai keinginan pemerintah, bukan berdasarkan keinginan masyarakat).

Apa sih maksud dari hukum untuk melegitimasi, memfasilitasi, dan merekayasa sosial? Mari kita pahami lagi lewat contoh-contoh di bawah ini.

1. Hukum digunakan sebagai alat kekuasaan.

Dengan perkembangan politik Orde Baru, ideologi persatuan nasional (atau ideologi kepentingan nasional) diartikan dengan sangat luas. Hal tersebut kerap menjadi pembenaran bagi pembentukan sistem-sistem ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang secara sepihak dianggap penting demi keberhasilan pembangunan nasional. Hukum tak hanya digunakan untuk mendukung berbagai model pembangunan ala Orde Baru, namun, keberadaan hukum yang seharusnya melindungi masyarakat malah dijadikan sebagai "alat kontrol" yang berlebihan pada era Orde Baru.

Salah satu cara Orde Baru menggunakan hukum untuk mengontrol masyarakat adalah dengan cara membungkam kebebasan berekspresi dalam bentuk pelarangan penerbitan buku yang dianggap "mengganggu ketertiban masyarakat". Pada awalnya, pelarangan buku dilakukan serampangan oleh berbagai instansi dan umumnya melibatkan militer dan terpusat di Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban (kopkamtib). Pada tahun 1968-1977, Kejaksaan Agung sebagai pemegang kuasa, tercatat hanya mengeluarkan sepuluh surat keputusan melarang. Namun, sejak tahun 1978, peran Kejaksaan Agung semakin penting dan lebih aktif dalam melarang. Dalam perjalanannya, terdapat dua lembaga yang menghubungkan kejaksaan dengan aparat keamanan dan birokrasi sipil. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) tugasnya antara lain bekerja sama dengan seluruh aparat negara di tingkat daerah untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Pada tahun 1989, muncul keputusan membentuk *clearing house* yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada jaksa agung. Pembentukan *clearing house* ini tidak menyelesaikan masalah penindakan sepihak dari lembaga lain. Ini semakin menunjukkan pemerintah Orde Baru sebagai rezim pelarangan yang bertujuan mengontrol pikiran dan pendapat masyarakat.

2. Hukum melancarkan pembangunan ala Orde Baru.

Untuk memahami bagaimana hukum "melancarkan" pembangunan ala Orde Baru yang kerap melanggar hak-hak masyarakat, simak kisah berikut ini.

> "Pada masa Orde Baru, corak pembangunan hukum, khususnya terkait dengan sumber daya alam, menghamba pada kepentingan modal atau investasi. UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, misalnya, terbukti menjadi sarana yang efektif untuk melancarkan arus investasi, namun berdampak pada terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Negara juga kerap melakukan pengakuan sepihak atas penguasaan tanah negara dengan menggunakan UU No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Kebijakan ini memudahkan pemerintah merampas dan memberikan hak kepada para pengusaha untuk menanamkan modal di bidang usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan besar. Pemerintah tidak mempertimbangkan terlebih dahulu hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan yang akhirnya mengakibatkan merebaknya berbagai sengketa agraria antara pemerintah (negara) dengan pemilik modal yang berhadapan dengan petani atau masyarakat adat. Tentu saja, masyarakatlah yang nyaris selalu dikalahkan.
>
> Secara jumlah, Orde Baru memang telah menghasilkan berbagai aturan terkait tanah dan kekayaan alam. Mulai dari sektor kehutanan, pertambangan, transmigrasi, pengairan, pemerintah desa, perikanan, konservasi, lingkungan hidup, dan lain-lain. Namun, berbagai aturan tersebut lebih mempunyai semangat mendukung eksploitasi dengan investasi tingkat besar ketimbang membela kepentingan rakyat banyak dan kelestarian lingkungan hidup."

Kesaksian Bapak Mursid Tunggara
(korban konflik sumber daya alam)

Lembaga Peradilan sebagai Alat Kekuasaan

Memberlakukan hukum sebagai alat kontrol nampaknya belum cukup memuaskan hasrat kekuasaan Soeharto selaku pemimpin utama Orde Baru. Ia juga menguasai Ikatan Hakim Indonesia untuk menjegal kemandirian hakim-hakim dan melakukan campur tangan terhadap lembaga peradilan. Padahal, hal tersebut dilarang jelas dalam UUD 1945 Pasal 24-25 yang menyatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Akibatnya, kekuasaan kehakiman menjadi runtuh dan lembaga peradilan menjadi

sangat lemah. Begitu juga ketika menghadapi intervensi militer terhadap kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau keluarga pemerintahan Orde Baru. Campur tangan tersebut tidak main-main, dilakukan secara langsung selama proses peradilan atau melalui proses rekayasa yang melibatkan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan badan-badan pemerintah lain.

Baca "Pola Kekerasan 1: Pembasmian" untuk menyimak lebih jauh mengenai campur tangan pemerintah terhadap proses peradilan. Simak juga contoh kasus di bawah ini.

> Sumarijem atau biasa disebut Sum Kuning diperkosa oleh sekelompok orang pada tahun 1971 di Yogyakarta. Menurut keterangan sejumlah pers, pelaku pemerkosaan Sum Kuning adalah sekelompok putra perwira-perwira Angkatan Darat.
>
> Sampai hari ini, identitas pemerkosa Sum Kuming masih gelap. Dalam kasus tersebut, polisi dinilai berupaya menutup-nutupi persoalan sesungguhnya dan mencari kambing hitam untuk menyelamatkan pelaku. Kasus ini merupakan contoh bahwa di masa Orde Baru, hukum tidak tegak jika menyasar sejumlah kasus yang melibatkan pejabat pemerintah, militer, atau keluarganya.
>
> Secara umum, terjadi campur tangan yang sangat kuat dari pemerintahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan secara keseluruhan yang semestinya independen. Campur tangan militer dalam mata rantai proses hukum, memberi bukti kuat bahwa rezim Orde Baru pimpinan Soeharto telah membelenggu kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan sehingga hukum jauh dari kata bersih dan tegak.

Mencari Jalan: Menyelesaikan Pelanggaran HAM

Pengungkapan kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang tidak pernah dianggap penting oleh negara menyisakan banyak pelaku yang terbebas dari hukuman dan tanggung jawab. Inilah yang disebut **impunitas,** yaitu situasi di mana pelaku pelanggaran hak dapat menghindar dari pertanggungjawaban atas dugaan terlibat dalam kejahatan. Artinya, ketika pihak yang melanggar HAM lolos dari proses peradilan dan terbebas dari konsekuensi hukum, maka itulah yang disebut impunitas.

Era reformasi merupakan tumpuan harapan akan tuntutan keadilan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Publik dan para korban menuntut

adanya pertanggungjawaban atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di era Orde Baru, misalnya Peristiwa 1965 dan rangkaian peristiwa sesudahnya. Sebut saja kasus kekerasan di Aceh dan Papua, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penghilangan paksa 1997-1998, Tragedi Semanggi I dan II, Pembunuhan Marsinah dan Udin, Timor-Timur, Kasus Kedung Ombo, serta sederet kasus pertanahan, perburuhan, dan lain sebagainya.

Sayangnya, selama 18 tahun pasca-reformasi, sejauh mana negara maupun pelaku pelanggaran HAM masa lalu dapat dimintai pertanggungjawabannya belum terjawab. Pengungkapan kebenaran juga masih menjadi proses berliku dengan tanda tanya besar dan hambatan di sana-sini. Impunitas cenderung kembali menguat dengan adanya penolakan dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti berbagai penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang telah rampung dilakukan oleh Komnas HAM.

Sampai tulisan ini dibuat, terdapat tujuh hasil penyelidikan Komnas HAM yang hingga kini bentuk tindak lanjutnya tidak jelas oleh Jaksa Agung, antara lain: Kasus Trisakti, Kasus Semanggi I dan II, Kasus Talangsari 1989, Kasus Wasior-Wamena di Papua, Tragedi 1965, Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998, dan Penembakan Misterius.

Pada Januari 2016, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia memfasilitasi pertemuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Pada pertemuan tersebut, Jaksa Agung tidak bersedia melakukan penyidikan terhadap tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan dalih bahwa semua bukti. Bukti termasuk di dalamnya hasil forensik, visum, kesaksian korban–tidak bisa dikategorikan sebagai bukti resmi dari hasil penyelidikan Komnas HAM.

Lantas, sejauh mana Komnas HAM mampu menggelar bukti hasil penyelidikan atas tujuh berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu? Mengapa Jaksa Agung langsung menyatakan bukti-bukti Komnas HAM tidak dianggap bukti resmi setelah lebih dari satu dekade membolak-balik berkas? Terdapat ribuan saksi dan korban yang memiliki berkas Berita Acara Perkara (BAP) yang bisa dipanggil sewaktu-waktu untuk memperkuat hasil penyelidikan Komnas HAM, namun, beranikah Komnas HAM melakukan ini?

Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti di atas patut untuk terus digaungkan mengingat kebuntuan hukum dan tebalnya tembok impunitas bangsa ini.

Tahukah kamu?

Berdasarkan surat yang diterima oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyebutkan beberapa hal penting, dua di antaranya yakni:

- penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang sulit alat bukti karena waktu kejadiannya terlalu lama sekitar 15-50 tahun silam, maka akan diselesaikan melalui rekonsiliasi;
- dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (telah disebutkan di paragraf di atas) semuanya akan diselesaikan melalui rekonsiliasi minus kasus Wamena-Wasior.

Nah, bagaimana tanggapanmu terhadap dua hal di atas? Apakah dua hal di atas sudah tepat untuk dipilih–dapat memenuhi hak keadilan bagi para korban?

Harus diakui, banyak sekali hambatan yang menerpa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Begitu pun dengan menghapus impunitas alias ketidakmungkinan. Secara hukum maupun *de facto* (kenyataan), untuk

membawa pelaku pelanggaran HAM mempertanggungjawabkan perbuatannya sulit. Baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif, atau disipliner mereka nyatanya tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan. Ini membuat mereka pun tidak mungkin untuk dituntut, ditahan, dan diadili.

Kegagalan negara menghukum pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab membuat aktor-aktor tersebut masih punya pengaruh politik. Para perwira militer yang diduga bertanggung jawab atas berbagai kejahatan kemanusiaan ternyata masih menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan sekarang. Sementara sebagian lainnya menyusun kekuatan baru dengan mendirikan partai politik dan memengaruhi kebijakan di parlemen.

Dengan sekelumit permasalahan tersebut, institusi peradilan pun belum menyelesaikannya. Keputusan MK yang memastikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* tidak dipatuhi. MA yang seharusnya mampu menekan penyelesaian polemik tersebut juga masih berkutat dengan persoalan internalnya.

Reformasi lembaga-lembaga peradilan yang belum tuntas menyumbang kegagalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Pada awal reformasi, dengan adanya aturan pemisahan kekuasaan peradilan dengan eksekutif, lembaga peradilan diharapkan mampu menjadi lembaga yang lebih independen. Namun tampaknya lembaga peradilan ini masih belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada para korban sehingga cita-cita besar reformasi hukum dan kebijakan masih jadi misteri berbuah penantian panjang.

Mekanisme hukum dan kondisi badan peradilan belum mampu mengadili kasus-kasus yang mengandung dimensi politik tinggi dan melibatkan aparat militer. Sejumlah kasus yang diajukan ke pengadilan terbukti tidak sepenuhnya terbongkar dan tidak mampu menghadirkan pelaku-pelaku. Coba baca lebih lanjut tentang kasus Beutong Ateuh, pembunuhan terhadap Theys H.Eluay, pembunuhan Munir, dan berbagai kasus yang terjadi selama Orde Baru.

Ada satu lagi dampak lain dari impunitas terhadap rakyat. Selama sistem hukum tidak memungkinkan kaum yang lemah untuk mengoreksi praktik dan kebijakan yang melindungi kepentingan elit, maka impunitas akan semakin langgeng. Ketimpangan ini lambat laun terlembaga dan menghasilkan sebuah masyarakat yang terbagi antara mereka “yang punya”, artinya dapat membeli pelayanan dan perlindungan untuk pemenuhan hak mereka, dan mereka yang “tak punya”–orang kebanyakan yang tak mampu membeli pelayanan ataupun perlindungan sehingga harus terus menjadi korban ketidakadilan.

Simak lebih jauh!

Kamu bisa cari saluran Ham Itu Kita. Di saluran tersebut, kamu bisa tonton 21 video yang akan berikan kamu pengetahuan lebih dalam tentang HAM, pemilu, dan demokrasi di Indonesia. Buka YouTube dan cari kata kunci "Ham Itu Kita". Selamat belajar!

Simak lebih jauh!

Apakah kamu sudah kepikiran mau jadi apa nanti kalau sudah dewasa? Tidak ada salahnya kalau cita-citamu mau menegakkan keadilan di Indonesia atau bahkan di dunia layaknya superhero. Ada satu organisasi Hak Asasi Manusia bernama Amnesty International yang secara rutin membuat laporan terkait pelanggaran HAM di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mereka juga tidak segan menuntut pemerintah sebuah negara untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi di negaranya. Amnesty International memiliki lebih dari tujuh juta anggota di 150 negara.

Simak lebih jauh!

Mereka Bilang Di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok adalah sebuah buku yang diterbitkan KontraS dan Gagas Media untuk menceritakan kejadian Tragedi Tanjung Priok 1984. Dalam buku ini diceritakan pengalaman menyakitkan korban tragedi seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang hingga mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Kalau kamu mau menambah koleksi e-Book, kini buku tersebut bisa kamu unduh gratis. Ketik "Mereka Bilang Di Sini Tidak Ada Tuhan" di mesin pencari Google dan kamu akan mendapatkan tautan untuk mengunduh buku tersebut. Selamat membaca!

Simak lebih jauh!

Marsinah adalah film berdasarkan kisah nyata yang mengungkap kejanggalan kematian Marsinah. Kalau kamu mau tahu sebenarnya siapa yang harusnya bertanggung jawab terhadap kematian Marsinah, atau bahkan mau tahu siapa sih Marsinah? Kamu bisa tonton film berdurasi 3 jam 42 menit ini di YouTube dengan kata kunci "Marsinah Mengungkap kematian Marsinah aktivis penegak HAM kaum buruh".

Aktivitas!

Lembar Ekspresi

Saatnya *refreshing* agar otak kamu tidak ikut-ikutan buntu. Pilih salah satu simbol di bawah ini dan kembangkan menjadi gambar yang menggambarkan suasana hati kamu setelah membaca bagian Kebuntuan Hukum pada buku ini di halaman ini!

silahkan kalian respon dan kembankan obyek yang ada di halaman ini sesuai dengan suasana hati kalian

Lembar Ekspresi

Tim Penyusun
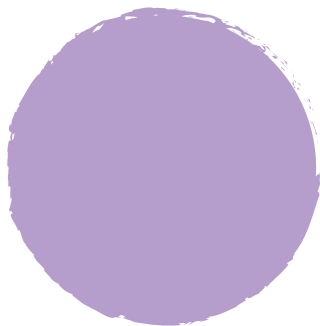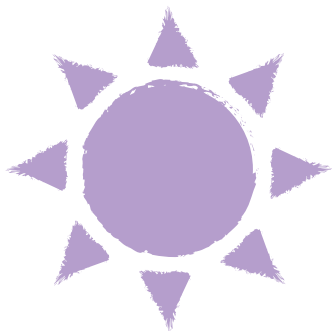
Fadlia Hana

Lahir di Jakarta tanggal 10 April 1991. Lulusan Departemen Sosiologi FISIP UI. Menyukai hujan, alat tulis, surat menyurat, guling, percakapan di KRL saat penuh, dan planetarium. Tidak suka basa-basi. Bisa ditemukan di fadliahana10@gmail.com.

Farhanah

Farhanah lahir di Bogor pada 22 Agustus 1988 dan berkuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Sempat bergabung di majalah Change milik Yayasan Jurnal Perempuan serta mengikuti penelitian dan lokakarya terkait Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas. Artikelnya tentang peran anak muda dalam kekerasan berbasis gender sempat terbit di buletin Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women pada 2012. Kini sedang di sebuah NGO, menulis lepas, dan di sela-sela waktu menuliskan ketertarikannya soal manusia dan teknologi juga puisi.

Firman Suryani

Firman Suryani yang akrab dipanggil Mangap, lahir di Virginia pada 28 November 1987. Ia berkuliah di FISIP Universitas Indonesia Depok. Ketertarikannya terhadap isu-isu sosial, seperti kemiskinan, konflik, perkotaan, dan transportasi membuat cowok yang hobi travelling dan olahraga ini sering ikut serta dalam berbagai riset terkait isu tersebut. Firman yang dulunya bercita-cita menjadi tukang parkir ini, sekarang aktif sebagai koordinator divisi Youth Studies di Pamflet.

Indriani Widiastuti

Lahir di Jakarta, 16 September 1983. Menyelesaikan pendidikannya dari Sastra Jerman, Universitas Indonesia di tahun 2006 dan S2 Ilmu Komunikasi di universitas yang sama pada tahun 2009. Salah satu karya kartunnya

pernah mendapat penghargaan “Selected Works” pada Jiaxing International Comics Exhibition, China (2008). Selain menggambar, selama 5 tahun terakhir ia aktif bekerja sebagai spesialis komunikasi dan peneliti di beberapa NGO, antara lain Yayasan Kehati dan The Interseksi Foundation. Saat ini ia bekerja mandiri, karena ia menginginkan lebih banyak waktu untuk menggambar dan berprakarya. Karya-karya Indriani lainnya dapat dilihat di slorasauna.blogspot.com.

Maulida Raviola

Maulida Raviola, atau biasa dipanggil Moli, lulus dari jurusan Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2012. Ia menyukai kajian-kajian tentang anak muda, seni dan budaya, gender dan feminisme, serta aktivisme dan gerakan sosial. Moli pernah terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tema-tema tersebut, seperti Lokakarya Kritik Seni Rupa dan Kurator Muda (Dewan Kesenian Jakarta & ruangrupa, 2014), Wani Ditata Project (Dewan Kesenian Jakarta), mengisi sesi panel Anak Muda di Ubud Writers and Readers Festival (2013) dan Annual Youth Forum yang diselenggarakan oleh Open Society Foundation di Istanbul (2015).

Muhamad Hisbullah Amrie

Muhamad Hisbullah Amrie atau yang biasa dipanggil Amri lahir di Bogor pada tanggal 9 Juli 1991. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia pada tahun 2013. Sejak lulus ia sudah bergabung di Pamflet sebagai volunteer dalam program Seperlima (Seputar Kesehatan dan Hak Reproduksi Remaja). Ia kemudian terlibat dalam banyak kegiatan di Pamflet seperti penelitian “Partisipasi Politik Anak Muda di 5 Kota di Indonesia”, Dialog Muda, Re(I)novasi Memori, MemaHAMi Indonesia, dan banyak kegiatan lainnya. Laki-laki penggemar tennis dan badminton ini bisa kamu hubungi dengan mengirim surel ke muhamad.amrie@gmail.com.

Nisrina Nadhifah Rahman

Bernama lengkap Nisrina Nadhifah Rahman dan lahir pada 27 Agustus 1994 di Bogor. Sambil menjalani pendidikan S1 jurusan Sosiologi, ia bekerja di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Sebelum bekerja di KontraS, Ninies yang menjalani pendidikan formal dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas melalui sistem homeschooling ini, pernah bekerja di Yayasan Jurnal Perempuan sebagai asisten program anak muda untuk isu gender dan seksualitas, lalu menjadi penanggung jawab komunikasi dan fasilitator di The Asian-Pacific Research & Research Center for Women (ARROW) berbasis di Kuala Lumpur. Tahun 2011-2012, Ninies menjadi asisten peneliti dan fasilitator untuk program Hak Asasi Manusia dan Seksualitas Anak Muda bersama Peace Women Across the Globe Indonesia dengan wilayah cakupan kerja di tiga daerah pasca-konflik: Atambua, Aceh, dan Ambon. Tahun 2013, Ninies bekerja di Pamflet sebagai staf divisi aktivisme dalam program tentang seksualitas bernama Dialog Muda dan program pendidikan HAM populer untuk anak muda bersama Demos dan SekitarKita.com bertajuk Youth Rights Now. Ninies merupakan nominasi untuk N-Peace Award for Emerging Peace Champion tahun 2013.

Raka Ibrahim

Lahir di Surabaya, 23 Juni 1996. Pada tahun 2012, ia aktif di Aliansi Remaja Independen dan Youth Rights Festival, mengeksplorasi isu-isu seperti hak asasi manusia, hak LGBTIQ, hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta gerakan anak muda. Ia adalah alumni Lokakarya Kritik Seni Rupa dan Kurator Muda (Dewan Kesenian Jakarta & ruangrupa, 2014), dan pernah terlibat sebagai panitia dalam penyelenggaraan pameran Jakarta Biennale (2013), Buka Warung Project (2015), serta Jakarta 32°C (2016).

Tulisannya tentang seni dan budaya, musik, dan gerakan anak muda telah diterbitkan oleh berbagai media independen, dan menjadi bagian buku antologi jurnalisme naratif #narasi yang diterbitkan oleh Pindai (2015), serta

Subjectivities (2015), jurnal asal Singapura. Pada tahun 2013, ia mendirikan media independen Disorder Zine bersama teman-temannya.

Rico Prasetyo

Secara #gaksengaja paragraf ini dirancang untuk para pembaca yang #gaksengaja membaca tulisan ini. Seorang pria kelahiran Jakarta 30 Maret 1993 yang besar di kota Bogor dan kembali mematangkan dirinya di kota kelahirannya dengan tujuan memperdalam ilmu DG (Dukun Grafis) yang saat ini memiliki visi 'menafsir desain-desain masa depan'. kini sedang aktif dan bersekongkol dengan kolektif asal bogor GSRB (Gerakan Seni Rupa Bogor) yang juga terlahir secara #gaksengaja, Kolektif ini memiliki fokus untuk mengkaji dan mengkritik ekosistem seni rupa kota Bogor dengan menyelenggarakan program serta penyusunan produk kajian dan juga ia sedang menjalani proyek personal mengenai 'instagram grid art' yang dapat di akses www.graphicexercise.com

Rika Rosvianti

Perempuan kelahiran 21 April 1986 ini sudah tertarik pada isu gender sejak SMA dan menduga tanggal lahirnya adalah hal yang memberi pengaruh magis akan ketertarikannya pada isu itu. Aktivitasnya dalam organisasi keagamaan sepanjang kuliah makin membawanya ke dalam irisan dua isu: spiritualitas dan seksualitas. Pengalaman sebagai perempuan pengguna aktif angkutan umum di ibukota menjadikan Rika sebagai salah satu founder komunitas perEMPUan di tahun 2012 yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat dan kendaraan umum. Taurean yang menggeluti bahasa isyarat sejak setahun terakhir ini adalah pecandu diskusi dan kegiatan kerelawanan. Perempuan yang akrab disapa Neqy ini tengah bekerja sebagai communication officer di PAMFLET dan menjadi volunter dalam kampanye internasional 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang digagas oleh Komnas Perempuan.

Referensi

Aditjondro, George J. (2002). *Al-Qaeda, atau Permainan Tentara? Kepentingan Militer di Balik "Konflik Antar Agama" di Poso, Sulawesi Tengah.* Dapat diakses di http://www.oocities.org/kariu67/gja110402.htm

Affan, Heyder. (2013). *"Dwifungsi ABRI, azas tunggal hingga P4"*. http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/11/131125_lapsus_suharto_kebijakankeamananorba (Diakses pada 3 Juli 2016)

Anonymous. (2012). *"Mau Vasektomi, Dapat Hadiah Rp 1 Juta"*. Artikel Hallo Riau, diakses dari http://www.halloriau.com/read-teknologi-26815-2012-07-15-mau-vasektomi-dapat-hadiah-rp1-juta.html

Anonymous. (2012). *"Salah Kaprah Soal Vasektomi, Bukan Kebiri"*. Artikel The Indonesia Healthy, diakses dari https://theindonesiahealthy.wordpress.com/2012/06/03/salah-kaprah-soal-vasektomi-bukan-kebiri/

Anonymous. (2013). *"Peserta Vasektomi Dapat Hadiah Rp 500 Ribu"*. Artikel Berita Satu, diakses dari http://www.beritasatu.com/nasional/157385-peserta-vasektomi-dapat-hadiah-rp-500-ribu.html

Anonymous. (2014). *"Sejarah Peristiwa G30S/PKI"*. Artikel Portal Sejarah, diakses dari http://www.portalsejarah.com/sejarah-peristiwa-g30spki.html

Athiyyah, Ausaf Ali. (2014). *"Wacana Rambut Gondrong dan Instabilitas Nasional"*. http://indoprogress.com/2014/10/wacana-rambut-gondrong-dan-instabilitas-nasional (Diakses pada 3 Juli 2016)

BBC News. (2014). *"Q & A: Inflation explained"* http://www.bbc.com/news/business-12196322 (Diakses pada 21 September 2016)

Budiardjo, Carmel. (2008). "Arnold Ap and Theys Eluay", http://www.insideindonesia.org/arnold-ap-and-theys-eluay (Diakses pada 4 Juli 2016)

Elsam. (2014). *Impunitas. Referensi HAM*, diakses dari http://referensi.elsam.or.id/2014/09/impunitas/

Fitriana, Ika. (2013). *"Salah Kaprah, Pria Tolak KB karena Takut Impoten"*. Artikel Kompas, diakses dari http://internasional.kompas.com/read/2013/06/10/15581559/salah.kaprah.pria.tolak.kb.karena.takut.impoten

Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi. (2015). "[Pernyataan Sikap] Tolak Reklamasi Berkedok Revitalisasi Teluk Benoa" diakses dari http://www.forbali.org/id/pernyataan-sikap-tolak-reklamasi-berkedok-revitalisasi-teluk-benoa/

Foulcher, Keith. (2010). *"Taking Poetry to the People"*. http://www.insideindonesia.org/taking-poetry-to-the-people (Diakses pada 4 Juli 2016)

George Junus Aditjondro. (2011). *"Agama Bukan Akar Kekerasan Massa"* http://indoprogress.com/2011/01/agama-bukan-akar-kekerasan-massa/. (Diakses pada 10 Juli 2016)

Gleick. (2002). "*Komodifikasi*" diakses dari http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/124/Privatisasi_Air/Komersialisasi__Komodifikasi_dan_Privatisasi.html

Gracivia, Laudy. (2016). *Peta Reklamasi Teluk Jakarta* diakses dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160406181446-23-122179/peta-reklamasi-teluk-jakarta/

Hardin Halidin. (2015). *"Membaca Kasus Tolikara"* http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-berita/305-membaca-kasus-tolikara.html. (Diakses pada 10 Juli 2016)

Howard, Sir Albert. (1943). *An Agricultural Testament* diakses dari http://journeytoforever.org/farm_library/howardAT/ATtoc.html

Ibrahim, Raka. (2015). *"Terekam, Tak Pernah Mati"*, #narasi: Antologi Prosa Jurnalisme, Pindai.

Indonesia Investments. (2015). *"Keajaiban Orde Baru Suharto di Indonesia"*. http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247 (Diakses pada 3 Juli 2016)

Indonesia Investments. (2015). *"Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter"*. http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/orde-baru-suharto/item180 (Diakses pada 3 Juli 2016)

Indonesia Investments. (2015). *"Sejarah Indonesia: Politik dan Ekonomi di Bawah Sukarno"*. http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/kolom-budaya/sejarah-indonesia-politik-dan-ekonomi-di-bawah-sukarno/item5271 (Diakses pada 3 Juli 2016)

Investopedia. (2016). *"Inflation: What is Inflation?"* http://www.investopedia.com/university/inflation/inflation1.asp (Diakses pada 21 September 2016)

Karnavian, M. Tito. (2008). *Indonesian Top Secret Membongkar Konflik Poso, Operasi Investigasi dan Penindakan Pelaku Kekerasan di Sulawesi Tengah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 51-74.

Katjasungkana, Nug & A. Tjahjo Sasongko. (1991). "Pasang Surut Musik Rock Indonesia", Jurnal PRISMA.

Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran. (2014). *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas.* Jakarta: KKPK.

Komnas Perempuan. (2014). *15 Bentuk Kekerasan Seksual. Buku saku dari website resmi Komnas Perempuan*, diakses dari http://www.komnasperempuan.go.id/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan

Kusumawardhani, Astari. (2015). "*Perjalanan Freeport Mengeruk Emas Papua*" diakses dair http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151117184945-88-92288/perjalanan-freeport-mengeruk-emas-papua/

Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso. (2009). *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Laporan Penelitian Respon Militer terhadap Konflik Sosial di Poso, Tim Peneliti Yayasan Bina Warga Sulawesi Tengah, Palu, November 2000, h. 92. Dapat diakses pada http://permalink.gmane.org/gmane.culture.region.indonesia.ppi-india/40285

Lebang, Tom. (2006). *Berbekal Seribu Akal dengan Logika, Sari Pati Pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 49-52

Made Supriatma. (2015). *"Tolikara: License To Kill?"* http://indoprogress.com/2015/07/tolikara-license-to-kill/. (Diakses pada 10 Juli 2016)

Muhammad, Miqdad. (2016). *"Asal-usul Suku Anak Dalam di Riau, Sumatera Selatan"* diakses dari http://www.satujam.com/suku-anak-dalam/

"Penyerangan di Desa Soya, 12 Tewas 12 Luka Berat". Artikel Kompas pada Senin, 29 April 2002. Dapat diakses di http://www.oocities.org/kariu67/kompas290402d.htm

Priyono, AE. (2014). *"Golongan Putih: Dari Alienasi ke Oposisi"*. http://indoprogress.com/2014/02/golongan-putih-dari-alienasi-ke-oposisi/ (Diakses pada 4 Juli 2016)

Raviola, Maulida. (2014). *Tipologi Organisasi Anak Muda di Indonesia,* Pamflet Generasi.

Reporters Without Borders. (2016). "RSF tells Indonesia to stop flouting journalists' rights in West Papua". https://rsf.org/en/news/rsf-tells-indonesia-stop-flouting-journalists-rights-west-papua (Diakses pada 4 Juli 2016)

Risnandar, Cepep. (2016). *"Deforestasi"* diakses dari https://ensiklopedia.id/deforestasi/
Roosa, John. (2006). Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.

Sadikin, Usep Hasan. (2015). *"Arief Budiman (Soe Hok Djin) | Golput yang Benar"*. http://www.rumahpemilu.org/in/read/6830/Arief-Budiman-Soe-Hok-Djin-Golput-yang-Benar (Diakses pada 4 Juli 2016)

Sandiputra, Rio. (2014). *"Peserta KB Dapat Hadiah Rp 150 Ribu"*. Artikel website resmi Pemprov DKI Jakarta, diakses dari http://www.beritajakarta.com/read/1112/Peserta-KB-Dapat-Hadiah-Rp-150-Ribu#.V29PChJ7tdI

Santoso, Bangun. (2015). *"Fakta Menarik Sputar Suku Anak Dalam di Jambi"* diaskses dari http://news.liputan6.com/read/2355588/fakta-menarik-seputar-kehidupan-suku-anak-dalam-di-jambi

Siswoyo, Harry dan Daru Waskita, (2015). "Pria Peminat KB Dihadiahi Kambing Bunting". Artikel Viva News, diakses dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/619059-pria-peminat-kb-dihadiahi-kambing-bunting

Soerjono, Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sucahyo, Nurhadi. (2013). *"Pemda Yogyakarta Berikan Hadiah Kambing Bagi Pelaku Vasektomi"*. Artikel VOA Indonesia, diakses dari http://www.voaindonesia.com/a/pemda-yogyakarta-berikan-hadiah-kambing-bagi-pelaku-vasektomi/1607825.html

Susanto, Ari. (2015). *"Jembatan Bacem Merekam Tragedi 1965 di Solo"*. Artikel Rappler, diakses dari http://www.rappler.com/indonesia/107568-jembatan-bacem-tragedi-1965-solo

Tajima, Yuhki. (2012). *The Institutional Origins of Communal Violence: Indonesia's Transition from Authoritarian Rule*. New York: Cambridge University Press.

Van Klinke, Gerry. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. New York: Routledge.

WatchDoc Image. (2015). *Samin vs Semen* diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q

Watts, Anthony. (2012). *"Green Grabs: The Dark Side of The Green Economy"* diakses dari https://wattsupwiththat.com/2012/06/15/green-grabs-the-dark-side-of-the-green-economy/

Wibowo, Tunardy. (2012). *"Pengertian Hukum Agraria" diakses dari http://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-agraria/*

Buku ini diterbitkan oleh:

Dan didukung oleh:

YANG KELEWAT DI BUKU SEJARAH

Buku yang ada di tanganmu saat ini adalah salah satu caramu untuk bertemu dengan banyak orang, pergi ke banyak tempat, dan mendengarkan kisah-kisah yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya di sebuah tempat bernama Indonesia.

Konon, di tempat yang sering disebut bertanah subur dengan rakyat yang hidup makmur ini, pernah terjadi banyak sekali peristiwa kekerasan; perampasan tanah, pemaksaan, penganiayaan, penculikan, bahkan pembunuhan dan pembantaian terjadi berulang-ulang dengan korban yang tidak sedikit. Peristiwa-peristiwa ini kadang kelewat di buku sejarah, yuk cari tahu dalam buku ini!

www.pamflet.or.id

ISBN 978-602-71743-2-0